

KINERJA PEMBANGUNAN

SEKTOR PERTANIAN 2006



DEPARTEMEN PERTANIAN
JANUARI 2007

KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN 2006



DEPARTEMEN PERTANIAN
JANUARI 2007

VIII**HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN****99**

8.1 Pemeriksaan Kinerja

100

8.2 Pemeriksaan Khusus/Investigasi

101

8.3 Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

103**IX****RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2007****105**

9.1 Rencana Kerja Tahun 2007

106

9.2 Anggaran Tahun 2007

107**X****PENUTUP****117****LAMPIRAN****119****DAFTAR TABEL****xi****DAFTAR GAMBAR****xiv**

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. PDB sektor pertanian pada tahun 2006 tumbuh dengan sangat mengesankan mencapai 3,50 persen dibandingkan dengan tahun 2005 (angka PDB sampai semester III). Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2004 dan 2005. Pertumbuhan semua sub-sektor pertanian bangkit mengalami pertumbuhan yang tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu Tanaman Pangan (2,89%), Perkebunan (5,12%) dan Peternakan (3,99%). Ini merupakan bukti bahwa sektor pertanian sedang menuju pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan (*sustaining growth*) setelah sejak tahun 2003 telah berada pada fase percepatan pertumbuhan (*accelerating growth*).
2. Pertumbuhan PDB sub sektor Tanaman Pangan dipicu oleh kenaikan produksi padi, pertumbuhan PDB sub sektor perkebunan didorong peningkatan ekspor karena terjadinya perbaikan harga dunia komoditas perkebunan, dan pertumbuhan PDB sub sektor peternakan disebabkan tarikan permintaan konsumsi daging ayam yang mengindikasikan pulihnya konsumen daging ayam akibat keberhasilan pemerintah dalam kampanye penyadaran kepada masyarakat bahwa unggas yang dimasak pada suhu tertentu tidak menyebabkan konsumen terserang penyakit flu burung. Masyarakat pun belajar dari kenyataan bahwa ternyata apa yang disampaikan pemerintah benar adanya. Serangan flu burung pada unggas pun terlihat cenderung menurun. Pertumbuhan PDB sektor pertanian yang terjadi di semua sub sektor tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi internal Departemen Pertanian dan koordinasi eksternal dengan Pemerintah Daerah cukup padu.
3. Sebagai mesin penggerak produksi, investasi di sektor pertanian selama periode 2005-2006 mengalami pertumbuhan yang pesat. Persetujuan investasi PMDN dan PMA pada tahun 2005 masing-masing meningkat 9,0 dan 15,0 persen dibanding tahun 2004, dan sampai dengan bulan Agustus 2006 persetujuan investasi PMDN dan PMA meningkat lagi masing-masing 30,6 dan 9,1 persen. Bukan hanya nilai persetujuan investasi yang meningkat, jumlah proyek yang disetujui juga meningkat. Pada tahun 2005 jumlah proyek investasi PMDN dan PMA yang disetujui meningkat masing-masing 9,0 dan 41,0 persen dibanding tahun 2004, dan sampai bulan Agustus 2006 jumlah proyek investasi PMDN dan PMA yang disetujui juga meningkat masing-masing 38,64 dan 87,63 persen. Dibanding sektor perikanan dan kehutanan, nilai investasi di sektor pertanian jauh lebih besar.
4. Fakta perkembangan persetujuan investasi yang demikian pesat tersebut membuktikan bahwa kebijakan Departemen Pertanian telah mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk investasi di sektor pertanian, sekaligus fakta tersebut sebagai argumentasi mengapa pertumbuhan PDB sektor pertanian pada semester I demikian tinggi yaitu 4,81 persen.
5. Produksi padi tahun 2006 mencapai 54.663.594 ton GKG (ARAM III-2006) meningkat 0,95 % dibanding produksi tahun 2005 (ATAP 2005). Kenaikan produksi tersebut berasal dari peningkatan luas panen 0,13 % dan produktivitas sebesar 0,81 %. Walaupun dalam situasi sulit akibat kenaikan biaya produksi karena kebijakan kenaikan BBM dan meningkatnya laju konversi lahan sawah serta di beberapa daerah mengalami kekeringan, namun produksi masih dapat ditingkatkan. Keberhasilan peningkatan produksi tersebut berkaitan dengan cukup efektifnya regulasi yang diajukan Departemen pertanian dalam menciptakan insentif harga bagi petani dimana harga di tingkat petani selama tahun

2006 berada di atas HPP-nya. Ini merupakan bukti bahwa insentif merupakan faktor penentu peningkatan produksi padi.

6. Dari sisi penanganan pasca panen telah dilakukan berbagai rekayasa untuk menekan kehilangan hasil, misalnya melalui pengembangan Kecamatan Pasca Panen (KKP). Dari pemantauan sementara di beberapa propinsi tertentu rekayasa tersebut telah berhasil menekan kehilangan hasil pada gabah sebesar 3-5%.
7. Peningkatan produksi padi tahun 2006 menghasilkan surplus (perkiraan produksi dikurangi perkiraan konsumsi tahun 2006) sebesar 110.030 ton. Surplus tahun 2006 meningkatkan stok beras. Stok akhir tahun 2006 di masyarakat diperkirakan mencapai 3.408.829 ton meningkat dibanding tahun 2005 sebesar 671.030 ton. Peningkatan stok ini menunjukkan bahwa penyediaan produksi beras dalam negeri semakin membaik.
8. Akibat bencana alam yang terjadi di beberapa daerah selama tahun 2006 menyebabkan stok Perum Bulog sampai dengan akhir tahun 2006 diperkirakan mengalami penurunan menjadi hanya sebesar 532.000 ton beras (di bawah iron stock 1 juta ton). Ketidakmampuan Bulog mengisi stok dari produksi dalam negeri disebabkan oleh kesulitan Perum Bulog melakukan pengadaan dalam negeri karena harga pasar lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP). Walaupun stok Perum Bulog rendah, namun demikian stok di masyarakat cukup besar, yaitu sekitar 3,41 juta ton. Hal ini terbukti dengan cenderung turunnya harga gabah di beberapa sentra produksi ketika ada rencana impor beras.
9. Keberhasilan meningkatkan produksi padi melalui peningkatan luas areal telah menyebabkan penurunan luas areal jagung sebesar 3,54 persen. Pengalihantanaman jagung ke padi, selain disebabkan oleh kondisi air yang masih memungkinkan untuk menanam padi juga karena insentif harga padi telah

menyebabkan keunggulan kompetitif padi lebih tinggi dibanding jagung. Untuk mengkompensasi penurunan produksi jagung yang disebabkan oleh penurunan luas panen, Departemen Pertanian berupaya keras meningkatkan produktivitas jagung melalui penggunaan benih hibrida, dan berhasil meningkatkan produktivitas sebesar 0,47 persen, sehingga penurunan produksi jagung tahun 2006 dapat ditekan hanya sebesar 3,54 persen. Ke depan diperlukan perluasan areal jagung ke wilayah-wilayah potensial di luar Jawa.

10. Produksi kacang dan umbi-umbian belum mencapai target sasaran. Pencapaian produksi kedelai baru mencapai 94,31 %, demikian pula dengan kacang tanah (93,64 %), kacang hijau (94,67 %), ubikayu (99,04 %) dan ubi jalar (92,59 %). Hal ini disebabkan karena belum semuanya panen atau masih dalam pertanaman (standing crop).
11. Dari sisi produksi nasional, pada tahun 2004 produksi buah-buahan mencapai 14.348.456 ton (ATAP 2004) dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 14.786.599 ton (ATAP 2005), atau meningkat 3,05%. Pada tahun 2006, produksi buah diperkirakan naik menjadi 16.168.000 ton (angka sasaran 2006) atau naik 9,34%. Kenaikan terutama diperoleh dari buah jeruk, mangga, salak, nenas, pepaya dan markisa.
12. Ketersediaan buah-buahan perkapita meningkat 18,11%, yaitu dari 54 kg/kapita/th pada tahun 2004 menjadi 63,78 kg/kapita/th pada tahun 2005. Demikian pula dengan sayuran yang juga meningkat 13,64%, yaitu dari 33 kg/kapita/th pada tahun 2004 menjadi 37,50 kg/kapita/th pada tahun 2005. Peningkatan ini merupakan hasil dari upaya peningkatan produksi dan kualitas produk yang telah dilakukan selama ini.
13. Produksi sayuran pada tahun 2004 (ATAP 2004) sebesar 9.059.676 ton dan pada tahun 2005 (ATAP 2005) meningkat 0,46% menjadi 9.101.987 ton

dan pada tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 9.700.000 ton (angka sasaran 2006) atau 6,57%.

14. Produksi komoditas perkebunan periode Oktober 2005 – Oktober 2006 diperkirakan akan naik 7,76% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu dari 24.442.708 ton menjadi 26.340.265 ton. Kontribusi utama dari tanaman tahunan meliputi karet sebesar 2.367.064 ton, kelapa sawit (15.232.064 ton), kopi (615.995 ton), kakao (657.920 ton) dan kelapa (3.806.089) ton. Sementara dari tanaman semusim adalah tebu sebesar 2.392.141 ton.
15. Khusus untuk komoditi tebu perkembangan pelaksanaan giling Musim Tanam Tahun 2005/2006 sampai dengan bulan Juli 2006 mencapai areal seluas 190.127 ha, tebu digiling sebesar 15.226.426 ton dengan rendemen rata-rata sebesar 7,36%. Hablur yang dihasilkan 1.120.612 ton dengan produktivitas tebu 80,1 ton/ha dan produktivitas hablur 5,89 ton/ha. Produksi hablur tersebut mencapai 54,7% dari sasaran tahun 2006 sebesar 2.477.929 ton. Musim giling baru akan selesai sekitar November 2006, dan diperkirakan sasaran produksi hablur 2006 akan dapat dicapai. Hal ini terlihat dari rendemen rata-rata yang menunjukkan peningkatan.
16. Populasi Ternak dalam kurun waktu tahun 2005 - 2006 populasi ternak menunjukkan peningkatan, yang besarnya antara 2,52% sampai 19,85% dengan peningkatan terbesar pada ayam ras pedaging dan terkecil pada sapi potong .
17. Produksi daging, telur, dan susu antara tahun 2005-2006 mengalami kenaikan, yakni masing-masing untuk daging sebesar 13,94%, telur 7,83%, dan susu 7,77%.
18. Pada tingkat nasional, jumlah angkatan kerja pada tahun 2004 adalah 103.973.387 orang. Dari jumlah tersebut yang bekerja adalah 93.722.036

orang atau 90,14 persen, sedangkan sisanya sebesar 10.251.351 atau 9,86 persen adalah pengangguran terbuka. Pada tahun 2005, jumlah angkatan kerja telah meningkat cepat menjadi 105.802.372 orang atau meningkat 1.828.935 orang (1,76%). Dari jumlah angkatan kerja pada tahun 2005 ini, yang bekerja adalah sebanyak 94.948.118 orang atau 89,74 persen, sedangkan sisanya sebesar 10.854.254 orang atau 10,26 persen adalah pengangguran terbuka.

19. Dari jumlah yang bekerja pada tahun 2004, sebanyak 40.608.019 orang atau 43,33 persen bekerja di sektor pertanian, sedangkan sisanya sebanyak 53.114.017 orang atau 56,67 persen bekerja pada sektor non-pertanian.
20. Selama periode 2004-2005, jumlah yang bekerja di sektor pertanian meningkat 1.206.178 orang (2,97%), sehingga pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian meningkat dari 43,33 menjadi 44,04 persen, sementara itu, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor non-pertanian hanya meningkat 19.904 orang (0,04%), sehingga pangsa yang bekerja di sektor non pertanian menurun dari 56,67 persen menjadi 55,96 persen.
21. Dari perkembangan ini jelas bahwa sektor pertanian masih tetap menjadi andalan pencipta tambahan kesempatan kerja dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding sektor non-pertanian.
22. Pada tahun 2005 nilai ekspor sebesar US\$ 11.4 milyar jauh lebih besar dibanding nilai impor yang hanya sebesar US\$ 5.1 milyar, sehingga neraca perdagangan pada tahun 2005 mengalami surplus sebesar US\$ 6.3 milyar Surplus neraca perdagangan tahun 2005 tersebut lebih tinggi 29.58 persen dibanding tahun 2004. Pada tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2006 nilai ekspor sebesar US\$ 5.6 milyar juga jauh lebih besar dibanding nilai impor yang hanya sebesar US\$ 2.3 milyar, sehingga neraca perdagangan pada tahun

2006 mengalami surplus sebesar US\$ 3.3 milyar. Surplus neraca perdagangan tahun 2006 sampai dengan bulan Mei meningkat sebesar 46.56 persen dibanding tahun 2005.

23. Sebagian besar yaitu 97 persen ekspor pertanian berasal dari komoditas perkebunan, sedangkan sebagian besar impor produk pertanian didominasi oleh produk pertanian yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti gandum. Keberhasilan meningkatkan surplus neraca perdagangan selama dua tahun terakhir merupakan bukti tak terbantahkan keberhasilan Departemen Pertanian dalam meningkatkan daya saing komoditas pertanian khususnya komoditas perkebunan di pasar dunia.
24. Nilai Tukar Petani (NTP) berdasarkan tahun dasar 1993=100, pada tahun 2006 sebesar 102.35 mengalami peningkatan 1.28 persen dibanding tahun 2005. Ini menunjukkan bahwa, selain kondisi kesejahteraan petani tahun 2006 lebih baik dibanding tahun 1993, juga kondisi petani tahun 2006 lebih baik dibanding tahun 2005.
25. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan mengalami penurunan. Indeks daya beli petani tahun 2006 dapat ditekan penurunannya hanya sebesar -0.20 persen. Penurunan tersebut masih lebih kecil dibanding penurunan yang terjadi tahun 2005 yang mencapai -2.83 persen. Dengan demikian, kebijakan pembangunan pertanian yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan petani telah mampu menekan penurunan daya beli petani pada tahun 2006.
26. Selain itu, kebijakan insentif berproduksi yang diciptakan oleh Departemen Pertanian juga telah mampu meningkatkan indeks insentif berproduksi. Indeks insentif berproduksi tahun 2006 meningkat 4.49 persen dibanding tahun 2005 dimana pada tahun 2005 indeks tersebut sempat mengalami penurunan sebesar -0.71 persen.

27. Fakta-fakta tersebut memberikan bukti kuat bahwa kebijakan Departemen Pertanian telah berkontribusi dalam upaya meningkatkan kondisi kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tukar petani. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan NTP bukan hanya bergantung kepada kebijakan bidang pertanian saja, tetapi dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian secara keseluruhan.
28. Asupan gizi masyarakat pedesaan mengalami peningkatan secara konsisten sejak tahun 2004. Selama periode 2004-2005 asupan energi meningkat dari 2018 menjadi 2060 kkal atau sekitar 103,2 persen di atas norma angka kecukupan gizi (AKG). Begitu juga dengan asupan protein meningkat dari 53.7 menjadi 55.3 gram atau sekitar 106,3 persen di atas AKG.
29. Selama periode 2004-2005 skor PPH (Pola Pangan Harapan) masyarakat pedesaan meningkat dari 74 menjadi 77.6. Ini semua bisa dicapai karena adanya peningkatan produksi komoditas pertanian.
30. Keberhasilan pembangunan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin secara konsisten berlanjut sampai tahun 2005. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin di pedesaan tinggal sekitar 19,5 persen atau 22,7 juta orang dan di perkotaan sekitar 11,37 persen atau 12,4 persen. Fenomena sebaliknya terjadi sampai Maret 2006, dimana jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun perkotaan mengalami peningkatan dibanding tahun 2005. Jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat menjadi 21,90 persen (24,76 juta orang) tahun 2006 dan di wilayah perkotaan meningkat menjadi 13,36 persen (14,29 juta orang) tahun 2006. Secara absolut peningkatan jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan dan perkotaan hampir seimbang, yaitu sekitar 2 juta orang.
31. Ke depan tantangannya adalah bagaimana pembangunan di Indonesia segera bisa membalik

arah spiral jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat dari tahun 2005 ke Maret 2006 menjadi menurun seperti yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data di mana hampir separuh angkatan kerja berada di bidang pertanian, peranan pertanian sangat esensial dalam upaya meningkatkan jumlah penduduk miskin di pedesaan.

32. Capaian pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2006 yang mencapai 3,50 persen tersebut tidak terlepas dari keberhasilan tiga program Departemen Pertanian yaitu; (1) peningkatan ketahanan pangan; (2) pengembangan agribisnis yang pada intinya berupaya mendorong peningkatan daya saing, efisiensi dan penciptaan nilai tambah bagi petani; dan (3) peningkatan kesejahteraan petani, dalam menciptakan kondisi berusaha dan mendorong partisipasi jutaan petani, pedagang dan pengusaha agribisnis serta masyarakat lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya.
33. Adapun fokus kegiatan yaitu : (1) penguatan modal usaha meliputi (i) penguatan modal usaha kelompok (PMUK), (ii) pengembangan agribisnis melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3); (iii) pengembangan pembiayaan pertanian dengan berbagai skim yang disesuaikan dengan kondisi keuangan petani; (iv) dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPM – LUEP) yang berfungsi untuk menstabilkan harga gabah ditingkat petani; (2) akselerasi inovasi dan penerapan teknologi pertanian serta pengembangan produk teknologi pertanian; (3) pengembangan dan rehabilitasi prasarana dan sarana irigasi dan infrastruktur pertanian serta penanganan pasca panen dan pengolahan hasil; (4) pengembangan SDM dan revitalisasi penyuluhan; (5) dukungan kelancaran penyediaan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk dan pestisida serta lainnya; (5) stabilitas harga dan pengembangan Pasar.
34. Hasil pemeriksaan kinerja tahun 2006 sampai bulan Desember, ditemukan 1.360 temuan,

yaitu dalam kelompok temuan kerugian negara 234 temuan senilai Rp 1.447.620.186,43 dan temuan administrasi/non keuangan 735 temuan. Sedangkan temuan penyimpangan keuangan dengan kategori tidak efisien sebanyak 96 temuan senilai Rp 2.782.544.694,71 tidak efektif sebanyak 268 temuan senilai Rp 15.159.112.777,25 dan tidak hemat sebanyak 27 temuan senilai Rp 2.346.756.679,00.

35. Hasil pemeriksaan khusus/investigasi telah memberikan rekomendasi pengenaan sanksi PP.30 Tahun 1980 kepada PNS lingkup Departemen Pertanian sebanyak 22 orang, yaitu 14 orang hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis, 3 orang hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, dan 2 orang hukuman disiplin berat berupa penundaan kenaikan yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun, dan khusus 3 orang PNS lingkup Dinas daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Kerugian negara akibat penyimpangan yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp 1.434.984.543,00, sudah terealisasi penyetoran ke negara sebesar Rp 683.790.202. (47,65 %) sisanya masih sedang ditindaklanjuti proses penyelesaiannya.
36. Tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus/investigasi mulai Oktober 2004 sampai dengan bulan Desember 2005, diserahkan kepada Eselon I dimana personil tersebut berada. Kerugian negara dari pemeriksaan khusus telah ditindaklanjuti senilai Rp. 20.232.949.194,40 (92,37%) dari total kerugian negara senilai Rp. 21.904.345.143,31. Sisa sebesar Rp 1.671.395.948,91 (7,63%) masih dipantau oleh Inspektorat Jenderal.
37. Beberapa upaya yang telah ditempuh oleh departemen Pertanian untuk mengendalikan wabah AI adalah:
Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza: Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza

(UPPAI) Pusat dibentuk bulan Maret 2006 yang secara khusus mengkoordinasi pelaksanaan pengendalian AI dan telah menerbitkan dan mendistribusikan Standar Prosedur Operasional (SOP) pengendalian AI. UPPAI telah menyusun konsep pembentukan UPPAI Regional dan UPPAI Propinsi. Saat ini cikal bakal UPPAI Propinsi masih dalam bentuk proyek dengan nama Local Disease Control Centre (LDCC).

Vaksinasi: Pada tahun 2005 (Oktober–Desember) telah dilakukan vaksinasi 22,3 juta dosis dan tahun 2006 sedang dilaksanakan vaksinasi dengan 120 juta dosis vaksinasi.

Depopulasi dan Kompensasi: Pada tahun 2005 jumlah unggas yang didepopulasi 0,3 juta ekor dengan nilai bantuan sebesar Rp. 4,2 miliar. Tahun 2006 tersedia dana untuk bantuan depopulasi sebesar Rp. 30 miliar. Sampai dengan Agustus 2006 telah dilakukan depopulasi 154 ribu ekor pada unggas dengan kompensasi Rp. 1,57 miliar. Rendahnya depopulasi menunjukkan wabah pada peternakan rakyat cenderung menurun.

Public Awareness dan Surveilans: Kegiatan yang telah dilakukan mencakup: pembentukan Tim Tanggap Darurat AI, penyediaan fasilitas hot-line, pencetakan dan distribusi bahan public awareness, talk show interaktif, penerbitan dan penyiaran iklan layanan masyarakat, dan press release. Kegiatan Public Awareness diikuti oleh kegiatan Surveilans. Kegiatan ini harus terus dilakukan secara sistematis kepada seluruh peternak rakyat.

Deteksi Dini: Departemen Pertanian menerapkan pendekatan pengendalian penyakit secara partisipatif (participatory appraisal) untuk meningkatkan deteksi dini dan respon cepat terhadap kasus avian influenza. Pendekatan ini mulai diterapkan pada awal 2006 dengan pembentukan dan operasionalisasi Local Disease Control Centre (LDCC) beserta tim pelacak penyakit

(Participatory Disease Search) dan tim respon cepat (Participatory Disease Response) sebagai proyek percontohan di empat LDCC pada awal tahun 2006.

38. Program utama Departemen Pertanian pada tahun 2007 akan diimplementasikan ke dalam 29 (dua puluh sembilan) kegiatan utama. Kegiatan utama tersebut diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan mendasar pembangunan pertanian yang hingga saat ini belum dapat teratasi secara tuntas.
39. Kegiatan – kegiatan utama tersebut terdiri dari: (1) Pembentukan dan Pengaktifan Kelompok Tani dan Gapoktan; (2) Pengembangan Bantuan Harga Benih Bagi Petani Miskin; (3) Penjaminan Kredit Pertanian (4). Bantuan Bunga Modal Investasi; (5). Stabilisasi/Kepastian Harga Komoditas Primer melalui Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM–LUEP); (6) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3); (7) Pengembangan Bahan Baku Bio-Energi; (8) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian; (9). Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Perbibitan; (10) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk; (11) Pengendalian OPT, Penyakit Hewan dan Perkarantinaan; (12) Pengembangan Kegiatan Magang Sekolah Lapang (SL) Pertanian; (13) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Petani dan Revitalisasi Penyuluhan; (14) Pengembangan Kegiatan Pelatihan Pertanian; (15) Mekanisasi Kegiatan Produksi Komoditas Pertanian Primer (Pra Panen); (16) Mekanisasi Kegiatan Pertanian Pasca Panen; (17) Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA); (18) Pengembangan Agroindustri Pedesaan; (19) Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian; (20) Pengembangan Fasilitas Pelayanan

Terpadu Agribisnis; (21) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian; (22) Peningkatan Kegiatan Eksebis, Perlombaaan dan Penghargaan Pertanian ; (23) Pengembangan Pusat Pembibitan Sapi; (24) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, Kompos, dan Biogas; (25) Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup; (26) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat, khususnya Karet, Kopi, Sawit, Kakao, dan Mete; (27) Pengembangan dan Diseminasi Inovasi mendukung Pembangunan Pertanian; (28) Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Kebijakan dan Regulasi, dan (29) Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan di Daerah.

40. Kedua puluh sembilan kegiatan utama tersebut didukung oleh dana RAPBN Departemen Pertanian tahun 2007 yang berdasar pagu definitif sebesar Rp 8.789,62 milyar dengan rincian anggaran Rupiah Murni (RM) Rp 8.405,62 milyar (95,63%) dan sisanya sebesar Rp 383,99 milyar (4,375 %) berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Perkembangan ini menunjukkan komitmen tinggi dari pemerintah untuk mendukung Revitalisasi Pertanian.

41. Evaluasi kinerja sektor Pertanian selama periode tahun 2005-2006 akan lebih obyektif bila dilaksanakan dengan memperhatikan gejala eksternal luar biasa yaitu meroketnya harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga termasuk biaya produksi yang akan mengurangi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi. Demikian pula halnya dengan tantangan bencana alam yang bertubi-tubi merupakan catatan tersendiri yang perlu diperhitungkan dalam menilai kinerja pertanian dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dalam kondisi sulit yang demikian, Departemen Pertanian ternyata mampu mengantarkan sektor pertanian menuju pertumbuhan tinggi berkelanjutan (sustaining growth).

42. Agenda jangka menengah-pendek (sekitar tiga tahun ke depan) yang perlu segera kita rumuskan ialah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang cukup menggembirakan tersebut. Disadari, potensi pertumbuhan yang ada saat ini sudah hampir termanfaatkan secara optimal. Setidaknya lima upaya yang harus dan segera dilakukan agar momentum pertumbuhan tinggi berkelanjutan sektor Pertanian dapat terus dipertahankan yaitu : (a) pengembangan kelembagaan agribisnis (Gapoktan, tata pemerintahan, organisasi pengusaha dan jejaring usaha), (b) merenovasi dan memperluas infrastruktur fisik (hard infrastructure), utamanya sistem irigasi, sistem transportasi, sistem telekomunikasi dan kelistrikan pedesaan; (c) revitalisasi sistem inovasi pertanian (penelitian dan pengembangan, diseminasi teknologi pertanian); (d) rekonstruksi sistem insentif berproduksi dan investasi; (e) pengelolaan pasar input dan output. Semua ini akan dirancang secara komprehensif dan terpadu.

43. Akhirnya, kinerja sektor Pertanian tidaklah semata-mata cermin kinerja Departemen Pertanian. Kinerja sektor Pertanian justru lebih banyak ditentukan oleh pihak-pihak di luar Departemen Pertanian. Oleh karena itu, walaupun ada perbaikan dalam kinerja sektor Pertanian, penghargaan terbesar adalah bagi mereka yang telah berjasa besar, yang pasti bukanlah jajaran Departemen Pertanian. Namun, segala kekurangan yang ada, apapun itu, pasti jajaran Departemen Pertanian turut memikul tanggung jawab.

**KINERJA PEMBANGUNAN
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006**

BAB I
PENDAHULUAN





Gambar 1.1 Menibai sawah



Evaluasi kinerja sektor pertanian, khususnya pada periode Oktober 2005 sampai Desember 2006 perlu dilakukan karena perubahan lingkungan eksternal yang terjadi cukup besar, terutama meningkatnya harga BBM. Kenaikan BBM ini memicu kenaikan harga-harga barang dan jasa lain, termasuk biaya produksi pertanian. Pada gilirannya, ini akan mengurangi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah juga merupakan faktor eksternal yang perlu diperhitungkan, yang akan sangat mempengaruhi kinerja pertanian dan perekonomian Indonesia.

Evaluasi kinerja sektor pertanian merupakan kegiatan yang rutin dilakukan sebagai upaya untuk memahami kemajuan serta permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut. Bersamaan dengan itu, evaluasi ini juga diharapkan memberikan analisa yang cukup untuk membuat perbaikan di masa mendatang.

Secara umum dapat disampaikan bahwa setahun terakhir ini, sektor pertanian sedang berada pada tahap menuju pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan (*sustaining growth*). Hal ini diindikasikan setidaknya oleh tiga hal yaitu peningkatan PDB sektor pertanian, tingginya rencana dan realisasi investasi di sektor pertanian, serta peningkatan nilai ekspor komoditas hasil-hasil pertanian.

Materi evaluasi ini disusun atas beberapa permasalahan pokok yang berada dalam konteks pembangunan pertanian, yaitu kinerja PDB sektor pertanian, perkembangan dan permasalahan investasi, produksi dan produktifitas berbagai komoditas pertanian, kesempatan kerja dan neraca perdagangan luar negeri, kesejahteraan rumah tangga petani, perkembangan program Departemen Pertanian mendukung pertumbuhan sektor pertanian, rencana kerja dan anggaran tahun 2007 serta hasil pemeriksaan keuangan dalam tubuh Departemen Pertanian.



BAB II

PRODUK DOMESTIK BRUTO



Pada tahun 2006, PDB sektor pertanian telah tumbuh dengan sangat mengesankan, yaitu mencapai 3,50 persen dibandingkan dengan tahun 2005 (angka PDB sampai dengan semester III). Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang tinggi setelah masa pemulihan krisis ekonomi. Semua subsektor pertanian bangkit mengalami pertumbuhan yang merata dan sangat tinggi dibanding tahun sebelumnya, yaitu Tanaman Pangan (2,89%), Perkebunan (5,12%) dan Peternakan (3,99%). Ini merupakan bukti bahwa sektor pertanian sedang menuju pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan (*sustaining growth*) setelah sejak tahun 2003 telah berada pada fase percepatan pertumbuhan (*accelerating growth*).

Pertumbuhan PDB sub sektor Tanaman Pangan dipicu oleh kenaikan produksi padi, pertumbuhan PDB sub sektor perkebunan didorong peningkatan ekspor karena terjadinya perbaikan harga dunia komoditas perkebunan, dan pertumbuhan PDB sub sektor peternakan disebabkan tarikan permintaan konsumsi daging ayam yang mengindikasikan pulihnya konsumen daging ayam akibat keberhasilan pemerintah dalam kampanye penyadaran kepada masyarakat bahwa unggas yang dimasak pada suhu tertentu tidak menyebabkan konsumen terserang penyakit flu burung. Masyarakat pun belajar dari kenyataan bahwa ternyata apa yang disampaikan pemerintah benar adanya. Serangan flu burung pada unggas pun terlihat cenderung menurun. Pertumbuhan PDB sektor pertanian yang terjadi di semua sub sektor tersebut memperlihatkan bahwa koordinasi internal Departemen Pertanian dan koordinasi eksternal dengan Pemerintah Daerah cukup padu.

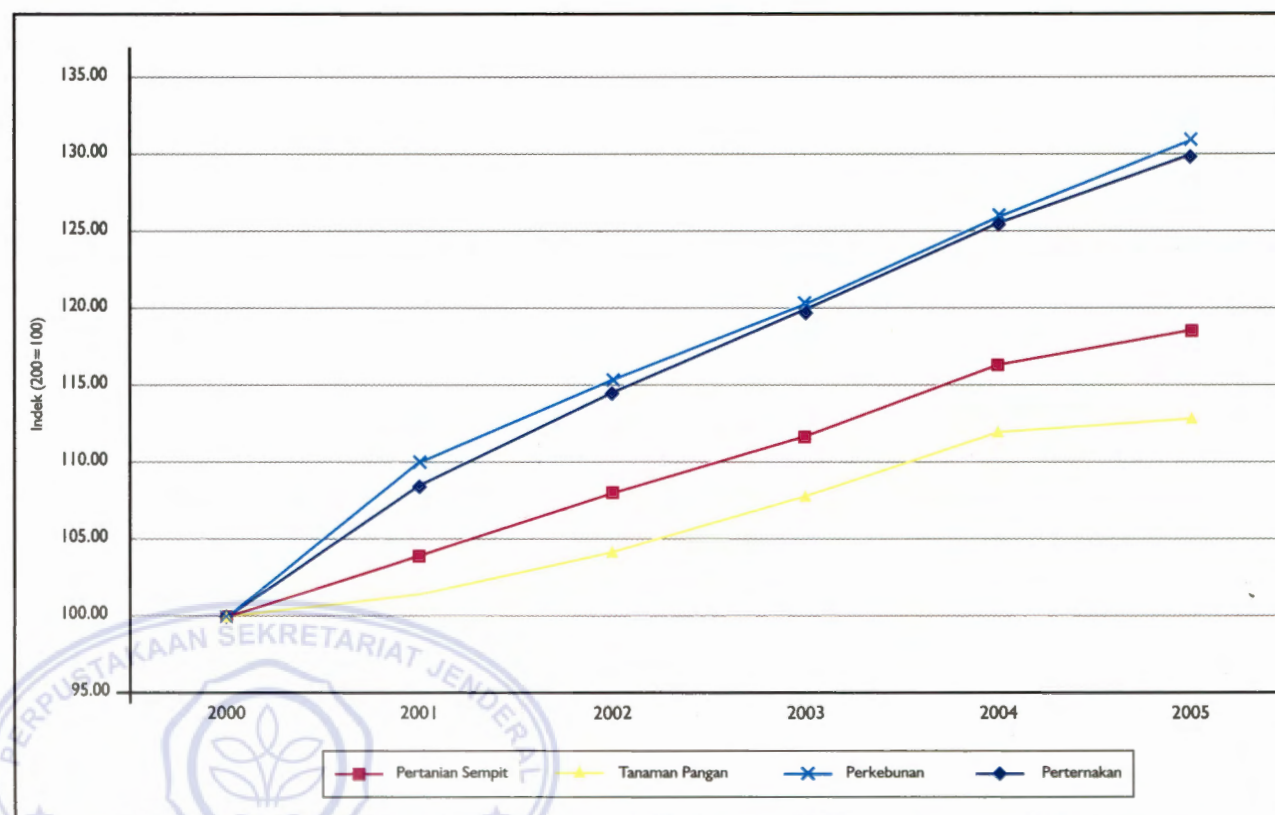
Jika dibandingkan periode yang sama tahun 2005, tampak bahwa peningkatan nilai PDB adalah tumbuh minus 0,69 % berbanding 5,85 %, dengan perubahan positif 5,23 persen (Tabel 2.1). (Sebagai pembandingan, indeks PDB sektor pertanian selama periode 2002-2005 ditunjukkan pada Gambar 2.1). Tampak dari gambar tersebut, bahwa walaupun dalam kondisi sulit, indeks PDB sektor pertanian masih tumbuh secara konsisten selama periode 2000-2005.



Tabel 2.1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian, 2002-2006.

SEKTOR	Pertumbuhan (%)						Perubahan (%)
	2002	2003	2004	2005	s/d Triwu III (%)		
					2005	2006	
I. PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN	3,23	3,18	3,26	2,49	1,63	3,41	1,74
1). Pertanian (Pangan, Kebun dan Ternak)	3,57	3,63	2,83	2,55	1,67	3,50	1,83
a. Tanaman Bahan Makanan	2,57	2,79	2,89	2,57	2,06	2,89	0,83
b. Tanaman Perkebunan	4,99	5,76	2,21	2,23	0,45	5,12	6,66
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	5,85	4,26	3,35	2,87	1,57	3,99	4,42
2) Kehutanan	2,14	-4,3	0,7	-2,03	-3,98	-1,78	2,20
3) Perikanan	1,98	4,79	6,89	4,27	4,47	5,23	0,77
PRODUK DOMESTIK BRUTO	4,38	4,72	5,05	5,60	5,85	5,23	-0,69

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2006.



Gambar 2.1. Indeks PDB Sektor Pertanian Harga Konstan 2000, 2000 – 2005.



**KINERJA PEMBANGUNAN
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006**

BAB III
INVESTASI



3.1. IDENTIFIKASI HAMBATAN INVESTASI

Sampai saat ini, iklim investasi/usaha di Indonesia cenderung kurang kondusif. Hal ini terjadi terutama sejak terjadinya krisis ekonomi dan pemberlakuan otonomi daerah. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi, perizinan usaha, serta regulasi ketenagakerjaan. Selengkapnya, permasalahan/hambatan yang teridentifikasi meliputi aspek – aspek berikut yaitu:

- a. Ekonomi makro (nilai tukar rupiah yang tidak stabil, suku bunga bank tinggi, dan kenaikan BBM/TDL);
- b. Sosial politik (stabilitas dan dinamika politik dalam negeri, transformasi nilai masyarakat, anarkhisme unjuk rasa masyarakat/buruh);
- c. Pajak/retribusi (pengenaan PPN terhadap komoditas pertanian pada setiap transaksi, banyaknya Perda tentang pajak/retribusi/pungutan, banyaknya pungutan masyarakat, LSM, dll);
- d. Infrastruktur (kurangnya infrastruktur pendukung di daerah pengembangan Investasi, infrastruktur yang ada kondisinya masih memperhatikan);
- e. Ketenagakerjaan (upah tenaga kerja semakin tinggi, unjuk rasa pekerja sering anarkhis); Birokrasi dan aparatnya (kurangnya profesional, korupsi, kurang disiplin, birokrasi panjang dan kurang transparan, dan kurang simpatik dalam pelayanan);
- f. Sumber pendanaan (belum ada sumber pendanaan khusus untuk usaha pertanian, aksesibilitas pelaku terhadap sumber pendanaan kurang, persayatan dan prosedur memberatkan UKM, suku bunga kredit tinggi);
- g. Promosi (promosi peluang investasi masih sangat kurang).

3.2. PELAYANAN KONSULTANSI INVESTASI

Sampai dengan bulan Agustus 2006 telah difasilitasi 6 calon investor asing atau status investasi PMA yang berminat menginvestasikan modalnya di Indonesia. Informasi ke enam calon investor dan perkembangannya dijabarkan pada Tabel 3.1.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman analisa kelayakan usaha agribisnis baik untuk aparat/instansi pusat maupun daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan berupa informasi kelayakan usaha khususnya untuk pengembangan agribisnis/agroindustri, telah dilaksanakan Pelatihan Kelayakan Investasi Agribisnis yang diikuti sekitar 50 peserta dari pusat maupun daerah.



Tabel 3.1. Perkembangan Pemohon Investasi Sektor Pertanian Tahun 2006

No.	Perusahaan dan Negara Asal Calon Investor	Bidang Usaha Yang dimiliki	Lokasi	Masalah dan Kendala
1.	Krebs Biochemical & Industries Ltd Negara India	Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula	Kab. Merauke Prop. Papua	Pihak Krebs meminta 11 point insentif yang belum dipenuhi oleh pemerintah Indonesia, karena permintaannya terkait dengan kewenangan instansi lain diluar Deptan, maka masalah ini telah dilimpahkan ke Menko Ekuin untuk menindaklanjutinya. Pihak Krebs telah menandatangani nota kesepakatan dengan pemerintah Kab. Merauke.
2.	Intertrade Service & PT. Skygen Agri- System Amerika Serikat	Perkebunan Kelapa Sawit dan Jarak Pagar dengan Pabrik Pengolah Biofuel	Kab. Pokuwatu Prop. Gorontalo	Pelepasan lahan kawasan hutan yang masih diproses Departemen Kehutanan.
3.	PT. AGB Energy Korea Selatan	Perkebunan jarak pagar	Kab. Halmahera Utara Prop. Maluku Utara	Telah menandatangani nota kesepakatan dengan pemerintah propinsi Maluku Utara, tetapi masih belum direstui oleh Depdagri.
4.	PT. RYA Mesir Andalas Makmur	Budidaya cassava (ubi kayu) dan industrinya.	Kab. Ogan Komiring Ulu, Sumsel	Ijin lokasi sedang dalam proses dan perlu bantuan permodalan.
5.	Angeline Suparto Konsultan Indonesia	Budidaya jagung dan industrinya	Propinsi Sumatera Utara	Konsultasi rencana investasi jagung melalui PMA.
6.	Hasrat Takrin Holdings Sdn Bhd Negara Malaysia	Investor Malaysia berkeinginan mengimpor sapi Bali 1.000 – 1.000 ekor berkeinginan berinvestasi pada peternak terpadu sapi Bali di Indonesia. Investor berkeinginan mengimpor bibit sapi kuning dari China yang dapat menjadi alternatif sumber bibit sapi ternak terpadu sebagai alternatif sumber bibit dari Australia.	Kab. Dompu Prop. Nusa Tenggara Barat	Mempersiapkan proposal dan design pengembangan peternakan terpadu secara kongkrit.

3.3. PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Investasi di sektor pertanian selama periode 2005-2006 mengalami pertumbuhan yang cepat. Persetujuan investasi PMDN dan PMA pada tahun 2005 masing-masing meningkat 9 dan 15 persen dibanding tahun 2004, dan sampai dengan bulan Agustus 2006 persetujuan investasi PMDN dan PMA meningkat lagi masing-masing 30,6 dan 9,1 persen. Bukan hanya nilai persetujuan investasi yang meningkat, namun jumlah proyek yang disetujui juga meningkat. Pada tahun 2005 jumlah proyek investasi PMDN dan PMA yang disetujui meningkat masing-masing 9 dan 41 persen dibanding tahun 2004, dan sampai bulan Agustus 2006 jumlah proyek investasi PMDN dan PMA yang disetujui juga meningkat masing-masing 38,64 dan 87,63 persen. Dibanding sektor perikanan dan kehutanan, nilai investasi di sektor pertanian jauh lebih besar.

Fakta ini membuktikan bahwa kebijakan Departemen Pertanian mampu menciptakan kondisi yang kondusif untuk investasi di sektor pertanian, sekaligus menjadi argumentasi mengapa pertumbuhan PDB sektor pertanian sampai dengan semester III demikian tinggi yaitu 3,50 persen.

Rincian lebih detail dapat disampaikan, bahwa persetujuan rencana investasi PMDN untuk sektor pertanian periode 1 Januari s/d 31 Agustus 2006 sebanyak 30 proyek dengan total nilai investasi Rp 17.207,4 milyar. Pada tabel 3.2. terlihat, rencana investasi tersebut didominasi industri makanan sebesar 61,01 % serta tanaman pangan dan perkebunan sebesar 36,06 %. Kontribusi sektor pertanian terhadap total rencana investasi nasional adalah sebesar 17,80 %.

Sementara itu, realisasi untuk izin usaha tetap dalam rangka PMDN periode 1 Januari – 31 Agustus 2006 bernilai total sebesar Rp 3.710,70 milyar (28 proyek). Rinciannya adalah pada industri makanan Rp. 2.111,70 milyar (13 proyek), Tanaman Pangan dan Perkebunan Rp. 1.509,9M (8 proyek) dan peternakan Rp 89,00 milyar (89 proyek). Jumlah realisasi tersebut meliputi persetujuan rencana investasi baru, perluasan maupun alih status.

Selanjutnya, khusus untuk PMA, persetujuan rencana investasi untuk sektor pertanian periode 1 Januari s/d 30 Agustus 2006 sebanyak 64 proyek dengan total nilai investasi sebesar US\$ 1.205,7 juta (Tabel 3.3.). Rencana investasi tersebut didominasi industri makanan sebesar 59,96% dan tanaman pangan dan perkebunan 37,82%. Kontribusi sektor pertanian terhadap total rencana investasi nasional adalah sebesar 13,9 %.

Sedangkan realisasi untuk izin usaha tetap dalam rangka PMA periode 1 Januari – 31 Agustus 2006 sebanyak 64 proyek bernilai total investasi sebesar US\$ 1.205,70 juta (tabel 3.3). Rencana investasi tersebut didominasi industri makanan sebesar 59,96 %, tanaman pangan dan perkebunan 37,82 %. Kontribusi sektor pertanian terhadap total rencana investasi nasional sebesar 13,9 %.

Sedangkan realisasi untuk izin usaha tetap dalam rangka PMA periode Januari - 31 Agustus 2006 dengan Nilai investasi sebesar US \$ 206,9 juta (38 proyek). Realisasi investasi yang menonjol adalah tanaman pangan dan perkebunan 53,54 %, industri makanan 43,91 % dan sisanya peternakan. Jumlah realisasi tersebut meliputi persetujuan rencana investasi baru, perluasan dan alih status.

Gambar 3.1 Kegiatan Sektor Pertanian I

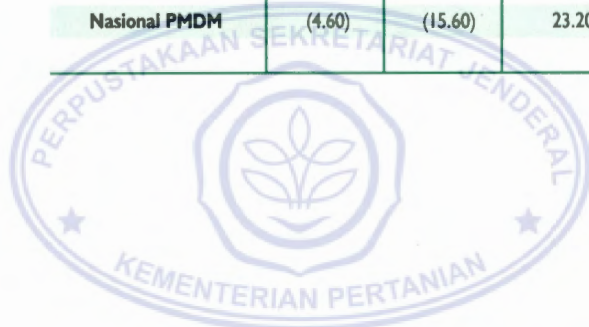


Tabel. 3.2. Persetujuan Investasi PMDN di Sektor Pertanian

SEKTOR	2004			2005			2006*)		
	Proyek (Jumlah)	Investasi (US \$ juta)	Tenaga Kerja	Proyek (Jumlah)	Investasi (US \$ juta)	Tenaga Kerja	Proyek (Jumlah)	Investasi (US \$ juta)	Tenaga Kerja
Tanaman Pangan & Perkebunan	4.0	507.4	4,260.0	19.0	3,070.6	30,962.0	8.0	1,509.7	13,340.0
Peternakan	3.0	19.6	96.0	3.0	108.3	196.0	7.0	89.0	352.0
Industri Makanan	28.0	3,507.9	60,615.0	35.0	4,490.8	23,863.0	13.0	2,111.7	6,575.0
Pertanian PMDM	35.0	4,034.9	64,971.0	57.0	7,669.7	55,021.0	28.0	3,710.4	20,267.0
Nasional PMDM	129.0	15,264.7	61,858.0	214.0	30,665.0	122,750.0	113.0	11,821.3	44,499.0
Pertanian Terhadap Nasional (%)	27.1	26.4	105.0	26.6	25.0	44.8	24.8	31.4	45.5
Pertumbuhan (%)									
Tanaman Pangan & Perkebunan	300.0	554.7	(13.6)	375.0	505.2	626.8			
Peternakan	-	(34.4)	(75.1)	-	452.6	104.2			
Industri Makanan	21.7	5.6	266.2	25.0	28.0	(60.6)			
Pertanian PMDM	29.6	17.6	197.1	62.9	90.1	(15.3)			
Nasional PMDM	8.4	28.4	25.7	65.9	100.9	98.4			

Tabel. 3.3. Perkembangan Realisasi Investasi PMA Di Sektor Pertanian (Periode Januari 2004 s/d Agustus 2006)

SEKTOR	2004			2005			2006*)		
	Proyek (Jumlah)	Investasi (US \$ juta)	Tenaga Kerja	Proyek (Jumlah)	Investasi (US \$ juta)	Tenaga Kerja	Proyek (Jumlah)	Investasi (US \$ juta)	Tenaga Kerja
Tanaman Pangan & Perkebunan	4.0	161.0	7,138.0	17.0	171.5	16,876.0	7.0	252.3	16,313.0
Peternakan	6.0	20.2	1,185.0	3.0	52.8	711.0	3.0	12.0	2,877.0
Industri Makanan	29.0	574.3	17,759.0	46.0	598.8	13,092.0	28.0	209.9	9,407.0
Pertanian PMDM	39.0	755.5	26,082.0	66.0	823.1	30,679.0	38.0	471.2	28,597.0
Nasional PMDM	544.0	4,601.1	144,440.0	909.0	8,914.6	30,697.0	518.0	3,562.0	165,909.0
Pertanian Terhadap Nasional (%)	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
Tanaman Pangan & Perkebunan	(50.00)	(26.60)	(56.50)	325.00	6.50	136.40			
Peternakan	500.00	1,736.40	4,640.00	(50.00)	161.40	(40.00)			
Industri Makanan	7.40	79.90	129.70	58.60	4.30	(26.30)			
Pertanian PMDM	8.30	40.00	8.00	69.20	8.90	17.60			
Nasional PMDM	(4.60)	(15.60)	23.20	67.10	93.70	8.10			



3.4. PENYELESAIAN PRODUK HUKUM DAN PERIZINAN

Pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis telah merealisasikan beberapa kegiatan. Konsep Sistem Pelayanan Satu pintu " One Stop Services " Perizinan Pertanian telah digulirkan dengan tujuan untuk mewujudkan pelayanan prima untuk mendorong pelaku usaha pertanian, agar tercipta iklim usaha yang kondusif, dan meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti.

Untuk mendukung terlaksananya dengan penuh sistim One Stop Services sedang dan sudah dilakukan revisi peraturan Menteri Pertanian, di bidang perizinan antara lain berupa:

- (1) Kepmentan No. 324/Kpts/TN.120/4/94 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan,
- (2) Kepmentan No. 455/Kpts/TN.260/9/2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian No. 695/Kpts/TN.260/8/96 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan,
- (3) Kepmentan No. 1017/Kpts/TP.120/12/1998 tentang Izin Benih Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina,
- (4) Kepmentan No. 242/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan,
- (5) Kepmentan No. 83/Kpts/TN.120/DJP/Deptan/1999 tentang Izin Pemasukan Bibit Ternak,
- (6) Kepmentan Nomor 411/Kpts/TP.120/6/95 Tentang Pemasukan Agen Hayati Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia,
- (7) Kepmentan Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-organik,
- (8) Kepmentan Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida,
- (9) Kepmentan Nomor 205/ Kpts/ OT.210/3/2003 Tentang Syarat dan Tatacara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman,
- (10) Kepmentan Nomor 357/Kpts/HK.356/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,

- (11) Kepmentan Nomor 339/Kpts/KP.150/6/2001 Tentang Susunan Keanggotaan Komisi Obat Hewan,
- (12) Kepmentan Nomor 371/Kpts/OT.160/10/2005 Tentang Komisi Pakan Ternak.
- (13) Kepmen 38/Kpts/HK.OT/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman,
- (14) Kepmen N0.745/Kpts/TN.240/12/1992 Tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari luar negeri.
- (15) Permen tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman.

Peraturan Menteri Pertanian di bidang perizinan yang telah selesai direvisi antara lain: Permentan No. 342/Kpts/OT.160/9/2005 tentang Komisi Pestisida, Permentan No. 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pendaftaran Pupuk Organik dan Pembenh Tanah, Permentan tentang Pemasukan dan pengeluaran Benih dan Bibit , Revisi Permentan tentang Pemasukan dan Pengawasan Karkas, Daging dan Jeroan ke Wilayah RI.,

Sejak bulan Oktober 2005 s/d Desember 2006 permohonan izin/rekomendasi dibidang pertanian yang telah difasilitasi oleh Pusat Perizinan dan Investasi sebagai berikut :

Tabel 3. 4. Jumlah Pendaftaran Perizinan Pestisida dan Pupuk

No	JENIS	JUMLAH PENDAFTARAN		
		Ulang	Baru	Total
I	PESTISIDA	-	-	340
1	IZIN PERCOBAAN	23	53	76
2	IZIN SEMENTARA	368	362	730
3	IZIN TETAP	-	-	127
4	IZIN PERLUASAN	9	24	33
5	IZIN EKSPOR	28	42	70
6	IZIN BAHAN TEKNIS			
II	PUPUK	TOTAL		
1	PUPUK AN-ORGANIK		229	
2	PUPUK ORGANIK		46	
3	PEMBENAH TANAH		24	
4	PUPUK HAYATI		9	

Tabel 3.5. Realisasi Permohonan Izin Rekomendasi Teknis Bidang Usaha

No	Jenis Permohonan Izin/ Rekomendasi	Status Permohonan
1	Rekomendasi Impor Raw Sugar	dalam proses
2	Rekomendasi Impor Mesin Pabrik Gula	disetujui
3	Rekomendasi Perluasan Lahan Perkebunan	disetujui
4	Rekomendasi Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Perkebunan (PMDN) ke PMA	1 disetujui, 6 dalam proses
5	Izin Impor Daging dari Kanada	tidak disetujui
6	Izin Impor Daging dari Argentina	tidak disetujui
7	Rekomendasi Pengaturan Tata niaga Impor Bawang Putih	tidak disetujui
TOTAL :		

Permasalahan perizinan di bidang usaha perkebunan, khususnya perubahan kepemilikan saham perusahaan perkebunan (PMDN) menjadi PMA terkendala karena tidak lengkapnya dokumen permohonan izin/rekomendasi, diantaranya adalah belum adanya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemerintah Daerah serta tidak dipenuhinya persyaratan luasan lahan yang telah dipersyaratkan berdasarkan Kepmentan No. 357/Kpts/KH.350/5/2002. Sementara untuk impor raw sugar oleh PG. Cepiring masih terkendala oleh belum selesainya penyiapan lahan untuk penanaman tebu.

Sedangkan permasalahan perizinan di bidang produk ternak yaitu kebijakan pemerintah yang menerapkan sistem "Country Based" terkait persyaratan Bebas Penyakit Hewan Menular Utama seperti FMD dan BSE. Negara yang memenuhi syarat untuk ekspor daging ke Indonesia hanya terbatas dari dua negara saja yaitu New Zealand dan Australia, karena kedua negara ini bebas dari penyakit BSE dan FMD. Sementara Kanada masih belum bebas dari penyakit BSE dan Argentina masih belum bebas dari penyakit FMD. Terkait dengan produk pangan yaitu permohonan pengaturan tata niaga impor bawang putih dari RRC, instansi pemerintah

terkait masih memandang hal tersebut tidak perlu, mengingat bawang putih bukan merupakan komoditi strategis yang harus diatur tataniaganya.

Sosialisasi tentang sistem perizinan di Departemen Pertanian dan evaluasi pelaksanaan importasi benih dan produsen benih dalam negeri telah dilaksanakan pada instansi terkait di Propinsi Sumatera Utara dan Bali. Departemen Pertanian c.q. Pusat Perizinan tampaknya perlu membentuk program data dan informasi tentang ketersediaan benih dalam negeri, serta realisasi impor dan ekspor produk dan sarana dan produk pertanian. Kegiatan yang dilakukan antara lain: (a) Melaksanakan koordinasi kerjasama internasional dan regional, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kerjasama internasional dan regional untuk sektor pertanian, dan berpartisipasi aktif menghadiri forum kerjasama/sidang/promosi/pameran internasional yang terkait dengan sektor pertanian; serta (b) Penyusunan Draft Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SK Mentan Tentang Perizinan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan petunjuk pelaksanaan Permentan tentang izin pemasukan dan pengeluaran sarana produksi, dan tertatanya prosedur perizinan dibidang pertanian sebagai pedoman bagi pelaksana pemberi izin dan pedoman bagi pemohon izin. Dengan terbitnya Juklak ini akan memudahkan pelaksanaan pelayanan perizinan di bidang pertanian. Serta tersedia Stándar Prosedur Operasi (SPO) Pelayanan perizinan di Bidang Pertanian.

Gambar 3.2 Kegiatan Sektor Pertanian 2





**KINERJA PEMBANGUNAN
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006**

BAB IV
**PRODUKSI
KOMODITAS**



4.1. PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS TANAMAN PANGAN

4.1.1. Padi

Produksi padi tahun 2006 berdasarkan angka ramalan (ARAM) III berjumlah 54.663.594 ton GKG, naik sebanyak 512.497 ton (0,95 %) dibandingkan produksi tahun 2005 yang berjumlah 54.151.097 ton (ATAP). Peningkatan produksi ini akibat peningkatan luas panen 2006 seluas 15.851 ha (0,13 %) dan peningkatan produktivitas 0,37 ku/ha (0,81 %).

4.1.2. Jagung

Produksi jagung tahun 2006 berjumlah 12.136.798 ton, turun sebanyak 387.096 ton (3,09 %) dibandingkan dengan produksi tahun 2004 yang berjumlah 12.523.894 ton. Penurunan produksi ini akibat turunnya luas panen seluas 128.342 ha (3,54 %) dibandingkan luas panen tahun 2004. Walaupun produktivitas jagung tahun 2006 naik 0,16 ku/ha (0,47 %) dibandingkan produktivitas tahun 2004 ternyata tidak bisa mengimbangi penurunan luas panen. Akibatnya produksi tahun 2006 turun dibandingkan produksi tahun 2005.



Gambar 4.1.1. Padi

Gambar 4.1.2. Jagung QPM



4.1.3. Kedelai

Produksi kedelai tahun 2006 berjumlah 780.880 ton, turun sebanyak 27.174 ton (3,36 %) dibandingkan produksi tahun 2005 yang berjumlah 808.054 ton. Penurunan ini akibat penurunan luas panen dan produktivitas.

4.1.4. Kacang Tanah

Produksi Kacang tanah tahun 2006 berjumlah 839.970 ton, naik sebanyak 3.675 ton (0,44 %) dibandingkan dengan produksi tahun 2005 yang berjumlah 836.295 ton. Peningkatan produksi ini didukung oleh peningkatan produktivitas, walaupun luas panen kacang tanah tahun 2006 turun dibandingkan 2005.

4.1.5. Kacang Hijau

Produksi kacang hijau tahun 2006 berjumlah 334.200 ton, naik sebanyak 13.237 ton (4,14 %) dibandingkan produksi tahun 2005 yang berjumlah 320.963 ton. Peningkatan produksi ini akibat adanya peningkatan luas panen dan produktivitas kacang hijau tahun 2006 dibandingkan tahun 2005.

Gambar 4.1.4. Kacang Tanah - Kancil



Gambar 4.1.3. Kacang Kedelai - Mahameru



Gambar 4.1.6. Ubi Kayu - Malang 1

4.1.6. Ubi Kayu

Produksi ubi kayu tahun 2006 berjumlah 19.907.304 ton, naik sebanyak 586.121 ton (3,03 %) dibandingkan dengan produksi tahun 2005 yang berjumlah 19.321.183 ton. Peningkatan ini akibat adanya peningkatan luas panen dan produktivitas dari ubi kayu.

4.1.7. Ubi Jalar

Produksi ubi jalar tahun 2006 berjumlah 1.805.431 ton, turun sebanyak 51.538 ton (2,78 %) dibandingkan produksi tahun 2005 yang berjumlah 1.856.969 ton. Penurunan ini akibat luas panen dan produktivitas tahun 2005 dari ubi jalar. Selengkapannya perkembangan luas panen, produktivitas, dan produksi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel. 4.1.



Gambar 4.1.6. Ubi Jalar - Boko

Gambar 4.1.3. Kacang Hijau - Sriti

Tabel 4.1. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan 2004 - 2006

Komoditas		ATAP	ATAP	ARAM III	ATAP 2005		ARAM III 2006	
					Terhadap		Terhadap	
	2004	2005	2006		ATAP 2004		ATAP 2005	
					absolut	%	Absolut	%
Luas Panen (Ha)								
1	Padi	11,922,974	11,839,060	11,854,911	-83,914	-0.70	15,851	0.13
2	Jagung	3,356,914	3,625,987	3,497,645	269,073	8.02	-128,342	-3.54
3	Kedelai	565,155	621,335	602,567	56,180	9.94	-18,768	-3.02
4	Kacang Tanah	723,434	720,526	707,866	-2,908	-0.40	-12,660	-1.76
5	Kacang Hijau	311,863	318,337	325,726	6,474	2.08	7,389	2.32
6	Ubi Kayu	1,255,805	1,213,460	1,219,575	-42,345	-3.37	6,115	0.50
7	Ubi Jalar	184,546	178,336	173,007	-6,210	-3.37	-5,329	-2.99
Produktivitas (Ku/Ha)								
1	Padi	45.36	45.74	46.11	0.37	0.83	0.37	0.81
2	Jagung	33.44	34.54	34.70	1.10	3.29	0.16	0.47
3	Kedelai	12.80	13.01	12.96	0.20	1.59	-0.05	-0.35
4	Kacang Tanah	11.58	11.61	11.87	0.03	0.26	0.26	2.24
5	Kacang Hijau	9.95	10.08	10.26	0.13	1.30	0.18	1.76
6	Ubi Kayu	154.68	159.22	163.23	4.54	2.94	4.01	2.52
7	Ubi Jalar	103.05	104.13	104.36	1.07	1.04	0.23	0.22
Produksi (Ton)								
1	Padi	54,088,468	54,151,097	54,663,594	62,629	0.12	512,497	0.95
2	Jagung	11,225,243	12,523,894	12,136,798	1,298,651	11.57	-387,096	-3.09
3	Kedelai	723,483	808,054	780,880	84,571	11.69	-27,174	-3.36
4	Kacang Tanah	837,495	836,295	839,970	-1,200	-0.14	3,675	0.44
5	Kacang Hijau	310,412	320,963	334,200	10,551	3.40	13,237	4.12
6	Ubi Kayu	19,424,707	19,321,183	19,907,304	-103,524	-0.53	586,121	3.03
7	Ubi Jalar	1,901,802	1,856,969	1,805,431	-44,833	-2.36	-51,538	-2.78

Bila dibandingkan dengan sasaran produksi tahun 2005 dan 2006, pencapaian produksi tanaman pangan adalah sebagai berikut : Dalam tahun 2005 empat (4) komoditas yaitu jagung, kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu telah mencapai sasaran. Sementara dalam tahun 2006 belum ada yang telah mencapai sasaran. Perbandingan antara pencapaian produksi dengan sasaran produksi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Pencapaian dan Sasaran Produksi Tanaman Pangan Tahun 2005 -2006

No	Komoditas	Tahun 2005			Tahun 2006		
		ATAP (Jt Ton)	Sasaran (Jt Ton)	(%)	ARAM III (Jt Ton)	Sasaran (Jt Ton)	(%)
1	Padi	53.151	54.25	97.97	54.664	54.860	99.64
2	Jagung	12.524	12.41	100.92	12.137	12.445	97.52
3	Kedelai	0.808	0.81	99.75	0.781	0.828	94.31
4	Kc. Tanah	0.836	0.83	100.72	0.840	0.897	93.64
5	Kc. Hijau	0.320	0.32	100.00	0.334	0.353	94.67
6	Ubikayu	19.321	19.23	100.47	19.907	20.100	99.04
7	Ubijalar	1.857	1.86	99.84	1.805	1.950	92.59

4.2. PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS HORTIKULTURA

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ditempuh melalui peningkatan penerapan teknologi maju, penyediaan sarana dan prasarana produksi. Kegiatannya berupa bimbingan penerapan norma budidaya yang baik (Good Agriculture Practices=GAP) dan Prosedur Operasional Standar (POS) budidaya spesifik lokasi, penggunaan benih bermutu, penanggulangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) hortikultura, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi serta penanganan panen dan pasca panen.

Ketersediaan buah-buahan perkapita meningkat 18,11% dari 54 kg/kapita/th pada tahun 2004 menjadi 63,78 kg/kapita/th pada tahun 2005. Ketersediaan per kapita sayuran nasional meningkat 13,64% dari 33 kg/kapita/th pada tahun 2004 menjadi 37,50 kg/kapita/th pada tahun 2005. Peningkatan ketersediaan ini sangat berkaitan dengan upaya peningkatan produksi dan kualitas produk yang telah dilakukan selama ini.

Produksi buah-buahan periode 2004-2005 mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 produksi buah-buahan mencapai 14.348.456 ton (angka tetap 2004) dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 14.786.599 ton (angka tetap 2005). Peningkatan produksi buah tahun 2005 mencapai 3,05% dibandingkan tahun 2004. Pada tahun 2006 diperkirakan naik menjadi 16.168.000 ton (angka sasaran 2006) atau naik 9,34%. Kenaikan terutama diperoleh dari buah jeruk, mangga, salak, nenas, pepaya dan markisa.

Selama tahun 2005 - 2006 telah dilakukan berbagai kegiatan di pusat dan daerah dalam rangka pengembangan agribisnis buah-buahan, antara lain : bimbingan peningkatan produksi dan mutu buah-buahan (pisang, pepaya, nenas, jeruk, salak, belimbing melon, semangka, anggur, manggis durian dan mangga), bimbingan pengembangan buah-buahan di DAS, pengenalan penerapan GAP, pembinaan/bimbingan umum penerapan teknologi maju dan bimbingan pengembangan kelembagaan serta promosi. Pengembangan buah-buahan di daerah melalui dukungan dana APBN (dekonsentrasi) TA. 2005 - 2006 diprioritaskan untuk 5 komoditas, yaitu jeruk, pisang, mangga, manggis dan durian. Di lain pihak, luas panen buah-buahan periode 2004-2005 mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 luas panen buah-buahan mencapai 707.119 ha dan pada tahun 2005 meningkat 1,46% menjadi 717.428 ha.

Berdasarkan angka tetap 2005, produktivitas buah-buahan yang diprioritaskan pada 5 komoditas, yaitu jeruk, pisang, mangga, manggis dan durian menunjukkan hasil yang fluktuatif dan cenderung meningkat, seperti komoditas jeruk siam produktivitasnya meningkat menjadi 34,36 ton/ha pada tahun 2005 dibanding tahun 2004 sebesar 30,19 ton/ha, jeruk besar produktivitasnya cenderung tetap dimana pada tahun 2004 sebesar 12,24 ton/ha dan tahun 2005 sebesar 12,03 ton/ha, produktivitas pisang pada tahun 2005 sebesar 51,03 ton/ha cenderung tetap dibanding tahun 2004 sebesar 51,08 ton/ha, produktivitas mangga tahun 2005 meningkat 3,7% dibanding tahun 2004 yaitu dari 8,03 ton/ha menjadi sebesar 7,74 ton/ha, produktivitas manggis tahun 2005 turun (-3,1%) dibanding tahun 2004 yaitu dari 7,33 ton/ha menjadi sebesar 7,10 ton/ha dan produktivitas durian tahun 2005 turun (-11,2%) dibanding tahun 2004 yaitu dari 14,00 ton/ha menjadi sebesar 12,43 ton/ha.

Tabel 4.3. Produksi Hortikultura Tahun 2004-2005

No	Komoditas	Tahun			% Kenaikan / Penurunan	
		2004	2005	2006	2004-2005	2005-2006
1	Buah-buahan (Ton)	14.348.456	14.786.599	16.168.000*)	3,05	9,34
2	Sayuran (Ton)	9.059.676	9.101.987	9.700.000 *)	0,47	6,57
3	Biofarmaka (kg)	231.719.119	342.388.877	349.746.621**)	47,76	2,15
4	Tanaman Hias (tangkai)	158.522.843	173.240.364	184.208.096 **)	9,28	6,33

Keterangan : *) Angka Sasaran. **) Angka Estimasi

Produksi sayuran pada tahun 2004 (angka tetap 2004) sebesar 9.059.676 ton dan pada tahun 2005 (angka tetap 2005) meningkat 0,46% menjadi 9.101.987 ton dan pada tahun 2006 diperkirakan naik mencapai 9.700.000 ton (angka sasaran 2006) atau 6,57%. Peningkatan produksi sayuran menyesuaikan kebutuhan pasar dan mengikuti perkembangan konsumsi/ permintaan masyarakat. Kebijakan pengembangan produksi sayuran diarahkan pada peningkatan mutu produk dan menjaga keseimbangan antara pasokan dengan permintaan sehingga tidak terjadi fluktuasi harga. Pada TA.2005–2006 melalui dana APBN (dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) pengembangan sayuran difokuskan pada komoditas unggulan, yaitu cabai merah, bawang merah dan kentang. Perkembangan luas panen sayuran tahun 2005 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004. Tahun 2004 luas panen sayuran sebesar 977.552 ha dan pada tahun 2005 menurun 3,36% menjadi 944.695 ha.

Berdasarkan angka tetap 2005, produktivitas sayuran yang diprioritaskan pada 3 komoditas, yaitu cabe merah, bawang merah dan kentang menunjukkan hasil yang fluktuatif dan cenderung meningkat dibanding tahun 2004, seperti komoditas cabe merah yang dibagi atas cabe besar dan cabe rawit, menunjukkan bahwa produktivitas cabe besar tahun 2005 turun menjadi 6,39 ton/ha atau (-1,5%) dibanding tahun 2004 (6,49 ton/ha), produktivitas cabe rawit meningkat 3,5% menjadi 4,73 ton/ha dibanding tahun 2004 (4,57 ton/ha), produktivitas bawang merah meningkat 2,6% menjadi 8,76 ton/ha dibanding tahun 2004 sebesar 8,54 ton/ha dan produktivitas kentang cenderung tetap dan meningkat sedikit (0,06%) dimana tahun 2005 sebesar 16,40 ton/ha dibanding tahun 2004 sebesar 16,39 ton/ha.

Tabel 4.4. Ketersediaan hortikultura Tahun 2004–2005

No	Komoditas	Tahun		% Kenaikan
		2004	2005	
1	Buah-buahan (kg/kapita/th)	54	63,78	18,11
2	Sayuran (kg/kapita/th)	33	37,50	13,64

Gambar 4.2 Produk Hortikultura



Produksi tanaman hias semakin menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan setiap tahunnya, hal ini terjadi karena terus meningkatnya permintaan. Pada tahun 2004 produksi tanaman hias mencapai 158.522.843 tangkai, dan pada tahun 2005 mencapai 173.240.364 tangkai atau meningkat sebesar 9,28%. Selain itu ada beberapa komoditas tanaman hias yang memakai satuan bukan tangkai yaitu dracaena (batang), melati (kg) dan palem (pohon). Penambahan produksi tanaman hias tersebut masing-masing dracaena 4,53% dan palem 41,71%, sedangkan untuk komoditas melati mengalami penurunan sebesar 23,06%. Penambahan produksi tanaman hias disebabkan semakin berkembangnya gaya hidup yang berakibat kebutuhan penggunaan produksi tanaman hias meningkat. Perkembangan luas panen tanaman hias antara tahun 2004 dibandingkan dengan tahun 2005 mengalami penurunan. Pada tahun 2004 luas panen tanaman hias sebesar 25.844.400 m² dan menurun 4,88% pada tahun 2005 menjadi 24.584.359 m².

Berdasarkan angka tetap 2005, produktivitas tanaman hias yang diprioritaskan oleh Ditjen Hortikultura pada 1 komoditas, yaitu anggrek, menunjukkan hasil yang meningkat sebesar 80,56% menjadi 6,41 m² dibanding tahun 2004 sebesar 3,55 m². Produksi tanaman biofarmaka

utama seperti jahe, kunyit, kencur, lengkuas dan temulawak pada tahun 2004 (angka tetap 2004) sebesar 231.719 ton, dan pada tahun 2005 (angka tetap 2005) mencapai 342.389 ton atau meningkat 47,76% dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan luas panen tanaman biofarmaka mengalami peningkatan dari tahun 2004 dibandingkan tahun 2005. Pada tahun 2004 luas panen tanaman biofarmaka sebesar 144.197.445 m² dan menjadi 189.110.358 m² pada tahun 2005 atau meningkat 31,15%. Diperkirakan pada tahun 2006 produksi tanaman biofarmaka utama mencapai 238.764 ton (angka prognosa 2006) atau meningkat 3,04% dibandingkan produksi tahun 2005. Kegiatan peningkatan tanaman biofarmaka diarahkan untuk memenuhi bahan baku industri obat-obatan tradisional, disamping meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pengembangan tanaman biofarmaka melalui dana APBN dilaksanakan untuk kelompok komoditas rimpang, diantaranya jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur.

Berdasarkan angka tetap 2005, produktivitas biofarmaka yang diprioritaskan oleh Ditjen Hortikultura untuk kelompok komoditas rimpang, diantaranya jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur menunjukkan hasil yang meningkat. Produktivitas jahe pada tahun 2005 meningkat 20,6% menjadi 2,05 kg/m² dibanding tahun 2004 sebesar 1,70 kg/m², produktivitas lengkuas tahun 2005 meningkat 14,68% menjadi 2,50 kg/m² dibanding tahun 2004 sebesar 2,18 kg/m², produktivitas kunyit tahun 2005 meningkat 3,03% menjadi 1,70 kg/m² dibanding tahun 2004 sebesar 1,65 kg/m² dan produktivitas kencur tahun 2005 meningkat 14,95% menjadi 1,23 kg/m² dibanding tahun 2004 sebesar 1,07 kg/m².

4.3. PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS PERKEBUNAN

Produksi komoditas perkebunan periode 2005 – 2006 diperkirakan akan naik 7,76% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu dari 24.442.708 ton menjadi 26.340.265 ton. Kontribusi utama dari tanaman tahunan meliputi karet sebesar 2.367.064 ton, kelapa sawit sebesar 15.232.064 ton, kopi sebesar 615.995 ton, kakao sebesar 657.920 ton dan kelapa sebesar 3.806.089 ton. Sedangkan dari tanaman

semusim adalah tebu sebesar 2.392.141 ton. Rincian produksi untuk masing-masing komoditas perkebunan disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Produksi Komoditi Perkebunan Periode 2005 – 2006

No	Komoditi Perkebunan	2005 (Ton)	2006*) (Ton)	Pertumbuhan (%)
I	Tanaman Tahunan			
1	Karet	2.270.891	2.367.064	4,24
2	Kelapa sawit	14.176.001	15.392.526	8,54
3	kelapa	3.096.845	3.156.876	1,94
4	Kopi	640.365	653.388	2,03
5	Kakao	748.273	778.904	4,09
6	Jambu mete	135.070	140.173	3,78
7	Lada	78.272	79.686	1,81
8	Cengkeh	78.250	83.782	6,93
9	Teh	167.276	167.881	0,36
10	Aneka Tanaman Tahunan	484.147	642.852	12,13
II	Tanaman Semusim			
11	Tebu	2.218.076	2.239.584	0,97
12	Kapas	2.241	2.371	5,80
13	Aneka Tanaman Semusim	6.313	6.267	- 0,73
JUMLAH I & II		24.255.590	25.789.249	6,23

Catatan *) = Angka sementara

Dari sisi produktivitas, pada umumnya komoditas unggulan nasional perkebunan cenderung meningkat dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu, baik untuk perkebunan rakyat (PR), perkebunan besar negara (PBN) maupun perkebunan besar swasta (PBS). Rincian untuk masing-masing komoditas disajikan pada Tabel 4.7.

Khusus untuk komoditi tebu perkembangan pelaksanaan giling Musim Tanam Tahun 2005/2006 sampai dengan bulan Juli 2006 mencapai areal seluas 190.127 ha, tebu digiling sebesar 15.226.426 ton dengan rendemen rata-rata sebesar 7,36%. Hablur yang dihasilkan 1.120.612 ton dengan produktivitas tebu 80,1 ton/ha dan produktivitas hablur 5,89 ton/ha. Produksi hablur tersebut mencapai 54,7% dari sasaran tahun 2006 sebesar 2.477.929 ton.

Tabel 4.6. Produktivitas Tanaman Perkebunan Periode 2005 - 2006.

No	Komoditi Perkebunan	Produktivitas Perkebunan (kg/ha2005 - 2006*
I	TANAMAN TAHUNAN (Annual Tree Crop Estates)	
1	Karet (Rubber)	
	PR (Smallholders)	821
	PBN (Gov. Estates)	1.070
	PBS (Private Estates)	1.239
2	Kelapa sawit (Oil Palm)	
	PR (Smallholders)	3.002
	PBN (Gov. Estates)	3.685
	PBS (Private Estates)	3.634
3	Kelapa (Coconut)	
	PR (Smallholders)	1.145
	PBN (Gov. Estates)	625
	PBS (Private Estates)	1.512
4	Kopi (Coffee)	
	PR (Smallholders)	675
	PBN (Gov. Estates)	697
	PBS (Private Estates)	711
5	Kakao (Cocoa)	
	PR (Smallholders)	913
	PBN (Gov. Estates)	742
	PBS (Private Estates)	999
6	Jambu mete (Cashewnut)	
	PR (Smallholders)	391
	PBS (Private Estates)	173
7	Lada (Pepper)	
	PR (Smallholders)	688
	PBS (Private Estates)	770
8	Cengkeh (Clove)	
	PR (Smallholders)	307
	PBN (Gov. Estates)	311
	PBS (Private Estates)	355
9	Teh (Tea)	
	PR (Smallholders)	912
	PBN (Gov. Estates)	2.371
	PBS (Private Estates)	1.418
II	TANAMAN SEMUSIM (Biannual Crop Estates)	
10	Tebu (Sugar cane)	
	PR (Smallholders)	5.435
	PBN (Gov. Estates)	4.856
	PBS (Private Estates)	7.122
11	Kapas (Cotton)	
	PR (Smallholders)	475
12	Tembakau (Tobacco)	
	PR (Smallholders)	791
	PBN (Gov. Estates)	805

Catatan: sementara* = angka sangat



Gambar 4.3 Kelapa Sawit

4.4. PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS KOMODITAS PETERNAKAN

Dalam kurun waktu tahun 2005 - 2006 populasi ternak menunjukkan peningkatan sebesar 2,52% - 19,85%. Peningkatan terbesar pada ayam ras pedaging dan terkecil pada sapi potong. Produksi daging, telur, dan susu antara tahun 2005-2006 mengalami kenaikan, yakni masing-masing sebesar 13,94 %, 7,83 %, dan 7,77 %.

Sementara itu, pada periode 2005-2006, konsumsi masyarakat terhadap produk pangan asal hewan (daging, telur, dan susu) per kapita per tahun mengalami peningkatan masing-masing sebesar 11,05 %, 6,91 %, dan 0,32 %. Demikian juga konsumsi protein hewani asal ternak meningkat sebesar 8,32 %, yaitu dari 4,93 menjadi 5,34 gram/ kapita/hari.

Tabel 4.7. Populasi Ternak Tahun 2005 - 2006 (satuan dlm ekor)

No	JENIS	2005	2006*)	r (%)
1	Sapi Potong	10.569	10.836	2,53
2	Sapi Perah	361	382	5,82
3	Kerbau	2.128	2.201	3,43
4	Kambing	13.409	14.051	4,79
5	Domba	8.327	8.543	2,59
6	Babi	6.801	7.087	4,21
7	Kuda	387	399	3,10
8	Ayam Buras	278.954	298.432	6,98
9	Ayam Ras Petelur	84.790	95.478	12,61
10	Ayam ras Pedaging	811.189	927.221	19,85
11	Itik	32.405	34.612	6,81

Tabel 4.8. Produksi Daging, Telur, dan Susu 2005 - 2006 (satuan dlm ribu ton)

No	JENIS	2005	2006*)	r (%)
I.	Daging	1.817,0	2.070,2	13,94
1	Sapi Potong	358,7	389,3	8,53
2	Kerbau	38,1	39,5	3,67
3	Kambing	50,6	53,3	5,34
4	Domba	47,3	51,9	9,73
5	Babi	173,7	179,4	3,28
6	Kuda	1,6	1,7	6,25
7	Ayam Buras	301,4	322,8	7,10
8	Ayam Ras Petelur	45,2	54,3	20,13
9	Ayam ras Pedaging	779,1	955,8	22,68
10	Itik	21,4	22,3	4,21
II.	Telur	1.051,5	1.133,8	7,83
11	Ayam Buras	175,4	181,1	3,25
12	Ayam ras Petelur	681,1	751,0	10,26
13	Ayam ras Pedaging	195,0	201,7	3,44
III.	Susu	536,0	577,6	7,76

Tabel 4.9. Komsumsi Daging, Telur, dan Susu Tahun 2005 - 2006

No	Komoditi	2005	2006*)	Kenaikan (%/Th)
I.	Konsumsi Nasional (Ton)			
1.	Daging			
a.	Dalam negeri	1.817,0	2.070,2	
b.	Impor	59,7	59,7	
c.	Ekspor	0,2	0,2	
d.	Konsumsi	1.876,9	2.130,1	13,49
2.	Telur			
a.	Dalam negeri	1.051,5	1.133,8	
b.	Impor	0	0	
c.	Ekspor	0	0	
d.	Konsumsi	1.051,5	1.133,8	7,85
3.	Susu			
a.	Dalam negeri	536,0	577,6	
b.	Impor	2.042,3	2.042,3	
c.	Ekspor	451,9	451,9	
d.	Konsumsi	3.030,2	3.071,8	2,01
II	Koms./Kap/Th (Kg)			
a.	Daging	4,93	5,34	11,05
b.	telur	4,34	4,64	6,91
c.	Susu	9,32	9,35	0,32
III.	Koms Prot/Kap/Hr (Gr)			
a.	Daging	4,93	5,34	11,72
b.	Telur	2,73	3,05	6,52
c.	Susu	0,82	0,82	0

Keterangan: *) Angka sementara



Gambar 4.4 Pakan Sapi



BAB V

KESEMPATAN KERJA DAN NERACA PERDAGANGAN

5.1. KESEMPATAN KERJA DAN TENAGA KERJA PERTANIAN

Total angkatan kerja pada tahun 2004 adalah 103.973.387 orang (Tabel 5.1). Dari jumlah ini, yang bekerja adalah 93.722.036 orang (90,14 %), sedangkan sisanya sebesar 10.251.351 orang (9,86 %) adalah pengangguran terbuka. Pada tahun 2005, jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 105.802.372 orang atau naik 1,76%. Dari jumlah angkatan ini, 10,26 persen adalah pengangguran terbuka. Tambahan angkatan kerja yang terserap hanya sebesar 1.226.082 orang (67,04 %).

Tabel 5.1. Perkembangan Kesempatan Kerja Pertanian dan Non Pertanian, 2002 – 2005 (orang).

Tahun	Pertanian	Non Pertanian	Total Angkatan Kerja
2002	40.633.627	51.013.539	
2003	43.042.104	49.768.687	100.779.270
2004	40.608.019	53.114.017	102.630.802
2005	41.814.197	53.133.921	103.973.387
Trend (%/tahun)			105.802.372
2002	2.24	(0.10)	
2003	5.93	(2.44)	1.99
2004	(5.66)	6.72	1.84
2005	2.97	0.04	1.31
			1.76

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2006.

Dari jumlah yang bekerja pada tahun 2004, 43,33 persen bekerja di sektor pertanian, sedangkan sisanya (56,67 persen) bekerja pada sektor non-pertanian. Tahun 2005, pangsa tenaga kerja di sektor pertanian naik sedikit menjadi 44,04 persen. Terlihat bahwa sektor pertanian masih tetap menjadi andalan penyerap tambahan kesempatan kerja dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding sektor non-pertanian.

Kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut hanya pada kegiatan pertanian primer saja, belum termasuk sektor sekunder dan tersier sepanjang alur vertikal sistem agribisnis. Apabila penyerapan pada sektor sekunder dan tersier diperhitungkan, maka kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja tentu akan lebih besar lagi. Namun di sisi lain, ini merupakan beban bagi sektor yang pertanian dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Oleh karena itu, Departemen Pertanian telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk menciptakan nilai tambah di luar kegiatan pertanian primer yang mampu dinikmati oleh rumah tangga tani melalui program pengembangan sistem dan usaha agribisnis.

5.2. NERACA PERDAGANGAN

Pada tahun 2005 nilai ekspor sebesar US\$ 11,43 milyar jauh lebih besar dibanding nilai impor yang hanya sebesar US\$ 5,14 milyar, sehingga neraca perdagangan pada tahun 2005 mengalami surplus sebesar US\$ 6.3 milyar. Surplus neraca perdagangan tahun 2005 tersebut lebih tinggi 29.58 persen dibanding tahun 2004. Pada tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2006 nilai ekspor sebesar US\$ 5.62 milyar juga jauh lebih besar dibanding nilai impor yang hanya sebesar US\$ 2.27 milyar, sehingga neraca perdagangan pada tahun 2006 mengalami surplus sebesar US\$ 3.35 milyar. Surplus neraca perdagangan tahun 2006 sampai dengan bulan Mei meningkat sebesar 46.56 persen dibanding tahun 2005.

Sebagian besar yaitu 97 persen ekspor pertanian berasal dari komoditas perkebunan, sedangkan sebagian besar impor produk pertanian didominasi oleh produk pertanian yang tidak diproduksi di dalam negeri seperti

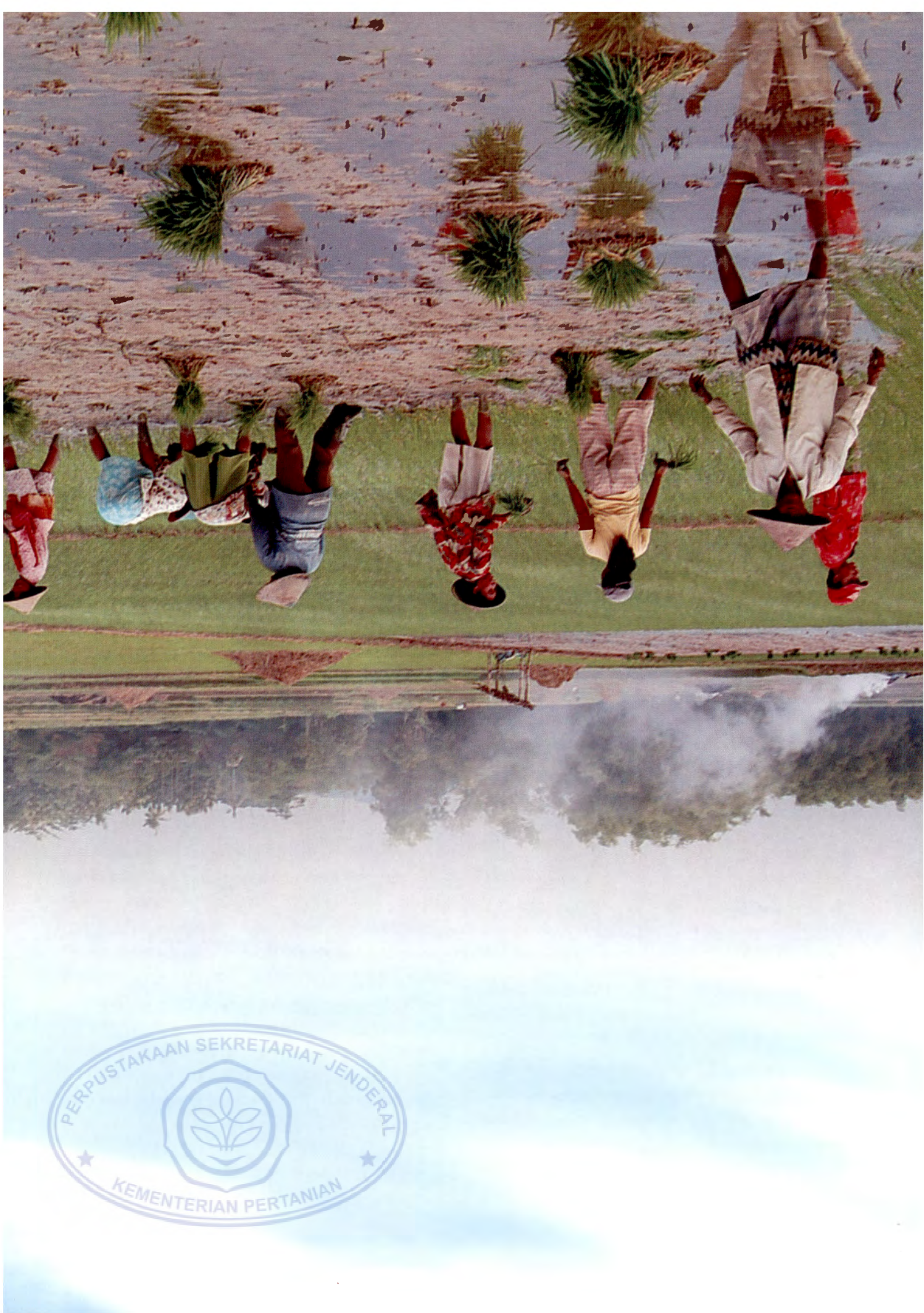
gandum. Keberhasilan meningkatkan surplus neraca perdagangan selama dua tahun terakhir merupakan bukti tak terbantahkan keberhasilan Departemen Pertanian dalam meningkatkan daya saing komoditas pertanian khususnya komoditas perkebunan di pasar dunia.

Tabel 5.3. Pangsa Ekspor-Impor Sub Sektor Pertanian Terhadap Total Pertanian Tahun 2000-2006

NO.	URAIAN	2004	2005	2006*)
I.	EKSPOR PERTANIAN	100.00	100.00	100.00
1.	Tanaman Pangan	0.80	0.48	0.25
2.	Hortikultura	1.80	2.04	1.23
3.	Perkebunan	91.38	93.46	97.09
4.	Peternakan	6.02	4.01	1.43
II.	IMPOR PERTANIAN	100.00	100.00	100.00
1.	Tanaman Pangan	44.71	53.92	39.73
2.	Hortikultura	10.70	8.91	18.18
3.	Perkebunan	23.99	19.21	19.29
4.	Peternakan	20.59	17.96	22.80

Tabel 5.2. Perkembangan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor-Impor) Indonesia Tahun 2004-2006

SUB - SEKTOR	2004	2005	2005*)	2006*)	PERTUMBUHAN (%)	
					2004	2005
I. EKSPOR (US \$ M)						
Tanaman Pangan	274,497	286,744	119,949	93,646	4.46	-21.93
Hortikultura	177,090	227,974	76,398	91,400	28.73	19.64
Perkebunan	9,107,466	10,673,184	4,079,532	5,285,575	17.19	29.56
Peternakan	328,537	246,487	174,919	149,057	-24.97	-15.00
Jumlah	9,887,590	11,434,389	4,450,798	5,619,678	15.64	26.26
II. IMPOR (US \$ M)						
Tanaman Pangan	2,423,418	2,115,140	893,064	873,165	-12.72	-2.23
Hortikultura	344,791	367,425	144,782	228,606	6.56	57.90
Perkebunan	1,323,371	1,532,520	665,061	700,627	15.80	5.35
Peternakan	936,175	1,121,832	461,791	466,868	19.83	1.10
Jumlah	5,027,755	5,136,917	2,164,698	2,269,266	2.17	4.83
III. NERACA (EKSIM) (US \$ M)						
Tanaman Pangan	-2,148,921	-1,828,396	-773,115	-779,519	-14.92	0.83
Hortikultura	-167,701	-139,451	-68,384	-137,206	-16.85	100.64
Perkebunan	7,784,095	9,140,664	3,414,471	4,584,948	17.43	34.28
Peternakan	-607,638	-875,345	-286,872	-317,811	44.06	10.79
Jumlah	4,859,835	6,297,472	2,286,100	3,350,412	29.58	46.56



BAB VI KESEJAHTERAAN PETANI



6.1. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan persentase laju peningkatan harga produk pertanian terhadap laju peningkatan harga barang/jasa konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi. Berdasarkan penghitungan, NTP dihitung dengan melakukan pembagian antara indeks harga yang diterima petani (IT) terhadap indeks harga yang dibayarkan petani (IB). Sementara Indeks Daya Beli Petani (IDBP) menggambarkan laju peningkatan harga produk pertanian terhadap laju peningkatan harga konsumsi. IDBP dihitung dengan melakukan pembagian antara indeks harga yang diterima petani (IT) terhadap indeks harga yang dikonsumsi rumah tangga (IKRT). Sedangkan Indeks Insentif Berproduksi Petani (ISPP) menggambarkan laju peningkatan harga produk pertanian terhadap laju peningkatan biaya produksi dan penambahan barang modal. ISPP dihitung dengan melakukan pembagian antara indeks harga yang diterima petani (IT) terhadap indeks biaya produksi dan penambahan barang modal.

Berdasarkan tahun dasar 1993=100, nilai tukar petani pada tahun 2003 sekitar 106,9 dan pada tahun 2004 menjadi 103,0 dan pada tahun 2005 menjadi 100,95 atau berturut-turut mengalami penurunan -3,60 persen dan -1,99 persen. Sementara pada tahun 2006 nilai tukar petani sebesar 102,35 mengalami peningkatan 1,28 persen dibanding tahun 2005. Ini menunjukkan bahwa selain kondisi kesejahteraan petani tahun 2006 lebih baik dibanding tahun 1993, juga kondisi petani tahun 2006 lebih baik dibanding tahun 2005.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berdampak pada semua aspek kehidupan. Dampak nyata yang cepat dirasakan masyarakat yaitu telah menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan mengalami penurunan. Walaupun pada tahun 2006 terjadi penurunan ternyata Indeks daya beli petani tahun 2006 sebesar -0,20 persen, ternyata penurunan itu masih lebih kecil dibanding penurunan yang terjadi tahun 2005 mencapai -2,83 persen, tahun 2004 mencapai -2,83 dan tahun 2003 mencapai -2,20. Fenomena ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat pada tahun 2006 sedikit lebih baik dibanding tahun 2005, termasuk juga dibanding tahun 1993.

Kebijakan insentif berproduksi yang diciptakan oleh Departemen Pertanian telah mampu membalik arah indeks insentif berproduksi pada tahun 2006. Sebelum tahun 2006, Indeks insentif berproduksi cenderung menurun, sebaliknya pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 4,49 persen dibanding tahun 2005. Pada tahun 2005 dan 2004 Indeks insentif berproduksi menurun masing-masing -0,71 dan -6,40. Fakta-fakta tersebut memberikan bukti kuat bahwa kebijakan Departemen Pertanian



telah mampu meningkatkan kondisi kesejahteraan petani melalui peningkatan nilai tukar. Perkembangan IT, IB dan NTP, IDBP, dan ISPP nasional selama periode bulan Oktober 2005 sampai dengan bulan Juni 2006 disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani, Indeks Daya Beli Petani, dan Indeks Insentif Berproduksi Petani di Tingkat Nasional, 2003-2006 (Tahun dasar 1993=100)

Tahun	NTP ¹⁾	IDBP ²⁾	ISPP ³⁾
2003	106,85	111,41	96,47
2004	103,00	108,96	90,30
2005	100,95	105,88	89,66
2006 ⁴⁾	102,35	106,49	92,57
Perubahan (%/tahun):			
2004	-3,60	-2,20	-6,40
2005	-1,99	-2,83	-0,71
2006 ⁴⁾	1,28	-0,20	4,49

Sumber : PSEKP, Tahun 2006

Keterangan:

- 1) NTP = IT/IB
NTP = Nilai Tukar Petani
IT = Indeks Yang Diterima Petani
IB = Indeks Yang Dibayar Petani
- 2) IDBP = IT/IKRT
IDBP = Indeks Daya Beli Petani
IKRT = Indeks Konsumsi Rumah Tangga
- 3) ISPP = IT/IBPPBM
ISPP = Indeks Insentif Berproduksi Petani
IBPPBM = Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal
- 4) Rata-rata Januari – Juni 2006 terhadap rata-rata Januari – Juni 2005

6.2. KETAHANAN PANGAN NASIONAL

6.2.1. Koordinasi Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan

Dari sisi keorganisasian secara kumulatif sampai bulan Desember tahun 2006, telah terbentuk Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan sebanyak 27 unit, sehingga masih ada 6 propinsi yang belum membentuk lembaga serupa yaitu Propinsi Banten, Riau Kepulauan, Kalimantan Timur, D.I. Yogya serta Bali dan Irian Jaya

Barat. Selain itu juga telah dibentuk 284 unit Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja Ketahanan Pangan yang berada di kabupaten/kota. Dewan Ketahanan Pangan Propinsi (khusus DKI Jakarta disebut Tim Ketahanan Pangan) telah terbentuk sebanyak 31 unit dan DKP kabupaten/kota sebanyak 346 unit. Beberapa kabupaten/kota yang belum memiliki kelembagaan koordinasi fungsional (DKP), sudah menyampaikan respon guna memberikan dukungan sosialisasi pemantapan ketahanan pangan wilayah bagi jajaran legislatif dan eksekutif di wilayahnya pada tahun 2006.

DKP daerah juga telah melakukan pemantauan ketahanan pangan secara intensif, terutama pemantauan harga pangan pokok pada periode hari-hari besar keagamaan dan nasional di daerah. Beberapa propinsi telah melakukan pemantauan ketersediaan dan perkembangan harga, sosialisasi ke kabupaten/kota dan ekspose melalui media masa lokal untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-Undang No 32 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 22 tahun 1999, Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris DKP telah mengembangkan mekanisme koordinasi fungsional untuk membangun, menggerakkan dan mewujudkan ketahanan pangan yang dilakukan melalui sosialisasi hasil konferensi dan sidang regional DKP tahun 2006.

6.2.2. Produksi Beras Nasional

Berdasarkan ARAM III BPS, produksi gabah nasional tahun 2006 meningkat 0,95 persen dibandingkan dengan tahun 2005. Peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya luas panen padi sebesar 0,13 persen dan produktivitas sebesar 0,81 persen (tabel 6.2).

Tabel 6.2. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2005-2006

URAIAN	ATAP 2005	ARAM III 2006	Kenaikan (%)
Luas Panen (000 Ha)	11.839	11.855	0,13
Produktivitas (Ku/Ha)	45,74	46,11	0,81
Produksi (000 ton GKG)	54.151	54.664	0,95

Kontribusi produksi padi/beras dari 14 propinsi sentra produksi mencapai 89,10 persen dari produksi padi nasional, terutama dari Jawa Barat (17,38%), Jawa Timur (16,93%), Jawa Tengah (15,88%) dan Sulawesi Selatan (6,63%) (tabel 6.3).

Tabel 6.3. Produksi Padi/Beras per Propinsi ARAM III Tahun 2006 (Ton)

No	Propinsi Sentra Produksi	Produksi GKG	Produksi Setara Beras	Kontribusi thd Nasional (%)
1	NAD	1.311.960	743.035	2,40%
2	Sumut	3.030.784	1.716.499	5,54%
3	Sumbar	1.873.499	1.061.065	3,43%
4	Sumsel	2.450.305	1.387.742	4,48%
5	Lampung	2.149.182	1.217.199	3,93%
6	Jawa Barat	9.500.551	5.380.682	17,38%
7	Jawa Tengah	8.678.272	4.914.980	15,88%
8	DIY	715.683	405.330	1,31%
9	Jawa Timur	9.255.098	5.241.668	16,93%
10	Banten	1.814.421	1.027.606	3,32%
11	NTB	1.545.254	875.162	2,83%
12	Kalbar	1.120.320	634.499	2,05%
13	Kalsel	1.633.978	925.411	2,99%
14	Sulsel	3.626.306	2.053.776	6,63%
Jumlah Propinsi Sentra		48.705.613	27.584.654	89,10%
Jumlah Propinsi Non Sentra		5.957.981	3.374.331	10,90%
Indonesia		54.663.594	30.958.985	100%

Prognosa panen padi tahun 2006 mengindikasikan bahwa di beberapa propinsi sentra masih terjadi panen gadu pada bulan Juli sampai Desember dengan jumlah kumulatif produksi sebesar 17,5 juta ton GKG (Tabel 6.4 dan 6.5)

Tabel 6.4. Situasi dan Perkiraan Panen Padi Juli-Desember 2006

Bulan	Luas Panen (Ha)	Produksi GKG(Ton)
Juli	1.144.890	5.465.334
Agustus	1.103.966	5.264.548
September	850.777	3.964.731
Oktober	606.953	2.788.155
Nopember	421.195	1.929.386
Desember	417.902	1.642.273

Tabel 6.5. Perkiraan Produksi Padi di beberapa daerah sentra Juli-Oktober 2006 (ton GKG)

Propinsi	Juli	Agustus	September	Oktober
Sumut	190.577	311.411	277.220	231.222
Sumsel	182.984	225.662	346.840	235.123
Lampung	155.862	166.524	149.984	78.884
Banten	181.811	158.049	140.611	166.994
Jabar	1.288.182	1.370.672	917.117	479.183
Jateng	913.972	752.783	558.826	184.253
Jatim	1.143.703	647.657	366.678	343.922
Kalsel	348.769	143.374	155.201	120.527
Sulsel	230.506	528.199	434.868	222.631

6.2.3. Perhitungan Neraca Pangan

Secara nasional perhitungan stok akhir tahun 2006 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan stok akhir tahun 2005. Hal ini cukup menggembirakan karena menunjukkan kemantapan penyediaan produksi beras dan produksi dalam negeri. Perbandingan antara perkiraan produksi padi nasional tahun 2006 dengan perkiraan konsumsi tahun 2006 masih mengalami surplus 110.030 ton.

Perkiraan stok Perum Bulog sampai dengan akhir tahun 2006 adalah sebesar 532.000 ton beras. Hal ini disebabkan oleh kesulitan Perum Bulog melakukan pengadaan dalam negeri karena harga pasar lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP). Walaupun stok Perum Bulog rendah, namun demikian stok di masyarakat cukup besar, yaitu sekitar 3.41 juta ton (table 6.6).

Tabel 6.6. Keadaan Kecukupan Beras Dalam Negeri Tahun 2006 (ton)

Uraian	2005	2006
Stok awal	3.761.425	3.830.799
a. Bulog	1.771.000	1.093.000
b. Masyarakat	1.990.425	2.737.799
Produksi	30.668.730	31.008.427
Ketersediaan	34.430.155	34.839.226
Konsumsi	30.599.356	30.898.397
Stok akhir	3.830.799	3.940.829
a. Bulog	1.093.000	532.000
b. Masyarakat	2.737.799	3.408.829

Catatan: Angka produksi Th.2005 adalah ATAP BPS; Angka Produksi Th.2006 adalah ARAM II BPS; Angka konsumsi = jumlah penduduk dikalikan dengan konsumsi/kapita (139,15 kg)

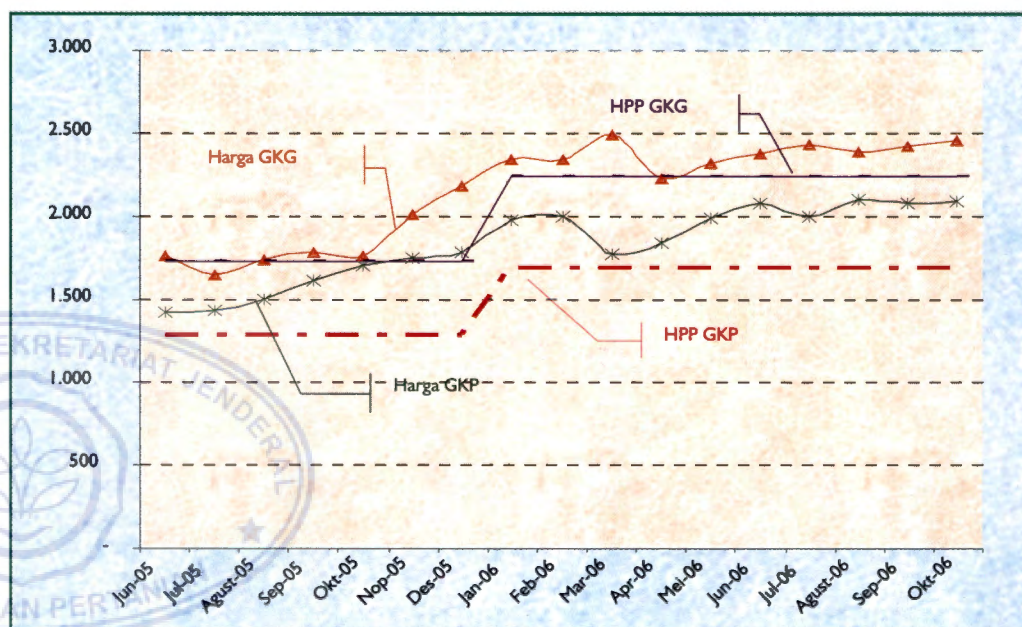
Tabel 6.7. Rata-rata Harga GKP di Tingkat Petani dan GKG di Penggilingan

Periode	Harga GKP di Tkt. Petani		Harga GKG di Tkt Penggilingan	
	Harga (Rp/Kg)	% Perb. Bulan n thd n-1	Harga (Rp/Kg)	% Perb. Bulan n thd n-1
Januari 2005	1.396	-	1.665	-
Pebruari 2005	1.436	2,84	1.794	7,75
Maret 2005	1.402	-2,35	1.886	5,11
April 2005	1.356	-3,28	1.921	1,86
Mei 2005	1.351	-0,37	1.898	-1,17
Juni 2005	1.429	5,76	1.778	-6,34
Juli 2005	1.446	1,16	1.658	-6,77
Agustus 2005	1.511	4,52	1.748	5,43
September 2005	1.625	7,55	1.793	2,62
Oktober 2005	1.711	5,27	1.768	-1,42
Nopember 2005	1.761	2,95	2.028	14,69
Desember 2005	1.801	2,26	-	-
Januari 2006	1.989	10,44	2.357	-
Pebruari 2006	2.016	1,37	2.356	-0,04
Maret 2006	1.788	-11,31	2.501	6,13
April 2006	1.854	3,65	2.240	-10,42
Mei 2006	2.001	7,94	2.329	3,97
Juni 2006	2.094	4,67	2.384	2,38
Juli 2006	2.006	-4,22	2.438	2,24
Agustus 2006	2.113	5,36	2.394	-1,78
September 2006	2.087	-1,25	2.433	1,62
Oktober 2006	2.099	0,58	2.461	1,16

6.2.4. Situasi Harga

Sejak Januari 2006 harga GKG di tingkat petani lebih tinggi dibandingkan dengan HPP yaitu Rp.2.250, kecuali unruk bulan April, harga GKG di tingkat petani hanya mencapai Rp.2.240. Hal tersebut menyebabkan Perum Bulog mengalami kesulitan dalam pengadaan gabah dalam negeri untuk stok pangan nasional. Rata-rata harga GKP dan GKG periode Januari 2005 – 11 Desember 2006 dipaparkan pada Tabel 6.7. dan Gambar 6.1

Gambar 6.1. Perkembangan Harga GKP di Tingkat Petani dan GKG Tingkat Penggilingan Tahun 2005-2006



Secara umum harga gabah berada di atas HPP namun di beberapa lokasi observasi BPS masih terdapat harga gabah di bawah HPP sebagaimana dipaparkan pada Tabel 6.8

Tabel 6.8. Persentase Harga Gabah di bawah HPP di Penggilingan dan Gabah Kualitas Rendah Januari – Oktober 2006

Bulan	Obs di Bawah HPP	Obs Gabah Kualitas Rendah
Januari	7,75	7,81
Pebruari	5,39	22,75
Maret	31,73	28,65
April	25	24,75
Mei	11,82	13,42
Juni	4,6	12,38
Juli	1,95	8,72
Agustus	1,22	6,35
September	0,14	9,45
Oktober	0,35	5,81

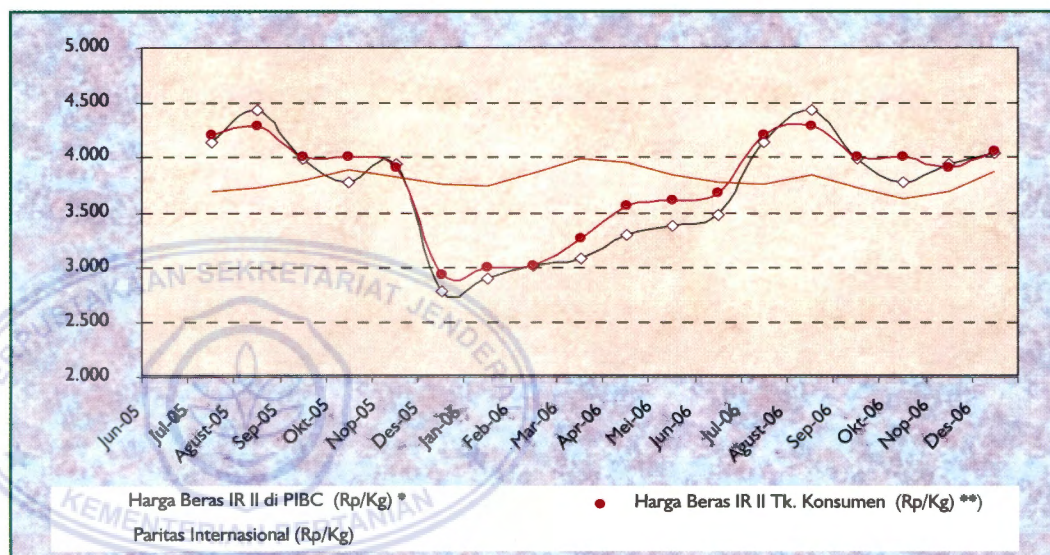
Pada periode Juni 2005 sampai Oktober 2006, terjadi kecendrungan kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Hal ini disebabkan penyesuaian HPP yang dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2005 dan 1 Januari 2006. Kenaikan HPP adalah untuk memberikan kompensasi yang wajar bagi petani agar pendapatan riilnya tidak terpuruk akibat kenaikan BBM yang terjadi pada Maret dan Oktober 2005.

Tabel 6.9. Harga Beras di Tingkat Konsumen Juni 2005 – Nopember 2006

Bulan	Harga Beras Konsumen terbanyak beredar (BPS)	Harga Beras IR II Konsumen (Depdag)	Harga Beras IR II PIBC
Juni 2005	3.417	2.922	2.780
Juli 2005	3.468	3.000	2.900
Agustus 2005	3.502	3.019	3.006
September 2005	3.608	3.254	3.077
Oktober 2005	3.806	3.558	3.294
Nopember 2005	3.829	3.600	3.370
Desember 2005	3.962	3.670	3.478
Januari 2006	4.469	4.200	4.145
Pebruari 2006	4.807	4.279	4.439
Maret 2006	4.703	4.000	3.989
April 2006	4.685	4.000	3.777
Mei 2006	4.857	3.904	3.939
Juni 2006	4.920	4.052	4.047
Juli 2006	-	4.194	4.085
Agustus 2006	-	4.182	4.250
September 2006	-	3.987	4.296
Oktober 2006	-	4.144	4.293
Nopember 2006	-	4.257	4.300

Sedangkan kenaikan harga beras pada bulan Mei-Juli 2006 merupakan koreksi atas penyesuaian HET pupuk yang mengalami kenaikan sejak 17 Mei 2006. Harga beras tingkat konsumen pada periode Juni 2005 –Oktober 2006, pada Tabel 6.9 dan Gambar 6.2.

Gambar 6.2. Perkembangan Harga Beras di Tingkat Konsumen dan PIBC Tahun 2005-2006



6.2.5. Kebijakan Produk Pangan Strategis (Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis di Tingkat Konsumsi)

Berdasarkan analisa data yang dikumpulkan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan sampai awal bulan Desember 2006, median harga bulanan sebagian besar pangan pokok di tingkat konsumen di Jawa dan Bali, yaitu beras, jagung pipilan, kacang tanah, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras, cenderung naik, sedangkan kedelai, gula pasir, cabe merah dan bawang merah, cenderung turun dibandingkan median harga pada bulan sebelumnya.

Dari bulan Januari sampai bulan Desember 2006 fluktuasi kenaikan harga pangan cukup variatif, yaitu harga beras IR I naik 10.49 persen, beras IR II naik 15.90 persen, jagung pipilan naik 6.28 persen, gula pasir lokal naik 7.05 persen, gula pasir impor naik 7.08 persen, kacang tanah naik 5.58 persen, minyak goreng naik 7.71 persen, daging sapi naik 8.28 persen, daging ayam ras naik 25.68 persen dan telur ayam ras naik 12.73 persen. Kisaran median harga harian beras IR I antara Rp.4.134-Rp.4.727/Kg, Beras IR II Rp.3.904-Rp.4.300/kg, jagung pipilan antara Rp.2.345-Rp.2.881, gula pasir lokal antara Rp.5.656-Rp.6.117, gula pasir impor Rp.4.500-Rp.5.000, kacang tanah Rp.7.950-Rp.8.882/kg, minyak goreng Rp.4.809-Rp.5.624, daging sapi Rp.44.957-Rp.44.288/kg, daging ayam Rp.12.673-Rp.17.382/kg dan telur ayam ras Rp.7.264-Rp.8.479/kg.

Penurunan harga terjadi pada komoditas kedelai (lokal) turun 4.49 persen, kedelai (impor) turun 10.90 persen, cabe merah biasa turun 65.29 persen, cabe merah keriting turun 50.07 persen dan bawang merah turun 15.97 persen. Kisaran median harga harian yaitu: kedelai lokal Rp.4.700-Rp.5.000/kg, Kedelai impor Rp.4.500-Rp.5.000/kg, cabe merah biasa Rp.4.907-Rp.11.917/kg, cabe merah keriting Rp.6.093-Rp.13.880/kg, dan bawang merah Rp.5.184-Rp.10.596/kg.

Trend perkembangan periode Januari s/d Desember 2006 secara kumulatif menunjukkan bahwa median harga beberapa bahan pangan pokok strategis di Jawa

dan Bali, yaitu beras, jagung pipilan, gula pasir, kacang tanah, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan telur ayam ras mengalami kenaikan. Sedangkan harga kedelai, cabe merah dan bawang merah mengalami penurunan.

6.2.6. Situasi Konsumsi

Pada tahun 2005, kualitas konsumsi penduduk sudah semakin baik, ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan penduduk yang mendekati skor mutu konsumsi sesuai pola pangan harapan (PPH) yang beragam bergizi dan seimbang sebesar 79,1. Skor PPH yang dicapai pada tahun 2005 tersebut lebih besar dibandingkan skor PPH tahun 2002 sampai 2004. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan sudah mengalami peningkatan.

Walaupun skor PPH tahun 2005 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya namun tingkat konsumsi energi pada rumah tangga tahun 2005 masih dibawah rekomendasi WKNPG (2000 Kkal/kap/hari) dan belum merata keseluruhan propinsi. Komposisi keragaman konsumsi energi terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG), masih didominasi atau lebih dari 62,2 persen berasal dari kelompok padi-padian. Artinya kondisi ini masih berada di atas proporsi ideal sebesar 50 persen. Konsumsi beras nasional tahun 2005 turun 1,8 kg/kap/th, demikian juga untuk umbi-umbian dan gula, tetapi konsumsi untuk kelompok pangan hewani, sayur dan buah tahun 2005 naik dibanding tahun 2004.

Berdasarkan prognosa Pola Pangan Harapan tahun 2006 sampai tahun 2015, diperkirakan bahwa tahun 2006 skor PPH akan mengalami kenaikan menjadi 81,0 atau meningkat 2,7 % dari tahun 2005 dengan perkiraan konsumsi energi sebesar 1990 kkal/kap/hari. Akan tetapi berdasar hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006, skor PPH mengalami penurunan menjadi 74,9 atau turun 5,43 persen dari tahun 2005 dengan konsumsi energi sebesar 1927 kkal/kap/hr. Penurunan kualitas konsumsi pangan penduduk tahun 2006 disebabkan oleh beberapa kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, serta retribusi melalui pajak dan subsidi.

Tabel. 6.10. Rata-rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Tahun 2005-2006

No	Kelompok Pangan	Tahun 2005				Tahun 2006			
		Gram	Energi	% AKG	Skor PPH	Gram	Energi	% AKG	Skor PPH
1	Padi-padian	319	1241	61.8	25.0	316	1224	61.2	25.0
2	Umbi-umbian	60	73	3.6	1.8	51	61	3.1	1.5
3	Pangan hewani	87	139	6.8	13.9	82	129	6.5	12.9
4	Minyak dan lemak	22	199	9.9	5.0	22	196	9.8	4.9
5	Buah/biji berminyak	9	51	2.5	1.0	8	45	2.2	1.0
6	Kacang-kacangan	25	67	3.4	6.7	26	66	3.3	6.6
7	Gula	29	99	4.9	2.5	24	89	4.4	2.2
8	Sayur dan buah	223	93	4.6	23.3	205	83	4.2	20.8
9	Lain-lain	49	35	2.3	0.0	40	33	1.7	0.0
			1997	99.8	79.1		1927	96.4	74.9

Sumber : Susenas 2005 & 2006

Berdasarkan peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas) Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 100 kabupaten rawan pangan yang tersebar di 23 propinsi, dengan rincian 30 kabupaten prioritas 1, 30 kabupaten prioritas 2 dan 40 kabupaten prioritas 3. Kelompok rawan pangan prioritas 1, 2 dan 3 menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapatkan prioritas khusus dalam penanganan masalah kerawanan pangan. Sedangkan sisanya (165 kabupaten) masuk dalam kelompok tahan pangan (prioritas 4, 5 dan 6), dengan rincian 50 kabupaten prioritas 4, 50 kabupaten prioritas 5 dan 65 kabupaten prioritas 6.

Dalam rangka penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan tersebut dilaksanakan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Rawan Pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Pada tahun 2005 pelaksanaan Program Aksi Mandiri Pangan dilaksanakan di 9 propinsi sebagai pilot project, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB dan Sulsel.

Tabel. 6.11. Prognosa Pola Pangan Harapan Tahun 2006 - 2015

No	Kelompok Pangan	2006	2007	2008	2009	2010	2015
1	Padi-padian	58,8	57,8	56,8	55,8	54,9	50,0
2	Umbi-umbian	4,3	4,5	4,7	4,8	5,0	6,0
3	Pangan hewani	7,7	8,2	8,7	9,2	9,6	12,0
4	Minyak dan lemak	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,0
5	Buah/biji berminyak	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0
6	Kacang-kacangan	3,7	3,8	4,0	4,1	4,3	5,0
7	Gula	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0
8	Sayur dan buah	4,5	4,7	4,7	5,0	5,2	6,0
9	Lain-lain	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0
% AKG		99,52	99,57	99,62	99,68	99,73	100,00
Proyeksi Konsumsi Energi		1990	1991	1992	1994	1995	2000
Proyeksi Skor PPH		81,0	83,1	85,2	87,3	89,4	100,0

Keterangan: Proyeksi sasaran PPH : menggunakan data dasar Susenas 2002, BPS (pasca krisis)

Pada tahun 2006 pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan pada 122 Kabupaten di 33 propinsi. Sampai bulan Desember 2006 kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu tahap persiapan yang meliputi: seleksi lokasi sasaran, pendataan dan pemetaan kondisi awal penerima manfaat, kelembagaan masyarakat dan pelayanan pendukung, termasuk prasarana lain; sosialisasi program; pelatihan dan rekrutmen tenaga pendamping.

6.3. Insiden Kemiskinan

Penduduk miskin di pedesaan terutama yang hidup di sektor Pertanian mempunyai kemampuan yang amat terbatas dalam permodalan dan pengetahuan teknologi pertanian, sehingga kemampuan mereka dalam meningkatkan kapasitas produksi pertaniannya pun melalui pengembangan teknologi juga terbatas. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya dukungan Infrastruktur Pertanian dan penguatan kelembagaannya. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan, utamanya di wilayah pedesaan, merupakan indikator utama keberhasilan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh suatu pemerintahan.

Bila dikaji data penduduk miskin dalam 26 tahun terakhir, sesungguhnya kita telah cukup berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun krisis multidimensi dan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan telah berpengaruh cukup besar terhadap laju penurunan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 42,8 juta orang atau 28,4 persen pada tahun 1980 menjadi 12,3 persen atau 15,3 juta orang pada tahun 1996. Sementara di perkotaan, penduduk miskin menurun dari 29,0 persen atau 9,5 juta orang pada tahun 1980 menjadi 9,7 persen atau 7,2 juta orang (Tabel 6.11).

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di pedesaan hampir dua kali lipat dibanding jumlah penduduk di perkotaan. Apabila hal ini dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di wilayah pedesaan bergantung pada sektor pertanian, berarti permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan sektor Pertanian. Dengan kata lain, sektor Pertanian merupakan sektor yang amat strategis untuk dijadikan instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Kemajuan sektor Pertanian, akan banyak memberikan kontribusi pada penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan.

Krisis multidimensi yang terjadi pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 melonjak menjadi 25,7 persen atau sekitar 31,9 juta orang di pedesaan dan 21,9 persen atau sekitar 17,6 juta orang. Namun pada tahun 2002, jumlah penduduk miskin telah menurun drastis menjadi 21,1 persen. Walaupun

Tabel 6.12. Perkembangan Penduduk Miskin 1980 - 2006.

Tahun	Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
1980						42,30
1981	28,10	26,50	26,90	9,30	31,30	40,60
1984	23,10	21,20	21,60	9,30	25,70	35,00
1987	20,10	16,10	17,40	9,70	20,30	30,00
1990	16,80	14,30	15,10	9,40	17,80	27,20
1993	13,40	13,80	13,70	8,70	17,20	25,90
1996	9,70	12,30	11,30	7,20	15,30	22,50
1998	21,90	25,70	24,20	17,60	31,90	49,50
1999	19,50	26,10	23,50	15,64	32,33	48,40
2000	14,60	22,38	19,14	12,30	26,40	38,70
2001	9,79	24,84	18,41	8,60	29,30	37,90
2002	14,46	21,10	18,20	13,30	25,10	38,40
2003	13,57	20,23	17,42	12,20	25,10	37,30
2004	12,13	20,11	16,66	11,40	24,80	36,10
2005	11,37	19,51	15,97	12,40	22,70	35,10
2006	13,36	21,90	17,75	14,29	24,76	39,10

Sumber : BPS.

secara absolut maupun persentase jumlah penduduk miskin masih lebih tinggi pada tahun 2002 dibanding tahun 1996 (sebelum krisis multidimensi), namun fakta penurunan ini merupakan salah satu prestasi luar biasa pembangunan Indonesia pada periode pemulihan ekonomi. Prestasi ini tidak terlepas dari pertumbuhan sektor Pertanian yang cukup tinggi, utamanya subsektor Tanaman Bahan Makanan selama periode tersebut.

Keberhasilan pembangunan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase secara konsisten berlanjut sampai tahun 2005. Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin di pedesaan tinggal sekitar 19,5 persen atau 22,7 juta orang dan di perkotaan sekitar 11,37 persen atau 12,4 persen. Fenomena sebaliknya terjadi sampai Maret 2006, dimana jumlah penduduk miskin baik di pedesaan maupun perkotaan mengalami peningkatan dibanding tahun 2005. Jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat dari 19,51 persen (22,7 juta orang) tahun 2005 menjadi 21,90 persen (24,76 juta orang) tahun 2006. Demikian pula di perkotaan yang meningkat dari 11,37 persen (12,4 juta orang) tahun 2005 menjadi 13,36 persen (14,29 juta orang) tahun 2006.

BAB VII

PERKEMBANGAN PROGRAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN



7.1. PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI

7.1.1. Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)

Implementasi kegiatan PMUK sampai dengan Juli 2006, sebagian besar sudah melakukan CPCL lengkap bahkan sebagian dana sudah masuk ke rekening kelompok tani. Namun demikian, beberapa kendala dijumpai dalam hal administrasi, kurangnya sumberdaya manusia yang menangani administrasi di daerah, serta sulitnya memperoleh laporan dari propinsi karena tidak adanya kewenangan propinsi untuk memonitor secara lebih jauh tentang pelaksanaan kegiatan PMUK berkaitan dengan otonomi daerah.

Dana dari PMUK digunakan untuk pengembangan berbagai komoditas untuk peningkatan produksi maupun produktifitas. Sebagai contoh, pengembangan komoditas kacang-kacangan dan umbi-umbian melalui PMUK menggunakan strategi pengembangan pusat pertumbuhan. Adapun sasaran dan realisasi tanam seperti pada tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1. Sasaran dan Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Tanaman Kacang-kacangan & Umbi-umbian Tahun 2006

No	Komoditi	Prop	Kab	Areal Tanam (Ha)		
				Sasaran	Realisasi	%
1	Kedelai	28	60	18.625	10.696	57,43
2	Kc.Tanah	22	55	10.107	4.060	40,17
3	Kc.Hijau	8	21	3.085	1.900	61,59
4	Kc. Nagara	1	1	100	100	100
5	Ubikayu	14	24	6.065	500	8,24
6	Ubi Jalar	13	20	2.256	355	15,74
7	Pangan Alternatif					
	- Garut	2	3	35	0	-
	- Talas	2	2	46,5	26,5	57,00
	- Ubi Banggai	1	1	15	0	-

Berdasarkan tabel di atas realisasi tanam komoditi kabi sampai dengan Juli 2006 untuk komoditi kedelai sudah mencapai 10.696 ha (57,43%), kc.tanah 4.060 ha (40,17 %), kc.hijau 1.900 ha (61,59 %), ubikayu 500 ha (8,24 %), ubi jalar 355 ha (15,74%),kacang nagara 100 ha (100 %) dan pangan alternatif yaitu talas 26,5 ha (57,00%). Belum tercapainya sasaran tersebut dikarenakan antara lain karena di beberapa daerah pencairan dana PMUK terlambat, SK penetapan kelompok tani terlambat ditetapkan, benih bermutu dan pupuk khususnya untuk kedelai tidak tersedia tepat waktu, dan penanaman yang menunggu awal musim hujan (Okt-Mar) khususnya untuk tanaman ubikayu dan ubi jalar.

Dana APBN yang dialokasikan di 9 Provinsi (Jawa dan Luar Jawa) dalam bentuk PMUK untuk menunjang Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula mengalami penurunan alokasi anggaran dibanding tahun 2005 di 4 Provinsi (Jawa) sebesar 2,94 % (pada tahun 2006 sebesar Rp 70,116 milyar dan tahun 2005 sebesar Rp. 72,177 milyar). Sedangkan dana guliran yang dimanfaatkan sampai dengan tahun 2006 adalah Rp. 149,65 milyar yaitu untuk bongkar ratoon sebesar Rp. 70,96 milyar (35.470 ha) dan untuk pembangunan kebun bibit sebesar Rp. 78,69 milyar (7.869).

Kegiatan bongkar ratoon dan pembangunan kebun bibit berjenjang yang dananya disalurkan melalui PMUK telah meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tebu bongkar ratoon. Produksi tebu dan hablur tahun 2005 sebesar 2.396.386 ton dan 167.525 ton, sedangkan produktivitas mencapai 94,96 ton/ha dan 5,71 ton/ha. Semenjak penerapan pola PMUK pada pengembangan tebu saat ini telah terbentuk 71 KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat/Koperasi Primer) dan 2 Koperasi Sekunder.

Tabel 7.2. Perkembangan KPTR di 4 Propinsi Pengembangan Tebu di Jawa

No.	Propinsi	Tahun 2003	2006	
		Kop. Primer	Kop. Primer	Kop. Sekunder
1	Jawa Timur	40	47	1
2	Jateng	9	18	-
3	D.I.Y	2	1	1
4	Jabar	3	5	-
	Jumlah	54	71	2

Khusus untuk usaha peternakan, upaya-upaya untuk meningkatkan pemberdayaan petani peternak telah dilakukan sejak tahun 2000 melalui penyediaan fasilitas, baik berupa bantuan langsung masyarakat (BLM) atau bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM), atau penguatan modal usaha kelompok (PMUK). Jumlah dana yang telah disalurkan, pada periode 2000-2006, sebesar Rp. 432,78 miliar kepada 2.091 kelompok, yang mencakup di 33 propinsi dan 316 kabupaten / kota.

Dana PMUK tahun 2005 sebesar Rp. 59,28 miliar telah dialokasikan di 30 propinsi dan 176 kabupaten/kota kepada 260 kelompok ternak. Sedangkan pada

tahun 2006 jumlah dana PMUK menurun 21,25% dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 46,68 miliar. Dana ini dialokasikan di 33 propinsi, 190 kabupaten/kota, kepada 105 kelompok. Selain untuk usaha budidaya, penguatan modal kelompok alokasi dana PMUK tahun 2006 juga dimaksudkan untuk membangun sentra-sentra perbibitan (Village Breeding Centre/VBC) pada 33 propinsi yang tersebar di 109 kabupaten.

7.1.2. Pengembangan Agribisnis Melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3)

LM3 mempunyai tujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan kualitas masyarakat LM3 dan masyarakat lingkungannya dalam pembangunan agribisnis, meningkatkan lapangan kerja dan lapangan usaha di bidang agribisnis bagi masyarakat di lingkungan LM3, menumbuhkan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis di pedesaan, serta mengembangkan kelembagaan ekonomi termasuk pusat-pusat pendidikan dan latihan swadaya masyarakat di sekitar lingkungan LM3.

Pada tahun 2005 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian TA 2005 telah memfasilitasi bantuan peralatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian terhadap 48 LM3 terpilih. Pengembangan usaha agribisnis melalui LM3 ini diarahkan pada pengembangan usaha yang mencakup aspek yang lebih luas mulai dari agribisnis hulu sampai hilir.

Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 (Pondok pesantren, Gereja, Pura, dll) pada tahun 2006 dengan alokasi dana sebesar Rp 100,85 Milyar. Beberapa kinerja yang telah dicapai antara lain: Penyusunan Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3, Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian No. 282/Kpts/KU.210/4/2006 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada LM3 pada DIPA Departemen Pertanian Tahun 2006, Pencairan dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada 338 LM3 terpilih melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sesuai Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan No. SE-42/PB/2006 tanggal 5 Juni

2006 tentang Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis kepada LM3 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 468/Kpts/KU.210/8/2006 tentang penetapan LM3. Pembinaan 338 LM3 terpilih ini oleh Ditjen PPHP 178 LM3 dan BPSDMP 160 LM3 pada 8 BBDA/BBDA Jambi, Kayu Ambon, Cinagara, Ketindan, Batu, Batang Kaluku, Nulbaki dan Binuang. Dari 160 LM3 diantara 20 LM3 dilaksanakan secara bersama-sama oleh Ditjen. PPHP dan BPSDM serta 2 LM3 yang mendapat kegiatan pemberdayaan, pengembangan usaha dari Ditjen. PPHP, BPSDMP dan Ditjen. Perkebunan.

Berbagai usulan rencana usaha kegiatan LM3 yang tercatat antara lain: pengembangan agribisnis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; serta pengembangan sarana produksi berupa perbaikan drainase, alat mesin pengolahan tanah, alat mesin pengolahan hasil pertanian, alat pengemasan, dan prasarana pemasaran.

7.1.3. Pembiayaan Pertanian

Salah satu aspek pendukung bergeraknya usaha sektor pertanian adalah adanya dukungan pembiayaan. Dukungan pembiayaan diperlukan sebagai salah satu sarana dalam kegiatan usahatani, sehingga peranan modal (capital) menjadi faktor pendorong setiap kegiatan ekonomi termasuk sektor pertanian dan agribisnis. Pembiayaan untuk usaha sektor pertanian dapat diperoleh dari lembaga keuangan baik perbankan dan non perbankan.

Dilain pihak bank umum (konvensional) yang memberikan kredit kepada petani sebagai pelaku pembangunan masih menghadapi banyak kendala baik dari sisi petani sebagai debitur maupun lembaga keuangan (kreditur) yang dibatasi dengan Undang-undang Perbankan.

Pemerintah melalui Pusat Pembiayaan Pertanian berusaha memenuhi kebutuhan petani untuk akses ke lembaga keuangan baik melalui kredit program yang difasilitasi oleh Pemerintah (KKP, Kredit Taskin Agribisnis, Modal Ventura, PKBL Laba BUMN), Skim

Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) dan kredit komersial yang disalurkan dari perbankan (Kupedes dari BRI, Swamitra dari Bank Bukopin dan KUK dari Bank Danamon, BII, Mandiri, BCA dll.).

Kinerja kegiatan-kegiatan pembiayaan selama 1 tahun untuk mendukung program revitalisasi pertanian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Realisasi penyaluran KKP sejak Oktober 2005 sampai dengan Desember 2006 (kumulatif) mengalami kenaikan sebesar Rp. 971,628 milyar dengan rincian seperti tabel 7.3. berikut.

Tabel. 7.3. Realisasi Kredit Ketahanan Pangan 2005 – Desember 2006

Keterangan/ Komoditas	Oktober 2005 (Rp. Miliar)	Oktober 2006 (Rp. Miliar)	Kenaikkan penyaluran (Rp. Miliar)
1. Tanaman Pangan	268,128	311,113	42,295
2. Budidaya Tebu	2.475.848	3.296,517	820,669
3. Peternakan	312,277	412,493	100,216
4. Penangkapan Ikan	9,822	10,025	0,203
5. Pengadaan Pangan	90,492	98,048	7,556
Total	3.156.567	4.128,195	971,628

Keterangan : Tahun 2006, laporan perbankan posisi Oktober 2006

Percepatan penyaluran KKP dilakukan melalui :

- Koordinasi dengan Perbankan Pelaksana KKP baik di pusat maupun di daerah,
- Pengembangan Pola Kerjasama Kemitraan dengan melibatkan stakeholder dalam risk sharing penjamin kredit,
- Untuk memenuhi permintaan KKP peternakan maka dilakukan realokasi dari KKP pengadaan pangan ke KKP peternakan di Bank BRI sebesar Rp. 20 milyar,
- Usulan Penyempurnaan KKP menjadi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), perluasan komoditas yang dibiayai KKP-E dan kenaikan maksimum kredit per debitur dari Rp. 15 juta menjadi Rp. 25 juta.

2. Dampak KKP Terhadap pendapatan Petani

Dengan memanfaatkan KKP petani dan peternak dapat melaksanakan usahatani secara optimal sehingga produktivitas dan pendapatan mereka meningkat seperti tabel dibawah ini.

Tabel. 7.4. Dampak KKP Terhadap Pendapatan petani

No.	Keterangan	Kenaikan Produktivitas	Kenaikan Pendapatan
1.	Petani Padi	1,5 ton/Ha	Rp. 2,250 juta
2.	Petani tebu	0,38 ton/Ha	Rp. 2,0 juta
3.	Peternak sapi	135 Kg/3 Bulan/ 3 ekor sapi	Rp. 2,050 juta/3 bulan/ 3 ekor sapi

3. Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK-SUP 005)

Realisasi penyaluran total KUMK SUP-005 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,708 trilyun. Untuk sektor pertanian mengalami kenaikan Rp. 339,309 milyar dengan rincian seperti tabel dibawah ini.

Tabel. 7.5. Realisasi Penyaluran Kredit usaha Mikro & Kecil

Keterangan/ Komoditasa	Oktober 2005 (Rp. milyar)	Oktober 2006 (Rp. Milyar)	Kenaikan penyaluran (Rp. milyar)
1. Total Penyaluran	1.727	3.435	1.708
2. Penyaluran sektor pertanian	0	339,309	339,309

Keterangan : Tahun 2006, posisi Oktober 2006

Pemanfaatan dana KUMK SUP 005 untuk sektor pertanian telah dilakukan:

- Koordinasi dengan Perbankan dan Kantor Meneg Koperasi dan UKM,
- Sosialisasi kepada Dinas Teknis Propinsi dan Kabupaten,
- Penyampaian pedoman ke daerah.

4. Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3)

Departemen Pertanian melakukan upaya terobosan untuk membantu petani agar lebih mudah mendapatkan pelayanan pembiayaan dari perbankan melalui penyediaan APBN Departemen Pertanian

untuk berbagi resiko dengan Perbankan sehingga petani layak didanai oleh perbankan.

Hasil pelaksanaan SP-3 tahun 2006 dari sejak persiapan-persiapan sampai dengan pelaksanaan SP-3 adalah hasil sebagai berikut :

- Pedoman Umum SP-3 telah disusun dan dikirim ke instansi terkait.
- MoU antara Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana untuk Pengembangan SP-3 telah ditandatangani pada tanggal 27 Juni 2006.
- Telah disusun Tim Pengarah dan Tim Pelaksana SP-3 yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian; dan Tim Teknis SP-3 yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran SP-3.
- Naskah perjanjian kerjasama antara Departemen Pertanian dengan Bank Pelaksana SP-3 (PT. Bank Mandiri, Tbk., PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Bukopin, Tbk., PT. Bank Jatim dan PT. Bank NTB) telah ditandatangani.
- Dana SP-3 sudah masuk ke PT. Bank Mandiri, Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, BPD Jatim dan BPD NTB.
- Pertemuan teknis dan workshop SP-3 telah dilaksanakan di Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Pedoman umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan SP-3 telah disusun bersama dengan Bank Pelaksana SP-3 dan telah disampaikan ke daerah.
- Telah dilaksanakan sosialisasi SP-3 kepada pelaksana teknis (Petugas Dinas Lingkup Pertanian dan Penyuluh) di daerah untuk 32 propinsi yang dilaksanakan pada Bulan Oktober - Nopember 2006 oleh Tim Koordinator Teknis SP-3 dan Pihak Bank pelaksana; dengan peserta adalah Dinas Teknis lingkup Pertanian, kelompok-kelompok tani calon nasabah.
- Rapat koordinasi dan Evaluasi awal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian terhadap kinerja Bank Pelaksana. Hadir dalam rapat adalah :
 - Tim Teknis SP-3 lingkup Deptan;
 - Wakil Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Jatim dan Bank NTB.

Hasil dari rapat tersebut adalah diharapkan adanya percepatan penyaluran Skim SP-3 sampai pada akhir Desember 2006.

- j. Secara umum pengadministrasian dana SP-3 di 5 (lima) Bank pelaksana selesai tanggal 19 September 2006. Juklak dan Juknis disampaikan secara resmi kepada Bank Pelaksana pada tanggal 20 September 2006 sebagai Dokumen Perbankan kepada Cabang Bank Pelaksana.
- k. Deptan dan Bank pelaksana melalui Cabang-cabang Bank untuk lebih mengaktifkan identifikasi calon nasabah potensial dan layak untuk dibiayai melalui fasilitas SP-3.
- l. Realisasi penyaluran SP-3 sampai dengan Minggu 1 Desember 2006 adalah :
 - Bank Mandiri telah menyetujui penyaluran sebesar Rp. 13,6 milyar.
 - Bank Syariah mandiri sebesar Rp. 2,550 milyar.
 - BPD NTB sebesar Rp. 965 juta
 - Bank Bukopin masih dalam tahap verifikasi permohonan.
 - BPD Jatim masih melengkapi persyaratan sebesar Rp. 69,295 milyar.
- m. Pada Bulan Desember akan dilakukan MONEV oleh Tim Teknis Pusat yang ditujukan kepada 3 target sasaran yaitu : (1) Bank Pelaksana, (2) Nasabah, dan (3) Diras Lingkup Pertanian.

5. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).

- a. Pada tahun 2006 telah dilakukan pelatihan transformasi kelompok tani menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) sebanyak 45 kelompok tani di 3 propinsi yaitu Propinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan DI Yogyakarta.
- b. Telah melaksanakan Training of Master (TOM) LKMA kepada 60 orang petugas Dinas Teknis Propinsi dan Kabupaten di Propinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan.

6. Kredit Hortikultura Mandiri

- a. Koordinasi dengan Tim PT. Bank Mandiri, Tim Ditjen. Hortikultura dengan hasil bahwa : Bank Mandiri menyarankan untuk mempersiapkan petani dan kelompok tani serta kebutuhan kredit serta perusahaan inti/kemitraan. Kemudian perusahaan inti dan petani plasma dipertemukan dengan bank cabang untuk evaluasi.
- b. Pilot Proyek diusulkan di Jawa Barat dan identifikasi calon nasabah telah dilakukan oleh tim Ditjen. Hortikultura.
- c. Kebutuhan indikatif kredit petani dan kelompok tani sedang dipersiapkan.
- d. Komoditas yang diusulkan adalah : Cabe bermitra dengan PT. ABC, Kentang bermitra dengan PT. Indofood, Buah strawberi, Melon, Beberapa Tanaman Hias : Anggrek, Crisant, dll, Penangkar Benih,
- e. Rencana pelaksanaan Desember 2006

7. Skim Kredit Komersial .

Telah dilakukan koordinasi dengan perbankan dalam rangka memperoleh fitur-fitur skim kredit yang dapat diakses/dimanfaatkan untuk sektor pertanian selain KKP. Beberapa pelaku usaha/petani/-kelompok tani sudah memperoleh kredit tetapi jumlahnya masih sedikit, sehingga penyaluran kredit ke sektor pertanian masih rendah yaitu 24,74 % dari target 40 % untuk tahun 2007 (sumber BRI).

8. Pemanfaatan Modal Ventura.

Belum banyak yang memanfaatkan skim pembiayaan ini. Oleh karena itu perlu disosialisasikan untuk menginformasikan dan mengembangkan pemanfaatan modal ventura di sektor pertanian sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

9. Kredit Tunda Jual Gabah

- Kredit ini memberikan pinjaman/talangan dana yang cepat dengan jaminan komoditas pertanian yang dimiliki. Kredit tunda jual ini bekerjasama dengan Perumn Pegadaian .

- Ada 5 agen di Jawa Barat dengan jumlah nasabah 233 nasabah dengan uang pinjaman sejumlah Rp. 1,078 milyar.
- Di Sulawesi Selatan terdapat 24 agen dengan jumlah nasabah 49 nasabah dengan total pinjaman Rp. 332.075.000,-

10. KIK- Agribisnis.

Merupakan Pola Kontrak Investasi Kolektif dalam rangka pengamanan modal yang berasal dari penyertaan/penarikan dana masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan agribisnis. Pola KIK-Agribisnis dengan payung hukum SKB antara Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan Nomor : 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan Keputusan Ketua Bapepam dengan Nomor : KEP 29/PM/2003. Pilot model yang akan dilakukan bekerjasama dengan Tim PNM sebagai Manager Investasi dan PT. Saung Mirwan sebagai Perusahaan Agribisnis. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi pola KIK diantaranya adalah perubahan struktur organisasi Departemen Pertanian. Untuk itu perlu disusun kembali Tim Verifikasi dan Sekretariat KIK Agribisnis, yang saat ini sedang dalam persiapan dan dana penjaminan sebagai cadangan resiko yang diminta PT. PNM kepada Pusat Pembiayaan masih dalam pembahasan, sehingga rencana pilot model ini ditunda tahun depan.

Tabel 7.6. Rata-Rata Harga GKP di Tingkat Petani dan GKG di Penggilingan

Periode	Harga GKP di Tk. Petani		Harga GKG di Tkt Penggilingan	
	Harga (Rp/Kg)	% Perb. Bulan n thd n-1	Harga (Rp/Kg)	% Perb. Bulan n thd n-1
Januari 2005	1.396	-	1.665	-
Pebruari 2005	1.436	2,84	1.794	7,75
Maret 2005	1.402	-2,35	1.886	5,11
April 2005	1.356	-3,28	1.921	1,86
Mei 2005	1.351	-0,37	1.898	-1,17
Juni 2005	1.429	5,76	1.778	-6,34
Juli 2005	1.446	1,16	1.658	-6,77
Agustus 2005	1.511	4,52	1.748	5,43
September 2005	1.625	7,55	1.793	2,62
Oktober 2005	1.711	5,27	1.768	-1,42
Nopember 2005	1.761	2,95	2.028	14,69
Desember 2005	1.801	2,26	-	-
Januari 2006	1.989	10,44	2.357	-
Pebruari 2006	2.016	1,37	2.356	-0,04
Maret 2006	1.788	-11,31	2.501	6,13
April 2006	1.854	3,65	2.240	-10,42
Mei 2006	2.001	7,94	2.329	3,97
Juni 2006	2.094	4,67	2.384	2,38
Juli 2006	2.006	-4,22	2.438	2,24
Agustus 2006	2.113	5,36	2.394	-1,78
September 2006	2.087	-1,25	2.433	1,62
Oktober 2006	2.099	0,58	2.461	1,16

7.2. STABILITAS HARGA DAN PENGEMBANGAN PASAR

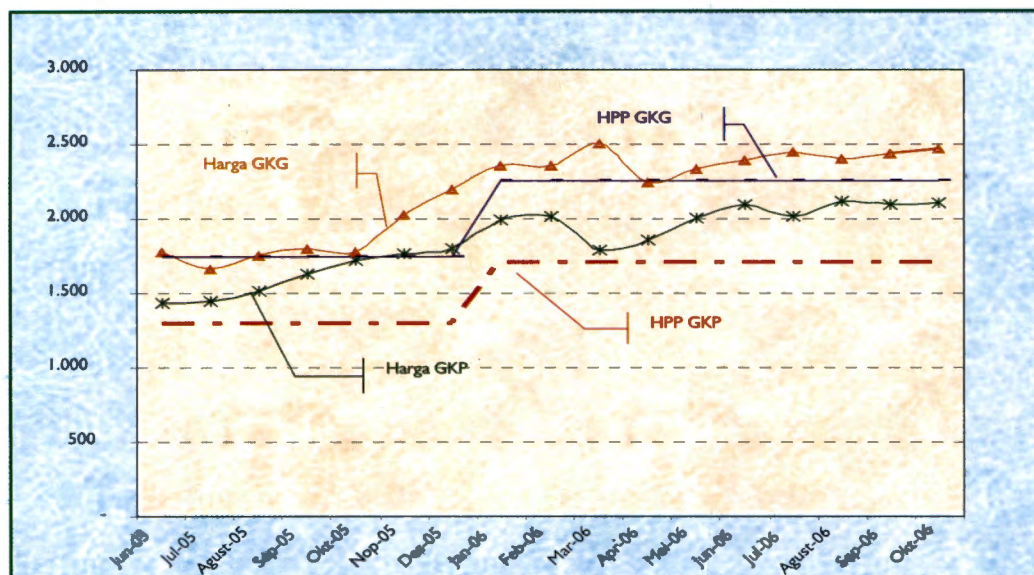
7.2.1. Situasi Harga

Sejak Januari 2006 harga GKG di tingkat petani lebih tinggi dibandingkan dengan HPP yaitu Rp.2.250, kecuali untuk bulan April, harga GKG di tingkat petani hanya mencapai Rp.2.240. Hal tersebut menyebabkan Perum Bulog mengalami kesulitan dalam pengadaan gabah dalam negeri untuk stok pangan nasional. Rata-rata harga GKP dan GKG periode Januari 2005 – 11 Desember 2006 dipaparkan pada Tabel 6.7. dan Gambar 6.1.



Gambar 7.1. Bajak Sawah

Gambar 7.2. Perkembangan Harga GKP di Tingkat Petani dan GKG Tingkat Penggilingan Tahun 2005-2006



Secara umum harga gabah berada di atas HPP namun di beberapa lokasi observasi BPS masih terdapat harga gabah di bawah HPP sebagaimana dipaparkan pada Tabel 6.8

Tabel 7.7. Persentase Harga Gabah di bawah HPP di Penggilingan dan Gabah Kualitas Rendah Januari – Oktober 2006

Bulan	Obs di Bawah HPP	Obs Gabah Kualitas Rendah
Januari	7,75	7,81
Pebruari	5,39	22,75
Maret	31,73	28,65
April	25	24,75
Mei	11,82	13,42
Juni	4,6	12,38
Juli	1,95	8,72
Agustus	1,22	6,35
September	0,14	9,45
Oktober	0,35	5,81

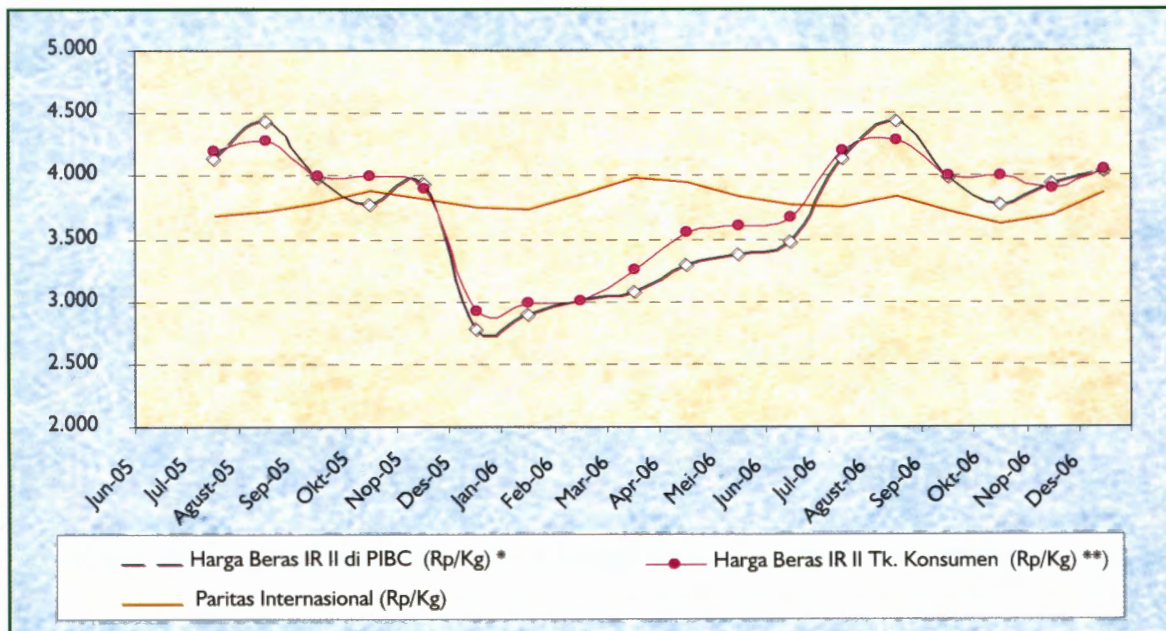
Pada periode Juni 2005 sampai Oktober 2006, terjadi kecenderungan kenaikan harga beras di tingkat konsumen. Hal ini disebabkan penyesuaian HPP yang dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2005 dan 1 Januari 2006. Kenaikan HPP adalah untuk memberikan kompensasi yang wajar bagi petani agar pendapatan riilnya tidak terpuruk akibat kenaikan BBM yang terjadi pada Maret dan Oktober 2005. Sedangkan kenaikan harga beras pada bulan Mei-Juli 2006

merupakan koreksi atas penyesuaian HET pupuk yang mengalami kenaikan sejak 17 Mei 2006. Harga beras tingkat konsumen pada periode Juni 2005 –Oktober 2006, pada Tabel 6.9 dan Gambar 6.2.

Tabel 7.8. Harga Beras di Tingkat Konsumen Juni 2005 – Nopember 2006

Bulan	Harga Beras Konsumen terbanyak beredar (BPS)	Harga Beras IR II Konsumen (Depdag)	Harga Beras IR II PIBC
Juni 2005	3.417	2.922	2.780
Juli 2005	3.468	3.000	2.900
Agustus 2005	3.502	3.019	3.006
September 2005	3.608	3.254	3.077
Oktober 2005	3.806	3.558	3.294
Nopember 2005	3.829	3.600	3.370
Desember 2005	3.962	3.670	3.478
Januari 2006	4.469	4.200	4.145
Pebruari 2006	4.807	4.279	4.439
Maret 2006	4.703	4.000	3.989
April 2006	4.685	4.000	3.777
Mei 2006	4.857	3.904	3.939
Juni 2006	4.920	4.052	4.047
Juli 2006	-	4.194	4.085
Agustus 2006	-	4.182	4.250
September 2006	-	3.987	4.296
Oktober 2006	-	4.144	4.293
Nopember 2006	-	4.257	4.300

Gambar 7.3. Perkembangan Harga Beras di Tingkat Konsumen dan PIBC Tahun 2005-2006



7.2.2. Kebijakan Produk Pangan Strategis (Perkembangan Harga Pangan Pokok Strategis di Tingkat Konsumsi)

Berdasarkan analisa data yang dikumpulkan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Departemen perdagangan sampai awal bulan Desember 2006, median harga bulanan sebagian besar pangan pokok di tingkat konsumen di Jawa dan Bali, yaitu beras, jagung pipilan, kacang tanah, minyak goreng, daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras, cenderung naik, sedangkan kedelai, gula pasir, cabe merah dan bawang merah, cenderung turun dibandingkan median harga pada bulan sebelumnya.

Dari bulan Januari sampai bulan desember 2006 fluktuasi kenaikan harga pangan cukup variatif, yaitu harga beras IR I naik 10.49 persen, beras IR II naik 15.90 persen, jagung pipilan naik 6.28 persen, gula pasir lokal naik 7.05 persen, gula pasir impor naik 7.08 persen, kacang tanah naik 5.58 persen, minyak goreng naik 7.71 persen, daging sapi naik 8.28 persen, daging ayam ras naik 25.68 persen dan telur ayam ras naik 12.73 persen. Kisaran median harga harian beras IR I antara Rp.4.134-Rp.4.727/Kg, Beras IR II Rp.3.904-Rp.4.300/kg, jagung pipilan antara Rp.2.345-Rp.2.881, gula pasir lokal

antara Rp.5.656-Rp.6.117, gula pasir impor Rp.4.500-Rp.5.000, kacang tanah Rp.7.950-Rp.8.882/kg, minyak goreng Rp.4.809-Rp.5.624, daging sapi Rp.44.957-Rp.44.288/kg, daging ayam Rp.12.673-Rp.17.382/kg dan telur ayam ras Rp.7.264-Rp.8.479/kg.

Penurunan harga terjadi pada komoditas kedelai (lokal) turun 4.49 persen, kedelai (impor) turun 10.90 persen, cabe merah biasa turun 65.29 persen, cabe merah keriting turun 50.07 persen dan bawang merah turun 15.97 persen. Kisaran median harga harian yaitu: kedelai lokal Rp.4.700-Rp.5.000/kg. Kedelai impor Rp.4.500-Rp.5.000/kg. cabe merah biasa Rp.4.907-Rp.11.917/kg, cabe merah keriting Rp.6.093-Rp.13.880/kg, dan bawang merah Rp.5.184-Rp.10.596/kg.

Trend perkembangan periode Januari s/d Desember 2006 secara kumulatif menunjukkan bahwa median harga beberapa bahan pangan pokok strategis di Jawa dan Bali, yaitu beras, jagung pipilan, gula pasir, kacang tanah, minyak goreng, daging sapi, daging ayam dan telur ayam ras mengalami kenaikan. Sedangkan harga kedelai, cabe merah dan bawang merah mengalami penurunan.

7.2.3. Situasi Konsumsi

Pada tahun 2005, kualitas konsumsi penduduk sudah semakin baik, ditunjukkan oleh keragaman konsumsi pangan penduduk yang mendekati skor mutu konsumsi sesuai pola pangan harapan (PPH) yang beragam bergizi dan seimbang sebesar 79,1. Skor PPH yang dicapai pada tahun 2005 tersebut lebih besar dibandingkan skor PPH tahun 2002 sampai 2004. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan sudah mengalami peningkatan.

Walaupun skor PPH tahun 2005 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya namun tingkat konsumsi energi pada rumah tangga tahun 2005 masih dibawah rekomendasi WKNPG (2000 Kkal/kap/hari) dan belum merata keseluruhan propinsi. Komposisi keragaman konsumsi energi terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG), masih didominasi atau lebih dari 62,2 persen berasal dari kelompok padi-padian. Artinya kondisi ini masih berada di atas proporsi ideal sebesar 50 persen. Konsumsi beras nasional tahun 2005 turun 1,8 kg/kap/th, demikian juga untuk umbi-umbian dan gula, tetapi konsumsi untuk kelompok pangan hewani, sayur dan buah tahun 2005 naik dibanding tahun 2004. Berdasarkan prognosa Pola Pangan Harapan tahun 2006 sampai tahun 2015, diperkirakan

bahwa tahun 2006 skor PPH akan mengalami kenaikan menjadi 81,0 atau meningkat 2,7 % dari tahun 2005 dengan perkiraan konsumsi energi sebesar 1990 kkal/kap/hari. Akan tetapi berdasar hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2006, skor PPH mengalami penurunan menjadi 74,9 atau turun 5,43 persen dari tahun 2005 dengan konsumsi energi sebesar 1927 kkal/kap/hr. Penurunan kualitas konsumsi pangan penduduk tahun 2006 disebabkan oleh beberapa kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, serta retribusi melalui pajak dan subsidi.

Tabel. 7.10. Prognosa Pola Pangan Harapan Tahun 2006 – 2015

No	Kelompok Pangan	2006	2007	2008	2009	2010	2015
1	Padi-padian	58,8	57,8	56,8	55,8	54,9	50,0
2	Umbi-umbian	4,3	4,5	4,7	4,8	5,0	6,0
3	Pangan hewani	7,7	8,2	8,7	9,2	9,6	12,0
4	Minyak dan lemak	10,2	10,2	10,1	10,1	10,1	10,0
5	Buah/biji berminyak	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	3,0
6	Kacang-kacangan	3,7	3,8	4,0	4,1	4,3	5,0
7	Gula	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0
8	Sayur dan buah	4,5	4,7	4,7	5,0	5,2	6,0
9	Lain-lain	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	3,0
% AKG		99,52	99,57	99,62	99,68	99,73	100,00
Proyeksi Konsumsi Energi		1990	1991	1992	1994	1995	2000
Proyeksi Skor PPH		81,0	83,1	85,2	87,3	89,4	100,0

Tabel. 7.9. Rata-rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Tahun 2005-2006

No	Kelompok Pangan	Tahun 2005				Tahun 2006			
		Gram	Energi	% AKG	Skor PPH	Gram	Energi	% AKG	Skor PPH
1	Padi-padian	319	1241	61.8	25.0	316	1224	61.2	25.0
2	Umbi-umbian	60	73	3.6	1.8	51	61	3.1	1.5
3	Pangan hewani	87	139	6.8	13.9	82	129	6.5	12.9
4	Minyak dan lemak	22	199	9.9	5.0	22	196	9.8	4.9
5	Buah/biji berminyak	9	51	2.5	1.0	8	45	2.2	1.0
6	Kacang-kacangan	25	67	3.4	6.7	26	66	3.3	6.6
7	Gula	29	99	4.9	2.5	24	89	4.4	2.2
8	Sayur dan buah	223	93	4.6	23.3	205	83	4.2	20.8
9	Lain-lain	49	35	2.3	0.0	40	33	1.7	0.0
			1997	99.8			1927	96.4	
					79.1				74.9

Sumber : Susenas 2005 & 2006

Berdasarkan peta kerawanan pangan (Food Insecurity Atlas) Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 100 kabupaten rawan pangan yang tersebar di 23 propinsi, dengan rincian 30 kabupaten prioritas 1, 30 kabupaten prioritas 2 dan 40 kabupaten prioritas 3. Kelompok rawan pangan prioritas 1, 2 dan 3 menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapatkan prioritas khusus dalam penanganan masalah kerawanan pangan. Sedangkan sisanya (165 kabupaten) masuk dalam kelompok tahan pangan (prioritas 4,5 dan 6), dengan rincian 50 kabupaten prioritas 4, 50 kabupaten prioritas 5 dan 65 kabupaten prioritas 6.

Dalam rangka penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan tersebut dilaksanakan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan, merupakan kegiatan yang dilaksanakan di Desa Rawan Pangan dengan fokus kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 4 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penumbuhan, tahap pengembangan dan tahap kemandirian. Pada tahun 2005 pelaksanaan program aksi mandiri pangan dilaksanakan di 9 propinsi sebagai pilot project, yaitu : Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, NTB dan Sulsel.

Pada tahun 2006 pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan dilaksanakan pada 122 Kabupaten di 33 propinsi. Sampai bulan desember 2006 kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu tahap persiapan yang meliputi: seleksi lokasi sasaran, pendataan dan pemetaan kondisi awal penerima manfaat, kelembagaan masyarakat dan pelayanan pendukung, termasuk prasarana lain ; sosialisasi program; pelatihan dan rekrutmen tenaga pendamping.

7.2.4. Kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP)

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) sesuai Inpres Nomor 13 Tahun 2005 (sebelumnya Inpres Nomor 2 Tahun 2005), Departemen Pertanian dengan dukungan DPR-RI telah mengalokasikan Dana Penguatan Modal

Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) sejak tahun 2003. DPM berupa dana talangan tanpa bunga dari APBN yang disalurkan kepada LUEP untuk membeli gabah/beras petani pada saat panen sesuai HPP. Selama periode 2003–2006 alokasi DPM-LUEP berturut-turut adalah sebagai berikut: tahun 2003 sebesar Rp. 162,19 milyar (15 provinsi), tahun 2004 sebesar Rp. 161,55 milyar (19 provinsi), tahun 2005 sebesar Rp. 99,92 milyar (19 provinsi) dan tahun 2006 meningkat sebesar Rp. 239,20 milyar (25 provinsi). Dari alokasi DPM tersebut yang telah dicairkan pada tahun 2003 sebesar Rp. 159,69 milyar (98%), tahun 2004 sebesar Rp. 160,73 milyar (99 %), tahun 2005 sebesar Rp. 89,93 milyar (90 %), dan tahun 2006 sebesar Rp. 224,68 milyar (94 %)

Pada tahun 2003 pelaksanaan kegiatan DPM-LUEP di 15 provinsi tersebut mencakup 121 kabupaten/kota dan melibatkan sebanyak 1.149 LUEP. Pada tahun 2004 alokasi DPM menurun namun jumlah provinsi dan kabupaten/kota pelaksana DPM-LUEP meningkat menjadi 19 provinsi dan 145 kabupaten/kota dengan melibatkan 1.328 LUEP. Selanjutnya pada tahun 2005 alokasi DPM mengalami penurunan kembali sehingga jumlah kabupaten/kota pelaksana DPM-LUEP juga mengalami penurunan menjadi 125 kabupaten/kota dengan melibatkan sebanyak 843 LUEP. Sedangkan pada tahun 2006 adanya kenaikan DPM diimbangi pula dengan peningkatan jumlah kabupaten/kota penerima DPM sebanyak 176 kabupaten/kota dan 1.573 LUEP. Apabila diasumsikan bahwa setiap LUEP dapat melibatkan minimal 9-10 petani dari beberapa kelompok tani maka diperkirakan selama empat tahun berturut-turut jumlah petani yang terlibat dalam kegiatan DPM-LUEP ini mencapai tidak kurang dari 11 ribu, 13 ribu, 8 ribu, dan 58 ribu petani.

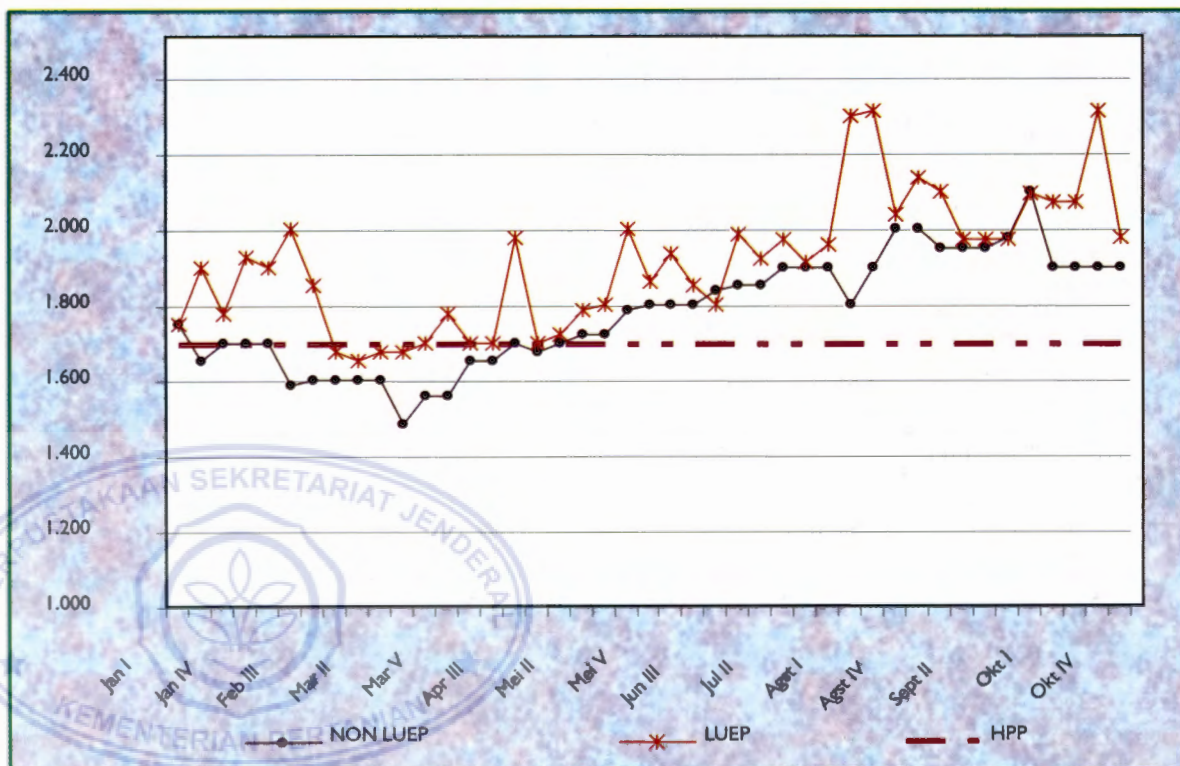
Dari alokasi DPM yang telah dicairkan, selama periode 2003 - 2006 telah direalisasikan pembelian gabah/beras dengan nilai sebagai berikut: (i) tahun 2003 nilai pembelian terhadap pencairan mencapai 376 persen, (ii) tahun 2004 meningkat menjadi 397 persen, (iii) tahun 2005 menurun menjadi 339 persen, dan (iv) tahun

2006 meningkat menjadi 570 persen. Dari pembelian gabah/beras tersebut pada tahun 2003 telah dilakukan penjualan gabah/beras sebesar 88 persen, tahun 2004 penjualan gabah/beras meningkat menjadi 96 persen, tahun 2005 meningkat lagi menjadi 99 persen, dan tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 96 persen.

Selama periode 2003 – 2006 LUEP tidak hanya menjual gabah/beras ke Divre/Sub Divre Perum Bulog di provinsi maupun kabupaten tetapi juga menjual ke pasar umum. Pada tahun 2003 LUEP yang menjual ke Divre/Sub Divre Perum Bulog sebanyak 52 persen kemudian berturut-turut menurun pada tahun 2004 menjadi 30 persen, pada tahun 2005 sebesar 27 persen, dan pada tahun 2006 hanya sebesar 4 persen. Sebaliknya penjualan gabah/beras ke pasar umum semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa LUEP-LUEP tersebut efektif dalam membantu petani/kelompok tani dalam memperbesar pasar penjualan gabah/berasnya.

Untuk mengetahui dampak kegiatan DPM-LUEP tahun 2006 terhadap stabilitas harga di wilayah telah dilakukan pemantauan harga gabah setara GKP di tingkat petani di provinsi pelaksana DPM-LUEP. Pemantauan dilakukan secara mingguan di 63 kabupaten yang terdiri dari 130 lokasi wilayah kerja LUEP dan bukan wilayah kerja LUEP. Informasi yang diperoleh sampai dengan minggu keempat Oktober 2006, perkembangan harga gabah setara GKP tingkat petani baik di lokasi wilayah kerja LUEP cenderung meningkat selama bulan Januari – Februari 2006 dan berfluktuasi selama bulan Februari – Oktober 2006. Sejak minggu kesatu Januari – minggu ketiga Juni 2006, harga gabah tingkat petani di lokasi-lokasi wilayah kerja LUEP lebih tinggi dibandingkan harga gabah di lokasi-lokasi bukan wilayah kerja LUEP, dan sempat lebih rendah pada minggu keempat Juni 2006. Harga gabah tingkat petani di lokasi yang merupakan wilayah kerja LUEP juga cenderung berada di atas HPP pada minggu kesatu Januari – minggu kesatu Februari 2006 dan bergerak kembali di atas HPP pada minggu kedua Mei hingga akhir Oktober 2006 (Grafik 7.1.).

Grafik 7.4. Perkembangan Harga GKP Tk. Petani di Wilayah Kerja LUEP dan Non LUEP Januari-Oktober 2006



7.2.5. Pengembangan Pasar

A. PASAR DOMESTIK

1. Pengendalian Impor Beras dan Substitusi Impor Beras Ketan.

Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan telah mengimplemen tasikan kebijakan pelarangan impor beras mulai tahun 2004 (SK Memperindag No. 9/MPP/Kep/I/2004 dan No. 442/M-DAG/6/2005). Kebijakan tersebut telah berdampak positif terhadap perkembangan perberasan nasional, yang antara lain:

- (1) Pada tahun 2003 pangsa pasar beras domestik di PIBC 81,11% maka pada tahun 2004 meningkat menjadi 98,15% dan tahun 2005 mencapai 99,64% (data Juli 2005);
- (2) Harga gabah meningkat cukup signifikan pada tahun 2005 mencapai rata-rata Rp. 1.410,-/kg dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu Rp. 1.213,-/kg;

Dampak Kebijakan dari Aspek Ekonomi, antara lain :

- (1) Penghematan Devisa. Apabila rata-rata jumlah impor beras sebesar 1,5 juta ton dan TBM beras sebesar Rp. 450/kg, maka devisa yang harus dibayar sebesar 1,5 juta x 260 USD = 390 juta USD = Rp. 3,7 T. Kehilangan pendapatan dari tarif Rp. 450 x 1,5 juta ton = 675 M, sehingga masih ada penghematan devisa sebesar Rp. 3,03 T .
- (2) Peningkatan pendapatan petani (BPS). Berdasarkan data BPS kenaikan harga GKP sebesar Rp. 271,15/kg sehingga penerimaan GKP naik sebesar Rp. 271,15/kg x 62,35 juta ton GKP = Rp. 16 T; penerimaan beras naik sebesar Rp. 336 X 32 juta ton = Rp. 10,75T; dan selisih jumlah kenaikan yang dinikmati petani = Rp. 6 T. Hal ini berdampak pada uang yang beredar di pedesaan semakin banyak dan aktivitas ekonomi di perdesaan semakin meningkat. Sedangkan berdasarkan data lapangan kenaikan harga GKP Rp. 1000/kg menjadi Rp. 1.600/kg, sehingga kenaikan Penerimaan GKP : Rp. 600 x 62,35 juta ton GKP = Rp. 37,41 T; kenaikan harga beras Rp. 2.700/kg menjadi Rp. 3.000,- dan kenaikan penerimaan beras Rp. 300 x 32 juta ton = Rp 9.6 T.

- (3) Pendapatan per KK Petani. Apabila kenaikan pengeluaran utk konsumsi beras 5 org x 113,5 x Rp. 336 = Rp. 190.680,-/tahun; dan kenaikan pendapatan dari penjualan gabah Rp. 271,15 x 0,3 ha x 4.600 kgx 2 musim = Rp. 748.374,-/tahun sehingga terdapat kenaikan pendapatan petani sebesar Rp. 557.694,-/tahun.

Implementasi ketentuan impor beras berupa larangan impor beras termasuk ketan didalamnya telah membuka peluang pengembangan produksi ketan nasional khususnya untuk memenuhi bahan baku industri (besar dan kecil) yang kebutuhannya mencapai 150.000 ton/tahun. Dengan tingkat produktivitas rata-rata ketan nasional sebesar 3 ton/ha maka diperlukan luasan lahan budidaya ketan sebesar 50.000 ha. Saat ini di Propinsi Jawa Barat telah berkembang budidaya ketan seluas 1645 Ha, sementara untuk propinsi lainnya belum dapat diketahui secara pasti. Pengembangan kemitraan agribisnis ketan antara petani-penggilingan padi-industri berbahan baku ketan telah dirintis di Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain itu pada tahun 2006 dilakukan pengembangan model industri beras berlabel dan beras ketan subsidi impor serta revitalisasi penggilingan padi.

Pada tahun 2006 telah dikeluarkan kebijakan perpanjangan pengaturan impor beras s.d. Desember 2006 yang telah berdampak positif pada harga gabah yang di atas HPP yaitu sebesar Rp. 2.100,-/ kg GKP dan Rp. 2.430,- GKG; serta pengaturan impor beras jenis tertentu (beras ketan, pecah 100% dan beras untuk kesehatan) dengan rekomendasi Ditjen PPHP yang diatur dengan Surat Menperindag No. 649/M-DAG/7/2006.

2. Kebijakan Penghapusan PPN

Pengenaan PPN yang antara lain bertujuan untuk menguatkan struktur ekonomi dalam rangka memastikan pencapaian pembangunan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesempatan berusaha dan



Gambar 7.5 Pasar

lapangan kerja. Khusus kelompok paket insentif ekonomi di bidang pertanian, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu dirumuskan dengan baik karena menyangkut masyarakat kecil atau para produsen pertanian antara lain meliputi PPN, distribusi dan perdagangan/pemasaran.

Pada tahun 2005 telah dilakukan penyusunan RUU PPN yang telah disampaikan kepada DPR dan difinalisasi pada tahun 2006. Adapun komoditas yang perlu ditentukan jenisnya untuk tidak dikenakan PPN adalah :

Tanaman Pangan : Padi (jerami, merang, gabah, beras, menir, katul, sekam); Jagung (tongkol, pipilan); Kedelai; Kacang Tanah (gelondongan, kupas); Kacang hijau; Kacang-kacangan lainnya; Ubi kayu (basah, gaplek dll); Ubi jalar; Umbi-umbian lainnya.

Peternakan : Ternak besar (sapi, kerbau, kambing, domba, babi dll); Ternak kecil/unggas (kelinci, ayam, itik, burung dll); Produk ternak (daging, telur, susu, kulit, tulang, bulu, darah dll).

3. Pengembangan Terminal Agribisnis dan Sub Terminal Agribisnis (TA/STA)

Tujuan pengembangan TA/STA adalah meningkatkan efisiensi pasar, memperkuat posisi rebut tawar petani, sumber informasi harga, meningkatkan nilai tambah produk, menambah segmentasi pasar, meningkatkan mutu dan sanitasi pasar, pembinaan pelaku pasar, serta

pengendali pasokan. Pada tahun 2004 telah ditumbuhkan 2 TA dan 27 STA di 15 Propinsi. Pada tahun 2005 konsep TA/STA telah diadopsi dengan baik oleh Pemerintah Daerah, hal ini dapat dilihat dari tumbuhnya beberapa TA/STA yang dibiayai dari APBD. Pada tahun 2005 telah operasional 6 TA dan 29 STA dan pada tahun 2006 dilakukan optimalisasi dan pengembangan 8 TA dan 56 STA di 23 Propinsi yang berbasis GAPOKTAN.

4. Pelayanan Informasi Pasar (PIP)

PIP merupakan suatu sistem layanan informasi agribisnis di dalam mendukung kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang terintegrasi, terorganisasi, akurat dan terkendali serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari Website Agribisnis Indonesia Online. Berkembangnya kebutuhan dan tuntutan akan informasi terutama dalam hal pemasaran produk dari petani dan permintaan produk secara cepat, tepat dan lengkap maka kinerja PIP sekarang perlu ditingkatkan dan diarahkan tidak hanya sebagai pengumpul, pencatat dan pengirim data tetapi sebagai pusat informasi pemasaran produk pertanian strategis di wilayahnya. Pada tahun 2006 telah dilakukan pengembangan informasi harga melalui SMS untuk mengakomodasi pengelolaan data informasi pasar gabah dan beras.

5. Revisi Keputusan Menhutbun No. 627/Kpts.II/1998

Upaya meningkatkan posisi tawar petani sawit, telah dilakukan revisi terhadap SK Menhutbun No. 627/1988 sejak tahun 2005. Hasil ini berupa diterbitkannya Permentan No. 395/Kpts/OT.140/11/2006. Kemudian dalam rangka menindaklanjuti tentang kebijakan penentuan harga TBS sebagaimana tertuang dalam Permentan No. 395/Kpts/OT.140/11/2006, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemantauan implementasi dari kebijakan tersebut. Dalam kaitan tersebut telah dilakukan rapat koordinasi di wilayah Kalimantan dan Sumatera sebagai sentra produksi kelapa sawit. Dari kegiatan tersebut telah terjadi kesepahaman dalam penentuan harga TBS dan telah dirumuskan upaya-upaya untuk

mengimplemtrasikan penentuan harga TBS agar kedua belah pihak yang berkepentingan (petani produsen dan pabrik pengolah kelapa sawit) memperoleh manfaat dan keuntungan yang proposional.

6. Identifikasi Farm Gate Unggulan

Berdasarkan klasifikasi identifikasi STA, maka untuk mengoptimalkan pemanfaatan kinerja STA agar dapat melakukan transaksi pemasaran di tingkat kelompok tani/ gapoktan (transaksi maupun lelang) akan dilakukan optimalisasi dengan penguatan kelembagaan kelompok tani dan pendampingan dikaitkan dengan program Pengembangan Komoditas Strategis Nasional (PKSN) 12 komoditas yaitu beras berlabel (Karawang dan Cianjur), beras ketan (Subang dan Garut), ubi kayu (Lampung), bunga (Jakarta dan Surabaya), jagung (Jeneponto dan Malang), susu sapi (Sukabumi), pasar ternak sapi modern dan hortikultura (Semarang), kakao (Polewali dan Tabanan), kelapa (Ciamis), jarak pagar (Gorontalo) dan jeruk (Sambas).

B. PASAR INTERNASIONAL

1. Harmonisasi Tariff

Impor beberapa produk hortikultura dan produk strategis dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini mengakibatkan rendahnya posisi tawar produk lokal. Dalam rangka melindungi produk domestik, sejak 1 Januari 2005 tarif produk pertanian, khususnya yang masuk kategori sensitif dan strategis, dinaikkan menjadi Rp.450/kg untuk beras, Rp.550/kg untuk gula mentah, Rp.790/kg untuk gula putih, 5% untuk jagung, dan 25% untuk mangga, jeruk mandarin, kentang, bawang merah, wortel, anggrek dan paha ayam (CLQ). Kenaikan tariff ini berlaku hingga tahun 2008, dan secara bertahap akan menjadi 19 % pada tahun 2010, kecuali untuk beras, gula mentah dan gula putih.

Pemberlakuan harmonisasi tariff beberapa komoditi tersebut telah menyebabkan kecenderungan penurunan impor pada tahun 2005 dibandingkan pada tahun 2004 pada periode yang sama terutama untuk

komoditi beras, gula pasir mentah, wortel, mangga dan jeruk mandarin segar. Penerapan tarif dimaksud selalu dimonitoring dampak dan perkembangannya.

2. Kebijakan Tarif Alsintan

Program harmonisasi tarif kelompok produk alsintan, dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain; a) harga produk alsintan impor yang jauh lebih murah, b) umur teknis produk alsintan lebih pendek, c) suku cadang produk alsintan impor sulit didapatkan, dan d) seringnya produk alsintan impor tidak dilengkapi uji kelayakan laboratorium maupun kelayakan multi-lokasi, sehingga aplikabilitasnya di lapangan menurun. Selain itu, program harmonisasi tarif produk alsintan juga mempertimbangkan kepentingan pertanian dan industri secara seimbang, karena peningkatan tarif yang terlalu tinggi dapat dimanfaatkan oleh industri alsintan dalam negeri untuk meningkatkan harga jual, sehingga akan merugikan petani/pertanian. Mengingat semua produk alsintan telah dapat diproduksi di dalam negeri dan produk alsintan tersebut telah diperjuangkan dan dicapai kesepakatan sebesar 7,5% dengan akselerasi menurun hingga 5% pada tahun 2010.

3. Kebijakan Tarif Pungutan Ekspor (PE) CPO

Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dan memberikan insentif yang lebih baik pada industri pengolahan TBS dan CPO maka perlu diperjuangkan pengurangan / penghapusan penerapan pungutan pajak ekspor (PE) CPO dan produk derivatifnya. Sehubungan dengan hal tersebut telah berhasil dipertahankan penerapan PE TBS pada tingkat 3% guna menghambat ekspor TBS dan peningkatan bahan baku untuk industri pengolahan kelapa sawit. Pada tahun 2005 telah diperjuangkan dan disepakati penurunan tarif Pungutan Ekspor (PE) untuk (CPO) dari 3% menjadi 1,5% dengan standar harga FOB dan produk derivatifnya dari 0,5 % menjadi 0,3 %. Kendati demikian sesuai dengan permintaan pemangku kepentingan, pada waktu yang akan datang akan diperjuangkan penerapan PE CPO dari 1,5 % menjadi 1 % dan produk derivatifnya dari 0,3 % menjadi 0 %.

4. Kerjasama Komoditi

Dalam rangka peningkatan ekspor komoditas pertanian telah dilakukan kerjasama komoditi antara lain :

- a. Kerjasama bilateral Indonesia – Malaysia, di bidang komoditi Kelapa Sawit, Kakao dan Lada telah membuahkan hasil antara lain : Kesepakatan yang telah dibuat adalah :
 - Management supply untuk pengembangan biodiesel dan biofuel di masing-masing negara ;
 - Alokasi dana untuk mengatasi kampanye negatif anti CPO yang dapat merugikan ekspor CPO dari kedua negara;
 - Ditandatanganinya MOU Indonesia-Malaysia untuk kelapa sawit dengan dampak pada kenaikan harga sawit sampai dengan US\$ 500/Ton.
 - Kerjasama mengatasi tarif dan non tarif barrier oleh negara ketiga untuk komoditi kakao dan lada;
 - Meningkatkan kerjasama swasta Malaysia-Indonesia untuk meningkatkan investasi di Industri hilir kakao.
- b. International Tripartite Rubber Cooperation (ITRC) Kesepakatan yang telah dibuat adalah Kesepakatan management supply dan ekspor karet alam oleh ketiga negara anggota (Indonesia, Malaysia dan Thailand) hingga tahun 2020 dalam rangka menjaga keseimbangan harga karet alam internasional (diatas referente price).
- c. Trilateral Cooperation on Market Access for Horticultura and Palm Oil Products Kesepakatan yang telah dibuat adalah Belanda menyetujui pemberianteknicalassistance(Training, Survey dan Field Testing) kepada Indonesia dalam rangka memelihara dan meningkatkan akses pasar ke Eropa melalui Belanda.
- d. Kerjasama regional antara lain :
 - a) ASEAN Cocoa Club : Negara ASEAN sepakat untuk meningkatkan perdagangan Kakao intra ASEAN countries dan memperkuat posisi bersama dalam pasar global melalui perumusan ASEAN Cocoa Contract, Harmonisasi Mutu dan Harmonisasi Tarif.
 - b) ICO (International Coffee Organization). Kesepakatan yang telah dibuat adalah:

- Mengupayakan peningkatan konsumsi kopi domestic di negara produsen kopi;
- Negara produsen kopi berupaya untuk mencegah diterapkannya MRL yang diajukan oleh importer Eropa;
- Informasi Market Outlook untuk Kopi ;
- Evaluasi International Coffee Agreement 2001.
- c) IPC (International Pepper Community). Perkembangan hingga saat ini adalah pembahasan perkembangan supply, demand dan harga serta upaya mengatasi permasalahan perdagangan termasuk dari aspek mutu.
- d) International Rubber Study Group (IRSG). Perkembangan hingga saat ini adalah adanya keinginan masyarakat konsumen karet alam untuk mengembangkan perdagangan karet alam ramah lingkungan, namun hal ini ditolak oleh negara-negara produsen. Selain itu informasi tentang Prospek Pengembangan Karet alam dunia sangat diperlukan.
- e) APCC (Asia Pacific Coconut Community). Hingga saat ini masih dilakukan pembahasan perkembangan supply, demand dan harga serta upaya mengatasi permasalahan perdagangan produk-produk kelapa termasuk di dalamnya perbaikan teknologi, mutu dan lain-lainnya.

5. Kerjasama Indonesia Jepang

Dalam rangka meningkatkan pangsa ekspor komoditas pertanian ke Jepang telah dilaksanakan Economic Partnership Agreement antara Indonesia Jepang. Sampai saat ini pembahasan Trade in Good telah mencapai 80%.

7.3. INFRASTRUKTUR DAN PENGOLAHAN HASIL

7.3.1. Pendayagunaan Sumberdaya Lahan dan Air Pertanian

Sejak tahun anggaran 2005 telah diambil suatu kebijakan bahwa pelaksanaan konstruksi infrastruktur pertanian khususnya untuk kegiatan pengelolaan lahan dan air, sejauh tidak memerlukan teknologi canggih dan alat-alat berat, dilakukan melalui pengembangan program padat karya produktif (PPKP). Pengembangan Program

Padat Karya Produktif yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 masih terbatas pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi desa (JIDES) dan jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) di 5 propinsi yaitu propinsi NAD, Sumatera Utara, NTB, NTT dan Kalimantan Selatan.

Pada tahun anggaran 2006, PPKP telah diperluas mencakup 9 jenis kegiatan pengelolaan lahan dan air yaitu rehabilitasi jitut, rehabilitasi jides, pengembangan embung, pengembangan sumur resapan, pembuatan dam parit, pengembangan jalan usaha tani (JUT), optimasi lahan, konservasi lahan serta reklamasi lahan dan dilaksanakan di seluruh propinsi, kecuali propinsi DKI.

Kebijakan ini disamping merupakan wujud kepedulian dan keberpihakan pemerintah terhadap petani dan buruh tani juga merupakan upaya untuk menempatkan petani sebagai pelaku atau subyek pembangunan. Diharapkan dengan kebijakan ini akan menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan infrastruktur pertanian yang telah mereka bangun. Disamping itu dengan adanya pengembangan program padat karya produktif akan membuka lapangan kerja baru bagi para petani maupun buruh tani pada saat tidak ada kegiatan atau pekerjaan yang berarti di lahan usahanya ("off season job opportunity").

Jenis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian melalui PPKP TA 2006. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian yang dikerjakan melalui program padat karya produktif adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT).

Scheme irigasi dari JITUT meliputi irigasi teknis, semi teknis maupun sederhana yang fungsi dan kinerjanya mengalami penurunan sehingga perlu upaya rehabilitasi baik untuk saluran tersier, subtersier, maupun kuarter. Bentuk kegiatannya berupa: Pembersihan saluran, sehingga saluran bebas dari tumbuhan gulma atau rumput liar (canal vegetation) maupun kotoran-kotoran sampah yang dapat menghambat dan membuat rintangan bagi aliran air pada saluran tersebut, Pengerukan saluran yang mulai mendangkal karena sedimentasi lumpur,

Perbaikan saluran-saluran yang bocor dan rembes karena terbentuknya lobang-lobang pada tanggul saluran, akibat aktivitas binatang tanah (tikus, kepinding), ternak maupun ulah manusia sendiri, Perbaikan saluran-saluran yang longsor pada badan saluran, baik karena erosi maupun laju aliran air yang terlalu deras, Memperkuat dan menstabilkan urugan penampang saluran (tanggul), Perbaikan talud saluran, sehingga bentuk dan dimensinya dapat disesuaikan dengan persyaratan teknisnya, Perbaikan dan pembuatan bangunan terjunan dengan menggunakan bahan sederhana yang mudah diperoleh ditempat tersebut, Perbaikan, pembersihan dan penstabilan jalan usaha tani di sepanjang saluran irigasi, Perbaikan dan pembuatan gorong-gorong, bangunan bagi, siphon / talang dll, Lining saluran, sejauh materialnya tersedia. Jumlah hari orang kerja yang disediakan 30 HOK/ha dengan unit cost Rp 25.000.- /HOK.

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES).

Jenis-jenis kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi mirip dengan kegiatan rehabilitasi JITUT dan bila diperlukan dapat dilakukan perbaikan bangunan penangkap air, baik berupa bendung dan pengambilan bebas lainnya serta bangunan kelengkapannya. Jumlah hari orang kerja yang disediakan 45 HOK/ha dengan unit cost Rp 25.000.- /HOK.

3. Pembuatan bangunan konservasi lahan.

Bentuk kegiatannya dapat berupa: Pembersihan dan penyiapan lahan, Pembuatan lubang tanaman tahunan baik untuk tanaman buah-buahan, pangan (misalnya sukun), ataupun tanaman perkebunan, Pembuatan teras atau gulud yang tergantung pada kondisi kemiringan, jenis tanah, kedalaman tanah setempat dll, Pembuatan saluran pembuang, Pembuatan rorak ("silt pit") atau got buntu dll. Jumlah hari orang kerja yang disediakan 80 HOK/Ha dengan unit cost Rp. 25.000,- /HOK

4. Pembuatan sumur resapan.

Bentuk kegiatannya dapat berupa: Pembuatan lubang sumur sampai kedalaman lapisan aquifer, Penimbunan dan pembuangan tanah, Pembuatan bak penyangk, Pembuatan saluran pemasukan dan pembuang, Pemasangan buis beton, Pembuatan dinding atau bibir

sumur dll, Jumlah hari orang kerja yang disediakan 100 HOK/unit dengan unit cost Rp. 25.000,- /HOK.

5. Pembuatan embung (farm pond).

Bentuk kegiatannya dapat berupa: Penggalan tanah dan penimbunan di sekeliling embung, Pembuatan saluran pemasukan dan pintu pembuang, Lining dinding dan lantai embung, Pemagaran embung dll. Jumlah hari orang kerja yang disediakan 1.000 HOK/unit dengan unit cost Rp. 25.000,- /HOK.

6. Pekerjaan Optimasi Lahan.

Bentuk kegiatannya dapat berupa: Pengolahan lahan/ penyiapan bidang olah, Perbaikan kesuburan lahan, Perbaikan jalan/ saluran/ gorong-gorong/ talang/ prasarana pertanian lain yang diperlukan, Perbaikan bangunan konservasi yang diperlukan. Jumlah hari orang kerja yang disediakan 80 HOK/ha dengan unit cost Rp. 25.000,- /HOK.

7. Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT).

Bentuk kegiatannya dapat berupa: Perbaikan badan jalan, Perbaikan saluran kiri/kanan bahu jalan, Pembuatan gorong-gorong, Penanaman rumput penguat pada tebing jalan dan tebing saluran. Jumlah hari orang kerja yang disediakan 1.000 HOK/Km dengan unit cost Rp 25.000,- /HOK.

8. Pembuatan Dam Parit.

Bentuk kegiatannya berupa: Pembersihan parit / anak sungai/ sungai, Penggalan pondasi, Pembangunan bendung dan bangunan kelengkapannya. Jumlah hari orang kerja yang disediakan 600 HOK/unit dengan unit cost Rp 25.000,- /HOK.

9. Pembuatan Bangunan Reklamasi Lahan.

Bentuk kegiatan secara umum berupa: Land clearing dan land leveling, Rehabilitasi penahan banjir, Rehabilitasi jaringan pengaturan drainase, Pembuatan petak dan galengan sawah, Konstruksi teras dan bangunan penyadap air, Pembuatan teras dan guludan, Pembangunan pengendalian erosi dan sedimentasi, Pembuatan saluran dan buangan air, Pembuatan sumur renteng dan jaringan pengairan, Konstruksi system

surjan, Pengaturan bentuk lahan, Kegiatan ini tergantung pada tipologi lahan dan kebutuhan/jenis bangunan yang akan dibangun. Jumlah hari orang kerja yang disediakan 80 HOK/Ha dengan unit cost Rp 25.000,- /HOK.

Alokasi kegiatan pengelolaan lahan dan air pada TA. 2006 yang dilaksanakan secara padat karya produktif diperluas menjadi 9 jenis kegiatan dan mencakup seluruh propinsi di Indonesia, kecuali propinsi DKI Jakarta dengan total dana sebesar Rp 391.657.665.000,- atau 40% dari total dana untuk menunjang kegiatan pengelolaan lahan dan air serta dialokasikan sebagai dana Tugas Pembantuan (TP) ke Kabupaten dan Kota. Dari total dana tersebut sekitar 75% dalam bentuk belanja pegawai yaitu sebanyak Rp 269.908.798.000,- atau setara 10.796.352.000 HOK untuk membayar petani atau buruh tani yang bekerja pada kegiatan tersebut serta 25% atau sebesar Rp 121.748.867.000,- yaitu dalam bentuk belanja modal untuk pengadaan material maupun saprodi (tabel 7.10.).

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara padat karya produktif pada umumnya terlambat karena dana pendamping dari APBD II untuk pelaksanaan kegiatan persiapan baik berupa sosialisasi maupun survei penentuan calon lokasi dan calon lokasi terlambat cair. Disamping itu kegiatan tersebut umumnya akan dilaksanakan sebelum musim tanam Oktober-Maret sekitar bulan Agustus s/d September yaitu pada saat petani maupun buruh tani belum ada kesibukan di lahan usahatannya, sehingga pada saat ini kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut masih rendah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan lahan dan air melalui pengembangan program padat karya produktif memberikan dampak cukup nyata, baik dari aspek teknis, ekonomi maupun sosial. Dampak yang terjadi dari aspek teknis adalah adanya peningkatan produktivitas lahan maupun terjadinya perluasan areal tanam karena adanya peningkatan kinerja jaringan irigasi setelah direhabilitasi, adanya penambahan realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan secara padat karya dari target yang tercantum dalam DIPA dan adanya peningkatan kualitas pekerjaan karena petani merasa bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri,

Tabel 7.11. Target Fisik dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan secara Padat Karya Produktif TA. 2006.

No	Jenis Kegiatan	Volume	Dana (Rp 000,-)	HOK	Prop Terlibat	Kab Pelaksana
1	Rehab JITUT	103.717 Ha	101.826.000	3.054.747	22	228
2	Rehab JIDES	101.125 Ha	175.097.951	5.252.882	22	243
3	Peng. Embung	600 unit	30.000.480	600.003	21	168
4	Png.Sumur Resapan	475 unit	2.375.000	47.499	11	33
5	Pemb. Dam Parit	135 unit	4.077.500	81.549	14	54
6	Peng. JUT	566 Km	16.556.234	662.242	23	148
7	Optimasi Lahan	6.901 Ha	30.765.000	546.927	25	125
8	Konservasi Lahan	2.409 Ha	10.941.000	194.505	19	73
9	Reklamasi Lahan	4.449 Ha	20.018.500	355.881	13	42
	Jumlah	-	391.657.665	10.796.352	-	-

Dampak dari aspek ekonomi adalah adanya perputaran dana di perdesaan yang cukup banyak dari upah kerja yang didapat petani atau buruh tani dari keikutsertaan mereka dalam pelaksanaan padat karya sehingga dapat mengerakkan roda perekonomian di tingkat perdesaan, adanya peningkatan infrastruktur khususnya jalan usahatani, akan dapat menurunkan biaya transportasi sehingga secara langsung dapat meningkatkan pendapatan petani.

Sementara dampak dari aspek sosial adalah adanya peran serta petani atau buruh tani dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pertanian akan dapat meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab terhadap hasil pembangunan tersebut sehingga hasil pembangunan akan terjaga keberlanjutannya, adanya lapangan kerja baru bagi petani dan buruh tani, terutama pada musim bero.

Kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur pertanian melalui program padat karya produktif untuk kegiatan pengelolaan lahan dan air berdasarkan laporan sampai dengan bulan Desember 2006, rata-rata telah mencapai 74%. Kegiatan konservasi lahan paling tinggi realisasinya mencapai 100% yaitu seluas 3.077 Ha. Sedangkan kegiatan yang paling rendah realisasinya adalah optimasi lahan yang baru mencapai 51% yaitu seluas 3.548 Ha, hal ini terjadi karena mundurnya musim hujan sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami penundaan. Realisasi masing-masing kegiatan seperti tabel berikut

Tabel 7.12. Target Fisik dan Keuangan Kegiatan Padat Karya Tahun 2006

NO.	JENIS KEGIATAN	TARGET		
		Volume	Rp 000	HOK
1.	Rehab JITUT	107717 Ha	101,826,000	3,054,780
2.	Rehab JIDES	101125 Ha	175,097,951	5,252,939
3.	Pengembangan Embung	600 Ha	30,000,480	600,010
4.	Pegembangan Sumur Resapan	475 Ha	2,375,000	47,500
5.	Pembuatan Dam Parit	135 Ha	4,077,500	81,550
6.	Pengembangan JUT	566 Ha	16,556,234	662,249
7.	Optimalisasi Lahan	6901 Ha	30,765,000	546,933
8.	Konservasi Lahan	2409 Ha	10,941,000	194,507
9.	Reklasmasi Lahan	4449 Ha	20,018,500	355,884
JUMLAH			391,657,665	10,796,352

Tabel 7.12.a Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Padat Karya Tahun 2006

NO	JENIS KEGIATAN	REALISASI					
		Volume		Dana (Rp 000)		HOK	
		JML	%	JML	%	JML	%
1	Rehab JITUT (meter)	77,788 Ha	75.0	76,369,500	75.0	2,291,085	75.0
2	Rehab JIDES	74,833 Ha	74.0	129,572,484	74.0	3,887,175	74.0
3	Pengembangan Embung (unit)	480 Unit	80.0	24,000,384	80.0	480,008	80.0
4	Pengembangan Sumur Resapan	375 Unit	79.0	1,876,250	79.0	37,525	79.0
5	Pembuatan Dam Parit	105 Unit	78.0	3,180,450	78.0	63,609	78.0
6	Pengembangan JUT	389 Km	69.0	11,378,754	69.0	455,150	69.0
7	Optimalisasi Lahan	3,548 Ha	51.0	15,817,160	51.0	281,194	51.0
8	Konservasi Lahan	3,036 Ha	126.0	13,788,658	126.0	245,132	126.0
9	Reklasmasi Lahan	3,559 Ha	80.0	16,014,800	80.0	284,708	80.0
JUMLAH			74.0	291,998,440	75.0	8,025,586	74.0

Sumber : Laporan Kinerja 2006 Ditjen PLA

7.3.2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

A. Penanganan Pasca panen

1. Pengembangan Kecamatan Pasca Panen

Pengembangan Kecamatan Pasca Panen telah memberikan dampak yang signifikan pada kepedulian masyarakat tentang pasca panen dengan terbentuknya Forum Kecamatan Pasca Panen (FKPPP) dan penurunan kehilangan hasil yang bervariasi antar propinsi maupun wilayah yaitu 3-5% di beberapa propinsi, yaitu dari 20,51% menjadi 15%-17%. FKPP ini mengupayakan perubahan pada sistem agribisnis perberasan sehingga petani dapat menikmati keuntungan dari usaha tani dengan lebih transparan dan adil. Sebagai contoh dampak di Kecamatan Kepanjen antara lain tambahan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- s.d Rp Rp. 700.000,- / hektar/panen sebagai akibat perbaikan sistem tebasan dan peningkatan mutu beras, serta pengoptimalan pemanfaatan sarana pasca panen yang ada dan kemitraan dengan Lumbung Desa Modern (LDM). Pengembangan Kecamatan Pasca Panen Padi tahun 2004-2005 tersebar di 9 Propinsi, 12 Kabupaten/ Kota, 16 FKPP. Kemudian pada tahun 2006 dilakukan pengembangan KPP pada wilayah sentra produksi padi di 11 Propinsi sehingga secara kumulatif terbentuk 18 FKPP di 14 Kabupaten.

2. Optimalisasi RPH/ RPU

Untuk menghasilkan daging yang memenuhi persyaratan keamanan pangan yaitu daging yang ASUH, pada tahun 2004 telah dilakukan identifikasi terhadap Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dalam rangka optimalisasi pemanfaatan RPH dimaksud. Identifikasi ini telah ditindaklanjuti dengan optimalisasi 10 RPH di 10 Propinsi dan fasilitasi bantuan alat pengolahan pada RPH dan Rumah Potong Unggas (RPU) di beberapa propinsi seperti Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan pada tahun 2006 telah dilakukan fasilitasi kelengkapan alat penolakan pada RPH/RPU di Propinsi Banten dan Sumatera Barat serta magang dan pelatihan petugas RPH/RPU.

3. Pengembangan LM3

Dalam upaya peningkatan pendapatan melalui peningkatan nilai tambah hasil pertanian khususnya bagi Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), pada tahun 2006 telah difasilitasi Penguatan Modal Usaha Kelompok untuk 200 LM3 terpilih sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 468/Kpts/KU.210/8/2006 tentang penetapan LM3.

B. Mutu dan Standarisasi Pertanian

1. Penerapan Jaminan Mutu

Pada tahun 2005 telah disusun 2 (dua) Rancangan Revisi SNI yaitu Gula Kristal Putih dan Gula Kristal Mentah dan telah di prakonsensuskan Rancangan SNI produk hasil pertanian sebanyak 4 (empat) RSNI yaitu: kunyit segar sebagai bahan baku obat, simplisia kunyit sebagai bahan baku obat, birpletok dan puree mangga. Sedangkan pada tahun 2006 telah di prakonsensuskan Rancangan SNI VCO, Revisi 2 (dua) SNI yaitu kakao dan beras giling.

Dalam rangka penerapan jaminan mutu (HACCP) pada tahun 2005 telah disusun 2 SPO (standar prosedur operasional) komoditi hortikultura yaitu: SPO Buah Impor (SPO di tingkat importir, di tingkat gudang dan tingkat retail/pedagang dan) dan SPO RSNI temulawak. Selain itu telah dilakukan sertifikasi kepada 1 (satu) pelaku usaha hortikultura dan proses sertifikasi kepada 3 (tiga) pelaku usaha hortikultura.

Beberapa upaya penerapan jaminan mutu pada tahun 2006 antara lain telah difasilitasi penerapan jaminan mutu pada 4 pelaku usaha, disusunnya GMP produk pertanian, pelatihan 86 fasilitator mutu dan 99 auditor HACCP serta disusunnya konsep SK Mentan tentang penerapan Sistem Jaminan Mutu berdasarkan HACCP pada produk olahan pertanian.

2. Penetapan Jabatan Fungsional Pengawas

Mutu Hasil Pertanian

Dalam rangka perbaikan mutu hasil pertanian salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan peningkatan SDM mutu yaitu dengan upaya fasilitasi SDM mutu dengan

jalur jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian yang dirintis sejak tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan PerMenpan No. 17/MENPAN/4/2006 tentang Jabatan Mutu. Sedangkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya masih dalam tahap finalisasi.

7.4. SDM DAN REVITALISASI PENYULUHAN

Pemberlakuan otonomi daerah telah mengubah paradigma pembangunan pertanian yakni bergesernya pendekatan sentralistik menjadi pendekatan desentralistik dan dari pendekatan produksi menjadi pendekatan agribisnis. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diserahkan sepenuhnya ke kab/kota. Pemerintah Pusat dalam hal ini hanya berwenang untuk merumuskan kebijakan, norma, standar dan model-model penyuluhan partisipatif. Pada era otonomi daerah, pendekatan penyuluhan pertanian telah bergeser dari pendekatan “dipaksa” menjadi pendekatan partisipatif. Beberapa permasalahan penyuluhan pertanian pada era otonomi dari aspek kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan.

Pemberlakuan PP No.25/2000 dan PP No.8/2003 membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk mendirikan kelembagaan penyuluhan pertanian; Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi tidak jelas; Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kab/kota beragam; Dari 5.187 kecamatan yang ada, baru terbentuk 3.557 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

2. Aspek Ketenagaan.

Masih ada 2.742 tenaga honorer penyuluh yang belum diangkat menjadi PNS; Penyebaran tenaga penyuluh pertanian masih bias ke sub sektor pangan; Banyak terjadi alih status penyuluh pertanian dari jabatan fungsional ke jabatan struktural; Usia penyuluh pertanian sebagian besar di atas 50 tahun.

3. Aspek Penyelenggaraan.

Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan; Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip partisipatif; Kegiatan penyuluhan pertanian masih bersifat parsial dan belum didukung sarana dan prasarana yang memadai; Materi dan metode penyuluhan pertanian belum sepenuhnya mendukung pengembangan agribisnis komoditas unggulan di daerah; Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di lapangan.

4. Aspek Pendanaan.

Alokasi anggaran penyuluhan pertanian masih sangat terbatas; Dana operasional penyuluhan pertanian yang langsung kepada penyuluh tidak disediakan baik melalui APBN maupun APBD; Dana Alokasi Umum (DAU) untuk tunjangan fungsional penyuluh pertanian dan kegiatan penyuluhan pertanian terkadang dialihkan ke kegiatan lain; Kontribusi dana dari petani dan swasta relatif masih kecil.

Menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut, Departemen Pertanian mengambil langkah kebijakan untuk melakukan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Program Revitalisasi Penyuluhan Pertanian bertumpu pada 5 (lima) aspek pokok, yaitu aspek hukum, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan dan pendanaan. Aspek hukum berupaya untuk memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian baik secara nasional maupun lokalita (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa) melalui penerbitan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian yang kini berkembang menjadi Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Dari sisi aspek kelembagaan diupayakan untuk mengembangkan kelembagaan penyuluh pertanian yang mandiri di Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan serta menjadikan BPP sebagai basis peningkatan profesionalisme penyuluhan pertanian dan homebase para penyuluh pertanian di tingkat

kecamatan dan desa. Sementara dari sisi aspek keterampilan, berupaya untuk meningkatkan kuantitas tenaga penyuluh pertanian dengan menempatkan satu desa satu penyuluh serta meningkatkan kualitas dan spesialisasi tenaga penyuluh pertanian dengan mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan penjenjangan tenaga fungsional penyuluh pertanian.

Selanjutnya pada aspek penyelenggaraan berupaya: (1) menyusun program penyuluhan pertanian tingkat nasional yang menjadi pedoman bagi program penyuluhan di tingkat lokal; (2) membentuk tim verifikasi program penyuluhan pertanian di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan; (3) menata kembali penyuluhan pertanian dengan pendekatan partisipatif. Sedangkan dari aspek pendanaan berupaya menata kembali pembiayaan operasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pada tahun 2006 Departemen Pertanian melalui Badan Pengembangan SDM Pertanian terus berupaya memperkuat kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian melalui revitalisasi penyuluhan pertanian baik di tingkat Pusat maupun di 33 provinsi yang mencakup 436 kabupaten/kota dengan dukungan dana dekonsentrasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor: 211/Kpts./KU.510/5/2005 tanggal 4 Mei 2005, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dana dekonsentrasi Departemen Pertanian di masing-masing provinsi akan dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi kecuali NTT, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah dikelola oleh Badan Ketahanan Pangan yang juga mendapat titipan alokasi dana dekonsentrasi untuk kabupaten/kota di wilayah kerja masing-masing.

Sasaran kegiatan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah: (1) sejumlah 5.255 Balai Penyuluhan Pertanian; (2) 436 kabupaten/kota di 33 provinsi; (3) sejumlah 26.820 orang Penyuluh Pertanian. Sampai dengan bulan Agustus 2006, perkembangan pelaksanaan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian adalah sebagai berikut: Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Pengangkatan 1.634 orang tenaga penyuluh honorer yang telah bekerja diatas 10 tahun dan memiliki SK, sedangkan bagi 217 orang penyuluh honorer tanpa SK dan 891 tenaga honorer dibawah 9 tahun melalui testing; Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian yang diikuti di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan (BPP); Pendataan kembali penyuluh pertanian PNS sampai dengan bulan Agustus 2006 tercatat 26.885 orang; Penetapan 88 BPP Model di 6 (enam) provinsi binaan (Provinsi Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Gorontalo dan Sulawesi Selatan); Penyediaan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) sebesar Rp. 250.000,- per bulan bagi sekitar 26.820 penyuluh; Rencana penyediaan pinjaman modal usaha bagi 1.000 Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) di 17 provinsi melalui Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) sebesar Koordinasi/ forum penyuluhan pertanian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota Penyebaran informasi pertanian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten Kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat petani

7.5. AKSELERASI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN SERTA PENGEMBANGAN PRODUK TEKNOLOGI PERTANIAN

1. Program Rintisan Dan Akselerasi Pemasyarakatan Teknologi Inovasi (Prima Tani)

Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) adalah suatu konsep baru diseminasi teknologi yang dipandang dapat mempercepat penyampaian informasi dan teknologi inovasi yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian. Dengan menerapkan teknologi inovasi spesifik lokasi dan mengembangkan kelembagaan agribisnis, diharapkan dalam waktu lima tahun dapat terbangun agribisnis industrial pedesaan, yang mampu meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, menuju sistem pertanian yang sustainable dan lingkungan yang lestari. Dalam Prima Tani, pendekatan yang digunakan adalah: (a) agro-ekosistem, (b) agribisnis, (c) wilayah, (d) kelembagaan, dan (e) kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2005 mulai dilaksanakan kegiatan Prima Tani di 14 propinsi, meliputi 21 lokasi/desa laboratorium agribisnis. Propinsi tersebut adalah: Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sulteng, Sulsel, Kalbar dan Kalsel. Pada TA 2006 dilaksanakan penambahan lokasi (lab. agribisnis) di 11 propinsi, yaitu NAD, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, Kalteng, Kaltim, Sultra, Sulut dan DKI Jakarta. Pada umumnya Prima Tani diterima dan mendapat respon positif dari Pemerintah (terutama Kabupaten dan Kecamatan/Desa), antara lain dengan terbentuknya kerja sama di lapangan, dan 'sharing' dana atau in-kind (benih, bibit, ternak, dan alsintan) dari APBD setempat pada tahun 2005, dan komitmen untuk memberikan kontribusi dana pada tahun 2006 (kurang lebih Rp 10 M)

Sinkronisasi yang telah dilakukan oleh BPTP pelaksana Prima Tani di 14 Propinsi Tahun 2005 antara lain:

1. Jawa Barat: (a) Dukungan dana Pemda untuk perbaikan saluran BTT 10 senilai Rp.200 juta; (b) penempatan tenaga lapangan dan PPL sebanyak 5 orang; (c) pelaksanaan SLPHT oleh BPTPH; (d) penambahan ternak domba oleh Disnak Prop. Jabar; (e) bantuan satu unit bangunan klinik agribisnis oleh Pemda Kecamatan, (f) tahun 2006 dialokasikan dana Rp.150 juta untuk perbaikan saluran BTT 13, (g) penyediaan sarana produksi sebesar Rp.100 juta dari Distan;
2. Sumatera Selatan: (a) Fasilitasi/sinkronisasi oleh BAPPEDA Mura, (b) Pemasyarakatan VUB/VUTB 15 ha, penanganan pasca panen padi oleh Distan Mura, (c) Pembibitan sapi oleh Disnak, (d) pelaksanaan gropyokan tikus dan PHT oleh BPTPH;
3. Sulawesi Tengah: (a) Sekolah lapang teknologi pemupukan, OPT, TOT petugas teknologi budidaya kakao, bantuan pemeliharaan ternak babi dan perkandangan, temu usaha, bantuan protipe alsin dan petugas pendampingan, (b) Pendanaan dilakukan oleh Bappeda, Dishutbun, Distanak dan instansi lainnya masing-masing sebesar;
4. Sumatera Barat: (a) Penanaman hutan masyarakat, pembinaan budidaya kopi arabika, penanaman hutan nagari oleh Dishutbun dan BLPM, (b) modal kelembagaan dari Koperindag, (c) pemeliharaan ternak dan bagi hasil oleh Distanak;
5. Lampung: (a) Bangunan klinik agribisnis dan perbaikan jalan usahatani oleh Pemda Kecamatan senilai Rp.100 juta, (b) bantuan ternak kambing oleh Dinstan dan Distanak kabupaten lampung Timur senikar Rp.17 juta dan 100 ekor kambing dari BLM, (c) bantuan alat fermentasi dan pengeringan biji kakao oleh koperindag Kab. Lampung Timur senilai Rp.175 juta, (d) penyediaan BLM untuk ternak kambing dan saporodi oleh Dishutbun senilai Rp.12 juta, (e) pada tahun 2006 akan dilakukan perbaikan jalan desa pada lokasi Prima Tani senilai Rp.250 juta, (f) MOU dengan bank BNI, bank Syariah Mandiri lampung dan PT. Net Comodities Makmus Jaya;
6. Sulawesi Selatan: (a) Pembuatan posko klinik oleh Pemda Desa Kamanre senilai Rp.15 juta, (b) penguatan kelompok tani dan penyediaan alat pasca panen oleh Dishutbun senilai Rp.40 juta. Pada tahun 2006 dialokasikan Rp.200 juta;
7. Bali : (a) Pembangunan embung induk dan teknik senilai Rp 67 juta yang sebagian besar dibiayai swadaya masyarakat, (b) Pembangunan kandang dan tempat awetan pakan oleh swadaya masyarakat, (c) Peranan DPRD dalam membahas anggaran perubahan, (d) Bantuan 3 unit mesin pengolah limbah perkebunan oleh Disbun, 1 mesin penepung limbah perkebunan dari Bappeda dan bibit vanili 2000 batang isbunkab Buleleng, (e) Pemberdayaan lembaga penyedia sapi penggemukan oleh LSM;
8. NTB : Sosialisasi Primatani dan pembentukan jaringan eksternal;
9. Jawa Tengah: (a) Kesepakatan kerjasama pengembangan usaha berbasis ternak di Magelang dengan bantuan pendanaan dari Pemda Kabupaten sebesar Rp. 50 juta, (b) kesepakatan kerjasama pengembangan usaha berbasis jambu merah dengan pendanaan dari Pemda Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 170 juta;

10. Sumatera Utara : (a) Dukungan pendanaan dari Pemkab Tapanuli Utara untuk pengolahan lahan tidur 35 ha, bibit kentang Granola (G4) dalam bentuk BLM senilai 100 juta, (b) bantuan bibit kopi dari Disbun Propinsi 25 ha, dan (c) pelatihan dan magang petani dan PPL;
11. Jawa Timur : penyediaan input benih dan alsin dari Pemda Kabupaten;
12. NTT : pembentukan jaringan kerjasama dengan Bappeda dan memasukkan Prima Tani menjadi program Dinas;
13. Kalimantan Barat : melakukan penyesuaian dana pembangunan ditingkat kabupaten untuk mendukung kegiatan Prima Tani, diantaranya pengembangan PTT, penyediaan sapi PO, benih ikan, perbaikan infrastruktur senilai Rp 550 juta; dan
14. Kalimantan Selatan : dukungan Pemda Batola berupa bibit jeruk, saprodi dan biaya dukungan senilai Rp 170 juta.

Untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan Prima Tani tersebut, diperlukan upaya pemantapan kegiatan Prima Tani pada tahun 2006 di lokasi lama (2005) maupun di provinsi baru (2006). Upaya yang diperlukan dalam rangka pemantapan kegiatan Prima Tani pada provinsi baru adalah penyamaan persepsi melalui sosialisasi konsep dasar, pedoman umum dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Prima Tani serta panduan-panduan teknis lainnya. Sementara untuk provinsi yang lama (2005) diperlukan upaya pengembangan petunjuk teknis dalam pengembangan laboratorium agribisnis yang merupakan komponen penting dalam Program Prima Tani.

2. Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian

Dalam mengembangkan inovasi teknologi potensi Komoditas tahun 2005 – 2006 telah dihasilkan antara lain :

1. Tanaman Pangan: (1) Teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) untuk lahan kering (PTT padi gogo) dan lahan pasang surut, (2) Perbaikan teknologi PTT padi sawah, (3) PTT jagung pada sawah

tadah hujan dan irigasi terbatas dengan produktivitas 6 ton/ha dan 8 ton/ha biomas, (4) Teknologi pascapanen yang dapat mencegah aspergillus flafus (penyebab aflatoxin dan kumbang bubuk), (5) Varietas Unggul Baru kacang tanah tahan aflafus, dan (6) Teknologi PTT kedelai pasang surut dengan produktivitas lebih besar dari 1,75 ton.

2. Tanaman Hortikultura: (1) Rakitan Varietas Unggul Tanaman Hortikultura (1 varietas unggul pisang toleran fusarium, 2 hybrid kandidat tetua jantan pisang, 2 klon harapan anggrek phalaenopsis, 2 varietas manggis tahan getah kuning, 46 pop. FI planlet dan kompot anggrek hasil silangan Dendrobium dan Vanda, 6 nomor anggrek terseleksi 4 pop planlet/individu phalaenopsis Dendrobium dan Vanda generasi MV3 hasil radiasi sinar gamma, dan 10 varietas jeruk hasil penyambungan tunas; (2) Teknologi budidaya sayuran (1-2 formula induser pengendali virus kuning pada cabai, teknik pengelolaan tanaman terpadu cabai merah dataran tinggi siap kaji, 1 teknik pengaturan kematangan fisiologis buah cabai, teknik pengendalian Sexigua yang efektif dan efisien dengan menggunakan insektisida alami pada bawang merah, model pengembangan PTT bawang merah, teknologi dan produk inovatif bawang merah yang tersebar di lokasi pengembangan, teknologi penyimpanan bawang merah untuk konsumsi dan bibit, dan formula dekomposer untuk sampah organik); (3) Teknologi budidaya tanaman buah (Pisang: 2 calon tetua jantan diploid dengan viabilitas, fertilitas, dan produksi tinggi serta toleran dengan penyakit layu fusarium, 1 varietas unggul pisang hasil silangan toleran fusarium dan 3 komponen teknologi pengendalian fusarium, bercak daun sigatoka dan penyakit darah, manggis: varietas unggul manggis sedikit atau bebas getah kuning, Teknik pengendalian penyakit getah kuning, Teknik pengendalian penyakit burik, mangga: komponen teknologi pengendalian penyakit mangga duduk dan daging mengeras pada Gedong Gincu, komponen teknologi pengendalian hama penggerek batang, jeruk:

Formula entomopathogen untuk pengendalian vektor penyakit CVPD (Huang lungbin), 1 produk parasitoid *T. Radiata*, 1 agen pengendali penyakit kudis/kanker, 1 produk agen hayati pengendali kutu sisik, dan 1 paket replika model pengembangan agribisnis jeruk siam di Mamuju, tanaman hias : 1 formula hara yang efektif untuk pembungaan anggrek, dan 1 komposisi media optimum untuk pertumbuhan bibit kompot anggrek *phalaenopsis*.

3. Tanaman Perkebunan: 1) Kapas (Seleksi Ketahanan Terhadap Hama Dan Penyakit *A. biguttula*, *R. solani*, *S. rolfsii*, *X. campestris* pv *malvacearum*, Perakitan kapas hibrida, Penyediaan Benih sebanyak 1080 kg untuk 300 ha, Penangkaran benih sebar kapas varietas Kanesia 8 Jatim. NTB dan Sulsel 158 ha; 2) Kelapa dalam dan kelapa Genjah (Kultur jaringan kelapa kopyor, Pengendalian hama sexava, Pola tanam kelapa dengan tanaman sela semusim, Seleksi Blok Penghasil Tinggi (BPT) di 5 propinsi yang mempunyai produksi > 2 ton kopra /ha/ tahun, Pengendalian penyakit layu kalimantan, Rakitan Kelapa dalam komposit, Kebun Induk benih Sumber 14 ha produksi benih sebanyak 160 ribu bibit, Perluasan kebun induk 55 ha; 2) Karet (Pendampingan dan Fasilitasi Penguatan Akses Petani terhadap Sumber Dana Potensial, Penyediaan Bahan Tanam Klon Unggul melalui pendekatan kelompok atau waralaba, Pelatihan dan pendampingan penerapan teknologi unggul, 3) Akselerasi Produktivitas Gula (Pemasyarakatan Varietas Unggul, Teknologi Pemupukan, Sistem Budidaya Hemat Masukan dan Pengendalian OPT Terpadu, Perakitan Varietas Tebu Unggul Baru dan Seleksi Adaptasi Varietas Introduksi, Rekayasa Kelembagaan Sistem Produksi Gula untuk Mendukung Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional 2002-2009, Rekayasa Teknologi Proses dan Alat Produksi yang Efisien dan Hemat Energi untuk Meningkatkan Kinerja Pabrik); 4) Akselerasi Tanaman kakao Tahan PBK (Sosialisasi Teknologi Pengendalian Hama Penggerek Buah kakao (PBK) secara terpadu, Pengembangan sumber bahan tanam unggul tahan PBK (*C. cramerella*),

untuk meningkatkan produktivitas dan mutu hasil kakao, Perakitan produk yang ramah lingkungan untuk pencegahan serangan hama PBK, Seleksi klon unggul kakao tahan hama PBK.

4. Peternakan: 1) Perakitan Bibit Ternak unggul (Pemuliaan "open nucleus breeding scheme"; 2) Sapi jantan PO dan Bali terpilih untuk replacement di BIB; 3) 100 mikroorganisme terkarakteristik, murni, viabilitas tinggi sebagai bahan biologik (vaksin); 4) Teknologi bibit unggul kambing Boerka-1 dan Boerka-2; 5) Koleksi bibit unggul Boerka-1 (220 ekor) dan Boerka-2 (60 ekor); 6) Bibit unggul ayam lokal lebih seragam dengan produksi telur >40%.
5. Mekanisasi Alat Mesin Pertanian meliputi: 1) satu prototipe mesin penyang dan pemupuk padi sawah bermotor 2 baris dengan kapasitas kerja 25 jam/ha untuk efisiensi tenaga dan pemupukan; 2) satu prototipe mesin panen padi stripper harvester 4-baris tanam untuk lahan pasang surut (kapasitas 1 ha/hari); 3) satu Model Penerapan Box Dryer BBS kapasitas 10 ton GKP dengan biaya pengeringan > Rp. 50/kg; 4) satu prototipe mesin pengering jagung mobil berbahan bakar non minyak dan silo yang bisa berfungsi sebagai pengering dan penyimpanan dengan kapasitas 10 ton; 5) satu prototipe mesin pemipil jagung multi varietas kapasitas 3 ton/jam; 6) satu prototipe instalasi fertigasi untuk tanaman jeruk pada lahan rawa yang mampu meningkatkan tingkat keseragaman distribusi cairan 40 %; 7) satu unit mesin pengolahan pupuk organik berbahan baku limbah kakao, kapasitas 2 ton/ha; 8) satu prototipe unit instalasi pengolahan limbah ketela pohon yang terdiri dari pengolahan limbah cair menjadi biogas dan pengolahan ketela off grade menjadi ethanol skala pabrik tapioka rakyat, kapasitas rata-rata 20 ton/hari; 9) satu paket mesin pengolah pakan ternak skala usahatani (prototipe mesin pencacah jerami kapasitas 250 kg/jam jerami kering atau 1 ton/jam jerami basah + prototipe mesin pengepres pakan kapasitas 50 kg/jam); 10) satu unit prototipe instalansi pemroses biomasa

(kotoran sapi) yang disempurnakan; 11) satu paket teknologi mekanisasi pengolahan pisang (pengiris, pengering, penepung, pengemas) untuk skala kelompok tani; 12) satu prototipe alsin penepung dan model pengemasan simplisia rimpang-rimpangan skala kelompok tani; dan 13) satu model pengembangan mesin pengolahan biji jarak menjadi minyak jarak mentah kapasitas 200 kg/hari.

6. Teknologi Pasca Panen: 1) Paket teknologi pengolahan konsentrat jeruk skala pilot; 2) Paket teknologi pembuatan beras beriodium skala pilot; 3) Pengembangan teknologi produksi sirup glukosa skala pedesaan; 4) Proses hilir karakteristik tepung gula casava; 5) Proses hilir sirup fruktosa skala pedesaan; 6) Teknologi biopreservatif untuk mengendalikan kontaminan pada daging dan produk daging; dan 7) Teknologi fortifikasi iodine pada beras.
7. Teknologi Sumberdaya Lahan: 1) Jenis ekstraksi ketersediaan hara P dan K serta rekomendasi pupuk P dan K tanaman jagung spesifik lokasi; 2) Paket Perangkat Uji Tanah Kering; 3) Paket Perangkat Uji Pupuk (PUP) untuk menguji Kadar N,P,K kapur yang tervalidasi; 4) Teknologi penata lahan dan air serta pemupukan pada lahan rawa pasang surut; 5) Organisme dan mikroba multiguna untuk pengembangan pupuk organik; 6) Peta wilayah pola tanam SUT padi berdasarkan tingkat toleransi anomali iklim di Pantura Jawa; 7) Rekomendasi penggunaan pupuk/bahan organik untuk penghematan pupuk buatan/anorganik pada padi sawah; dan 8) Standar mutu nutrisi dan pupuk hayati.
8. Potensi Sumberdaya Lahan Pertanian: 1) Peta penggunaan lahan sekarang (existing land use) skala 1 : 100.000; 2) Peta komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan skala 1 : 100.000; 3) Peta rekomendasi pertanian lahan abadi skala 1 : 250.000; 4) Peta potensi sumberdaya lahan wilayah perbatasan; 5) Peta AEZ skala 1:50 000 untuk pengembangan komoditas unggulan masing-masing propinsi; 6) Peta sebaran lahan potensial pencetakan sawah di beberapa propinsi potensial; 7) Data status penggunaan dan residu agrokimia di

sentra produksi padi; dan 8) Data dan peta status pencemaran bahan agrokimia di sentra sayuran dataran tinggi dan rendah.

9. Bioteknologi: 1) Pupuk hayati pelarut fosfat pada tanah (Bio-phos); 2) Pupuk hayati penambat nitrogen (Nodulin); 3) Sex-pheromon perangkap ulat grayak bawang merah.

7.6. FASILITAS KELANCARAN INPUT

7.6.1. Perbenihan Tanaman Pangan

Jumlah varietas unggul komoditas tanaman pangan yang dilepas pada Tahun 2006 s/d Agustus 2006, tercatat sebanyak 25 varietas. Untuk padi hibrida sebanyak 12 varietas, untuk padi non hibrida sebanyak 3 varietas yaitu: Mira 1, Sarinah, Ciasem, sedangkan untuk jagung hibrida sebanyak 4 varietas,. Pada MT 2005/2006 pertanaman padi yang dominan adalah varietas IR-64, Ciherang dan Ciliwung, pertanaman jagung yang dominan adalah varietas Hibrida Bisi-2, rjuna dan Hibrida P-11, sedang pertanaman kedelai yang dominan adalah varietas Wilis, Anjasmoro dan Galunggung disamping varietas Lokal.

Pada MT 2006 pertanaman padi yang dominan adalah varietas Ciherang, IR-64 dan Cibogo, pertanaman jagung yang dominan adalah varietas Bisi 2, Pioneer 12 dan Bisma sedang pertanaman kedelai yang dominan adalah varietas Wilis, Argomulyo dan Orba disamping varietas lokal (Tabel 7.12.).

Tabel 7.13. Komposisi Penyebaran Varietas Pertanaman Padi, Jagung dan Kedelai pada MT 2005/2006 dan MT 2006

No	Komoditi	Varietas Potensi Produksi (%)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1.	MT 2005/2006			
	- Padi	69,10	12,67	18,23
	- Jagung	58,68	1,61	39,71
	- Kedelai	68,27	4,90	26,83
2.	MT 2006 *)			
	- Padi	68,87	13,42	17,71
	- Jagung	57,48	2,93	39,59
	- Kedelai	63,64	13,56	22,79

Ket : *) : sampai dengan Bulan Agustus 2006

Tabel 7.14. Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2005 - 2006

No.	Komoditas	Sasaran	Potensi	Penyediaan			
		Tanam	Kebutuhan	Pemerintah/		Petani/	
		(Ha)	(Ton)	Produsen Besar		Penangkar	
				Ton	%	Ton	%
Tahun 2005							
1.	Padi	12,526,319	313,158	122,000	38.96	191,158	61.04
2.	Jagung	3,684,208	92,105	18,400	19.98	73,705	80.02
3.	Kedelai	633,261	31,663	4,750	15.00	26,913	85.00
4.	Kacang Tanah	721,350	86,562	490	0.57	86,072	99.43
5.	Kacang Hijau	337,050	8,426	65	0.77	8,361	99.23
Tahun 2006							
1.	Padi	12,614,328	315,358	125,000	39.64	190,158	60.30
2.	Jagung	3,706,317	92,657	19,300	20.83	73,357	79.17
3.	Kedelai	649,999	32,499	4,800	14.77	27,699	85.23
4.	Kacang Tanah	749,911	89,980	495	0.55	89,458	99.42
5.	Kacang Hijau	362,431	9,061	66	0.73	8,995	99.27

• Produksi Benih Benih Tanaman Pangan Tahun 2005 – 2006

Penyediaan benih tanaman pangan tahun 2005 dan 2006 sebagian besar masih dipenuhi dari penangkar dan petani (sendiri). Peran swasta dalam pemenuhan kebutuhan benih secara nasional masih terfokus pada komoditas utama yaitu padi, jagung dan kedelai. Peran swasta dalam pemenuhan kebutuhan benih secara nasional masih terfokus pada komoditas utama yaitu padi, jagung dan kedelai. Peran tersebut pada tahun 2006 meningkat dari tahun 2005.

• Pelepasan Varietas Unggul Tanaman Pangan

Jumlah varietas unggul komoditas tanaman pangan sampai dengan tahun 2006 sebanyak 534 jinis. Sementara yang dilepas dalam tahun 2005 sebanyak 4 varietas dan tahun 2006 sebanyak 25 varietas. dengan rincian sebagaimana pada Tabel 7.15

• Penggunaan Benih

Berdasarkan penggolongan potensi produksinya, varietas yang berkembang di pertanaman petani dalam tahun 2005 dan 2006 sebagian besar pertanaman padi, jagung dan kedelai, telah menggunakan varietas unggul yang mempunyai potensi produksi tinggi (VPT).

Pada Tahun 2005 pertanaman padi yang dominan adalah varietas IR-64, Ciherang dan Way Apo Buru,

Tabel 7.15. Varietas Unggul yang Dilepas Tahun 2005 dan 2006

No	Komoditas	Tahun			Jumlah
		s/d 2004	2005	2006	
1	Padi				
	- Hibrida	14	3	12	29
	- Non Hibrida	190	0	4	194
2.	Jagung	86	0	2	88
	- Hibrida	43	0	1	44
	- Non Hibrida				
3	Kedelai	62	1	3	66
4	Kc. Tanah	31	0	0	31
5	Kc. Hijau	19	0	0	19
6	Ubi Kayu	15	0	0	15
7	Ubi Jalar	23	0	3	26
8	Sorghum	18	0	0	18
9	Gandum	4	0	0	4
	Jumlah	505	4	25	534

pertanaman jagung yang dominan adalah varietas Hibrida Bisi-2, Arjuna dan Bisma sedang pertanaman kedelai yang dominan adalah varietas Wilis, Orba, dan Anjasmoro disamping varietas lokal.

Pada Tahun 2006 pertanaman padi yang dominan adalah varietas IR-64, Ciherang dan Ciliwung, pertanaman jagung yang dominan adalah varietas Hibrida Bisi-2, Arjuna dan Bisma sedang pertanaman kedelai yang dominan adalah varietas Wilis, Anjasmoro dan Mahameru disamping varietas Lokal. Rincian pada Tabel 7.16.

Tabel 7.16. Penyebaran Penggunaan Varietas Padi, Jagung Kedelai Tahun 2005 -2006

No. Tahun	Komoditas	Penyebaran (%)			Varietas Dominan
		VPT	VPS	VPR	
2005					
1.	Padi	68.81	12.81	18.38	IR-64, Ciherang, Way Apo Buru
2.	Jagung	58.36	1.61	39.71	Bisi -2, Arjuna, Bisma
3.	Kedelai	68.27	4.9	26.83	Wilis, Orba, Anjasmoro
2006 *)					
1.	Padi	68.87	13.42	17.71	IR-64, Ciherang, Ciliwung,
2.	Jagung	57.48	2.93	39.59	Bisi -2, Arjuna, Bisma
3.	Kedelai	63.64	13.56	22.79	Wilis, Anjasmoro, Mahameru

• Penyediaan Benih BS (Breeder Seed)

Realisasi penyediaan BS komoditi utama tanaman pangan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Perbenihan dalam tahun 2005 dan 2006 sebagian telah mencapai sasaran yang ditetapkan, adapun sebagian yang belum tercapai karena terkait dengan rencana panen yang baru akan dilaksanakan pada Bulan Nopember 2005. Rincian sebagaimana pada tabel 7.17.

Tabel 7.17. Penyediaan Benih Penjenis (BS)

No.	Komoditas	Tahun	
		2005	2006
1.	Padi (Kg)	500	500
2.	Jagung (Kg)	300	250
3.	Kedelai (Kg)	1.200	600
4.	Kacang Tanah (Kg)	960	600
5.	Kacang Hijau (Kg)	250	200
6.	Ubi Jalar (stek)	900	400
7.	Ubi Kayu (stek)	5.000	1.000
8.	Gandum (Kg)	200	150
9.	Sorghum (Kg)	-	40

Keterangan : *) Tidak termasuk yang diadakan oleh BUMN dan Swasta
 **) Data sampai dengan bulan September 2006

Keseluruhan BS tersebut telah didistribusikan keseluruhan propinsi untuk diperbanyak lebih lanjut, sehingga dihasilkan Benih Dasar (BD). Penyediaan BS oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dari tahun 2004 sampai 2006 ada kecenderungan jumlahnya menurun, hal ini terkait dengan kebijakan yang ditetapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan BS, daerah dapat mengadakannya secara swadana melalui Pemulia tanaman yang menghasilkan.

• Pemasukan/Introduksi dan Pengeluaran/ Ekspor Benih

Kewenangan pemberian izin pemasukan benih untuk penelitian diserahkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, sedangkan izin pemasukan benih bukan untuk penelitian termasuk penentuan jumlah benih yang boleh diintroduksi, diserahkan kepada Direktur Jenderal yang menangani komoditi bersangkutan. Benih yang dimasukan/diimpor hanya diizinkan dari Negara yang bebas OPTK, dan harus mengikuti peraturan karantina (tabel 7.18).

Tabel 7.18. Pemasukan/Impor Benih Tanaman Pangan pada Tahun 2005 -2006

No	Komoditas/Tahun	Benih (Kg/stek)	Materi Induk (Kg)	Galur (Kg)
1.	Padi			
	a. Tahun 2005	-	620	640
	b. Tahun 2006 *)	12.995	-	-
2.	Jagung Hibrida			
	a. Tahun 2005	455	113	1.550
	b. Tahun 2006 *)	-	-	-
3.	Jagung Hibrida			
	a. Tahun 2005	12.000	-	-
	b. Tahun 2006 *)	-	-	-

Keterangan :*) : sampai dengan Bulan Agustus 2006

Disamping masih mengintroduksi benih, terutama dalam bentuk materi induk, beberapa industri benih multinasional juga telah melakukan ekspor benih jagung hibrida ke beberapa Negara (tabel 7.19).

Tabel 7.19. Ekspor Benih Tanaman Pangan pada Tahun 2005 - 2006.

No	Komoditas/Tahun	Tahun	
		2005	2006*)
1.	Padi	-	562
2.	Jagung Hibrida	710	216
3.	Kedelai	5.000	-

Keterangan : *) : sampai dengan Bulan September 2006

• Pengembangan Perlindungan Tanaman

Pengembangan perlindungan tanaman dengan sasaran penurunan luas serangan organisme pengganggu tumbuhan sekitar 5% dari rata-rata serangan OPT lima tahun. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah melalui (1) penguatan kelembagaan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 36 unit, Balai Proteksi Tanaman 30 unit, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium Agens Hayati (LAH), penerapan PHT di 32 propinsi, (3) pengamatan dan peramalan OPT di 32 propinsi, (4) penanggulangan OPT dan penanganan dampak fenomena iklim pada daerah-daerah rawan banjir/kekeringan serta (5) penguatan data base perlindungan di 32 propinsi dan pusat.

• Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Luas serangan OPT utama padi pada Musim Kering (MK) 2006 seluas 117.393 hektar (puso 545 ha), lebih rendah bila dibandingkan dengan MK 2005, tetapi lebih

tinggi bila dibandingkan dengan serangan rata-rata MK 2000-2004. Luas serangan pada tahun 2006 seluas 227.073 ha terdiri atas tikus 85.809 ha; penggerek batang 101.743 ha; WBC 23.928 ha; Tungro 6.474 ha; blas 9.116 ha dan yang mengalami puso 1.660 ha, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2005 dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan serangan rata-rata tahun 2000-2004. Pada Musim Hujan (MH) 2006/2007 luas serangan seluas 3.883 ha terutama disebabkan oleh penggerek batang (2.007 ha) dan tikus (1.400 ha).

Luas serangan OPT utama jagung pada MK 2006 seluas 3.555 ha (puso 16 ha) lebih rendah bila dibandingkan dengan MK 2005 dan rata-rata 2000-2004. Luas serangan pada tahun 2006 seluas 8.219 ha (puso 195 ha) lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2005 dan rata-rata 2000-2004.

Sedang luas serangan OPT utama kedelai pada MK 2006 seluas 986 ha (puso 0 ha) lebih rendah bila dibandingkan dengan MK tahun 2005 dan rata-rata 2000 - 2004. Pada tahun 2006 luas serangan OPT utama kedelai seluas 2.817 ha (puso 280 ha) lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2005, namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata 2000-2004.

Tabel 7.20. Luas Serangan OPT Utama Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2005 -2006

Musim/Tahun	Padi (ha)		Jagung (ha)		Kedelai (ha)	
	T	P	T	P	T	P
Musim Kering (MK)						
- MK 2006 *)	117,393	545	3,555	16	986	-
- MK 2005	181,940	6,155	6,713	191	2,918	1
Rata-rata MK 2000-2004	105,045	1,935	4,635	76	1,690	5
Musim Hujan (MH)						
- MH 2006/2007 *)	3,883	-	-	-	-	-
- MH 2005/2006	4,957	123	391	-	255	-
Tahun						
- Tahun 2006*)	227,073	1,660	8,219	195	2,817	280
- Tahun 2005	266,097	7,089	10,902	332	4,839	1
Rata-rata 2000-2004	190,048	3,475	9,294	304	2,481	5
T = Terkena	P = Puso					
*) Data sementara						

• Dampak Fenomena Iklim (Kekeringan dan Banjir)

Luas kekeringan pada tanaman padi tahun 2006 seluas 261.315 ha dengan puso 63.363 ha, lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2005 dan rata-rata 200-2004. Demikian pula dengan luas banjir pada tahun 2006 seluas 262.713 ha dengan puso 104.757 ha lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2005 dan rata-rata 2000-2004.

Tabel 7.21. Luas Kekeringan dan Banjir Pada Tanaman Padi Tahun 2005 - 2006

Musim/Tahun	Kekeringan (ha)		Banjir (ha)	
	T	P	T	P
Musim Kering (MK)				
- MK 2006 *)	216,031	60,741	60,112	36,020
- MK 2005	102,172	11,494	27,505	6,678
Rata-rata MK 00-04	204,761	31,884	20,858	6,022
Musim Hujan (MH)				
- MH 2006/2007 *)	17,592	2,218	6,930	1,215
- MH 2005/2006	44,962	2,505	16,432	2,499
Tahun				
- Tahun 2006*)	261,315	63,363	262,713	104,757
- Tahun 2005	249,722	43,704	197,617	71,180
Rata-rata 2000-2004	248,401	39,065	176,457	43,748
T = Terkena	P = Puso			
*) Data sementara				

Pada tahun 2006 dampak kekeringan terluas terjadi di propinsi Jawa Barat seluas 123.527 ha (puso 48.659 ha) disusul NAD seluas 21.266 ha (puso 559), Jawa Tengah seluas 20.483 ha (puso 4.173 ha), Sulsel seluas 10.160 ha (puso 532 ha).

Sedangkan banjir pada tahun 2006 terluas terjadi di propinsi Jawa Barat seluas 101.611 ha (puso 38.055 ha), disusul Jawa Tengah seluas 33.384 ha (puso 14.943 ha), Kalimantan Selatan seluas 25.508 ha (puso 13.137 ha), Sulawesi Selatan seluas 24.095 ha (puso 16.590 ha).

Dalam rangka pengendalian OPT dan penanganan DFI, telah dilakukan pemberdayaan petani, sebagai berikut: Sekolah Lapangan Pengendalian Hama

Terpadu (SLPHT). Dalam rangka pemberdayaan dan kemandirian petani dalam pengendalian OPT, selama tahun 2006 telah dilaksanakan SLPHT di tingkat petani. SLPHT dialokasikan di masing-masing propinsi dengan jumlah 183 unit.

Berdasarkan pemantauan lapang dan laporan daerah, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tahun 2005 mengalami penurunan yang sangat berarti dibandingkan tahun 2004. Serangan OPT sampai dengan bulan Agustus 2005 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2004 sebagai berikut : Tanaman buah (jeruk, pisang, mangga, manggis, durian) tahun 2005 terjadi serangan OPT terhadap 3.558.459 pohon sedangkan tahun 2004 sebanyak 8.067.042 pohon (terjadi penurunan 35.58%), Tanaman sayuran (cabai, bawang merah, kubis, tomat, kentang), tahun 2005 serangan OPT seluas 25.371,8 Ha, sedangkan tahun 2004 seluas 29.924,9 Ha (terjadi penurunan 15,51%), Tanaman hias anggrek, luas serangan OPT tahun 2005 sebanyak 58.193 pot sedangkan tahun 2004 luas serangan mencapai 72.818 Ha (terjadi penurunan 16.52%), Tanaman biofarmaka (jahe, kencur, kunyit), tahun 2005 luas serangan sebesar 740,3 Ha, sedangkan tahun 2004 seluas 945,6 Ha (terjadi penurunan 21,7%).

Pada tahun 2005 terdapat tujuh jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dinilai menimbulkan penurunan kuantitas dan kualitas hasil serta kerugian ekonomi yang berarti, antara lain 3 OPT pada tanaman buah, yaitu hama lalat buah pada mangga, jeruk, belimbing, jambu, nangka, penyakit CVPD pada jeruk, penyakit layu pada pisang, dan 4 OPT pada sayuran yaitu penyakit virus kuning dan hama lalat buah pada cabai, hama ulat bawang pada bawang merah dan Nematoda Sista Kuning/NSK pada kentang. Selama tahun 2006, telah dilaksanakan SLI sebanyak 13 (tiga belas) unit, yang tersebar di 4 (empat) propinsi, dengan alokasi seperti tabel 7.21.

Tabel 7.22. Alokasi Kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Tahun 2006

No	Propinsi	Jumlah Kab.	Jumlah (unit)	Peserta (org)
1	Sumatera Barat	1	1	20
2	Jawa Barat	9	9	180
3	Jawa Tengah	1	1	20
4	Jawa Timur	2	2	40
Jumlah		13	13	260

7.6.2. Ketersediaan Benih dalam rangka mendukung Program Revitalisasi Perkebunan

Secara umum ketersediaan benih unggul bermutu masih belum mencukupi apabila mengandalkan potensi aktual sumber benih yang ada saat ini. Gambaran potensi aktual ketersediaan benih beberapa tanaman sebagai berikut :

• Benih Hortikultura

Ketersediaan benih tanaman buah pada tahun 2004 sebanyak 12.645.867 bibit, terdiri atas mangga, rambutan, durian, jeruk, manggis, pisang dan buah lain. Dari jumlah tersebut tersalur 6.837.919 bibit setara luas 55.606 ha. Dibandingkan ketersediaan tahun 2005 sebanyak 6.959.019 bibit, tersalur 1.989.070 pohon. Penyediaan benih tanaman sayuran terutama dilakukan oleh perusahaan swasta dan oleh penangkar, diantaranya : PT. East West Seed Indonesia, PT. Tanindo dan PT. Sang Hyang Seri. Penyediaan benih tanaman sayuran non kentang tahun 2004 sebanyak 2.374,6 ton, sebanyak 2.220,4 ton diantaranya diperoleh dari produsen benih swasta dan petani penangkar, sedangkan 154,2 ton berasal dari impor.

Ketersediaan benih tanaman hias tahun 2004 sebanyak 12.810.702 bibit terdiri atas anggrek, gladiol, krisan, mawar, melati dan sedap malam berasal dari produksi dalam negeri sebanyak 6.871.615 bibit (53,64%) dan impor terutama anggrek dan krisan sebanyak 5.939.087 bibit (46,36%). Ketersediaan benih tanaman hias tahun 2005 sampai bulan September sebesar 5.653.068 bibit, dengan impor sebanyak 338.600 bibit.

• Benih Kelapa Sawit

Secara kuantitas dan kualitas ketersediaan benih kelapa sawit mulai tahun 2006 sudah mencukupi bahkan melebihi kebutuhan dalam negeri. Diperkirakan produksi benih kelapa sawit tahun 2006 adalah 147 juta kecambah setara lebih dari 700 ribu ha areal pengembangan. Permasalahannya adalah bagaimana agar petani pekebun dapat memenuhi kebutuhan benih kelapa sawit yang terjamin mutunya dan bersumber dari sumber-sumber benih resmi. Untuk itu Direktorat Jenderal Perkebunan sedang memprogramkan pengembangan sistem waralaba benih yang di inisiasi oleh Pemerintah melalui dukungan dana secara bergulir maupun pengembangan waralaba oleh sumber-sumber benih sendiri.

• Benih Karet

Ketersediaan bibit/benih tanaman karet untuk tahun 2006 diperkirakan masih mencukupi namun untuk tahun selanjutnya perlu ditingkatkan jumlahnya karena target/sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi peremajaan maupun perluasan areal program revitalisasi, program APBD, dan swadaya serta membaiknya harga karet di pasar dunia..

Langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan adalah: mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan potensi sumber benih yang ada (milik PTPN maupun PBS); melakukan rehabilitasi dan pemurnian terhadap kebun-kebun entres eks proyek-proyek perkebunan; membangun Kebun Entres baru; mendukung pengembangan Kebun Entres oleh masyarakat dan dunia usaha; serta pemilihan dan penetapan blok penghasil tinggi sumber batang bawah.

• Benih Kakao

Untuk mendukung program revitalisasi Perkebunan, ketersediaan bahan tanaman kakao pada tahun 2006 dan tahun berikutnya masih terbatas, untuk itu langkah-langkah yang telah dan sedang dilakukan adalah: Melakukan rehabilitasi dan pemurnian kebun entres eks proyek-proyek Perkebunan; Pembangunan kebun entres baru; Melakukan eksplorasi dan penetapan populasi sumber entres; Optimalisasi Kebun Induk yang ada; dan Pembangunan Kebun Induk baru.

• Benih Jarak Pagar

Ketersediaan benih jarak pagar pada tahun 2006 terbatas, oleh karena itu langkah yang ditempuh adalah mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan potensi sumber benih yang ada di luar Puslitbangun seperti PT. RNI, Puslitkoka, Balai Pengkajian Biotek BPPT Serpong, IPB Bogor, ITB Bandung, PTPN XII, PT. Bioseed Indonesia dan Dinas Perkebunan).

• Bibit Tebu

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian program swasembada gula tahun 2009 upaya-upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan adalah: Pembangunan kebun benih berjenjang baik di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur) maupun di Luar Jawa (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan dan Gorontalo), mulai dari Kebun Bibit Pokok (KBN), Kebun Bibit Nenek (KBN), Kebun Bibit Induk (KBI), Kebun Bibit Datar (KBD); Penataan varietas berdasarkan kategori kemasakan; serta Sertifikasi kebun bibit.

• Benih Kapas

Ketersediaan benih kapas untuk tahun 2006 sudah memadai, namun untuk mencukupi kebutuhan benih kapas untuk pengembangan tahun 2007 seluas 18 ribu ha program APBN maupun swadaya perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: Penambahan sumber benih dari program Pengelolaan Tanam Terpadu (PTT) kapas baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan maupun oleh Balittas yang pada saat ini dilaksanakan di Propinsi Sulawesi Selatan; Pembangunan kebun benih sebar; dan Pengadaan alat prosesing benih.

7.6.3. Penanganan Penyediaan Pupuk An Organik & Pupuk Organik

Dalam rangka pencapaian ketahanan nasional, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi pangan melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas hasil pertanian yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan

dan kesejahteraan petani. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan dukungan kebijakan, salah satu diantaranya adalah Kebijakan di bidang penyediaan pupuk bersubsidi yang diawali pada tahun 2003 s/d 2005 dan dilanjutkan pada tahun 2006.

Anggaran subsidi pupuk ditetapkan sebesar Rp. 3,004 triliun untuk penyediaan pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK sejumlah 6 juta ton yang disalurkan melalui produsen pupuk/BUMN pupuk yaitu PT. Pusri, PT. Pupuk Kaltim, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kujang dengan menggunakan pola subsidi gas untuk pupuk urea dan subsidi harga untuk pupuk non urea. Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2006 diperuntukkan bagi subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan (tabel 7.13)

Tabel 7.23. Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (ton)

Sub Sektor	Urea	SP-36	ZA	NPK
Tanaman Pangan dan hortikultura	3.44.708	463.068	347.955	321.559
Perkebunan kecil	843.241	234.374	250.000	78.441
Peternakan	12.051	2.558	2.045	-
Jumlah	4.300.000	700.000	600.000	400.000

Dengan dukungan penyediaan pupuk bersubsidi tersebut telah dicapai peningkatan produksi padi pada tahun 2005 sebesar 54.151.097 ton GKG atau meningkat 0,12% dari capaian produksi tahun 2004. Demikian juga berdasarkan ARAM II BPS tahun 2006 produksi padi tahun 2006 diperkirakan mencapai 54.750.892 ton GKG atau meningkat (+1,11%) dari tahun 2005. Demikian juga capaian produksi di sub sektor diluar tanaman pangan menunjukkan peningkatan baik kuantitas maupun kualitasnya.

Guna mendukung tercapainya peningkatan ketahanan pangan nasional, kebijakan pupuk diarahkan pada (1) Penyediaan Pupuk sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga melalui subsidi pupuk anorganik (Urea, SP-36, ZA dan NPK); (2) pengembangan penerapan pupuk berimbang spesifik lokasi dengan penggunaan pupuk majemuk; dan (3) Pengembangan penggunaan pupuk organik.

Penyediaan pupuk bersubsidi untuk tahun 2006 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 505/Kpts/SR.130/12/2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2006 serta perubahan-perubahannya yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 04/Permentan/ SR.130/2/2006 dan Permentan Nomor 17/Permentan/SR.130/5/2006, dimana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 03/M-DAG/PER/2/2006 dan perubahannya No. 27/M-DAG/PER/7/2006.

Untuk meningkatkan efesiensi penggunaan pupuk anorganik diupayakan pengembangan penerapan pemupukan berimbang melalui penggunaan pupuk majemuk NPK kebijakan ini dimaksudkan pula untuk mengurangi penggunaan pupuk tunggal khususnya pupuk urea. Kebijakan Departemen Pertanian di dalam mendorong pengembangan pemupukan berimbang tersebut diimplementasikan melalui penerbitan Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 01/Kpts/SR.130/1/2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi sebagai acuan bagi daerah didalam pembinaan/penyuluhan penerapan pemupukan berimbang.

Mengingat penggunaan pupuk anorganik yang sangat intensif selama 30 tahun terakhir, diperkirakan lahan-lahan pertanian telah mengalami degradasi kesuburan lahan, sehingga sangat diperlukan upaya pemulihan kesuburan lahan pertanian tersebut melalui pemberian bahan-bahan pembenah tanah/amelioran. Penggunaan pupuk organik merupakan salah satu upaya untuk dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, maupun biologi lahan. sehingga penyerapan unsur hara oleh tanaman dapat lebih efektif, yang berdampak pada penurunan dosis penggunaan pupuk anorganik Sebagai pedoman di dalam program pengembangan pemupukan organik, Menteri Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.

Untuk dapat melindungi petani terhadap peredaran/ penggunaan pupuk yang ilegal atau pupuk palsu khususnya pupuk bersubsidi, maka perlu adanya pengawasan yang intensif terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dimulai dari Lini I , II, III dan IV oleh Tim Pengawas Pupuk di Pusat dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Propinsi dan Kabupaten. Untuk dapat memperkuat pengawasan pupuk bersubsidi, Departemen Pertanian telah menyiapkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang bertugas membantu Tim/Komisi Pengawasan Pupuk di Kabupaten. Dengan dilakukannya pengawasan tersebut diharapkan pupuk bersubsidi dapat disalurkan sesuai dengan peruntukannya serta pupuk yang beredar di pasar benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Penggunaan pupuk an organik dalam pembangunan perkebunan selama ini masih belum optimal. Dari total areal perkebunan seluas $\pm 17,6$ juta ha tahun 2004, penggunaan pupuk an organik masih terbatas pada Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat yang dibangun melalui proyek perkebunan yang diinisiasi oleh Pemerintah, yang luasnya 4,7 juta ha ($\pm 27,2$ % dari total areal perkebunan). Sedangkan sebagian besar areal Perkebunan Rakyat seluas $\pm 13,2$ juta ha ($\pm 72,8$ % dari total areal) tanpa penggunaan pupuk an organik yang memadai.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk an organik dalam rangka mendukung beberapa program perkebunan yang telah dimulai tahun 2006 (program revitalisasi perkebunan, program swasembada gula, program pemenuhan kebutuhan biofuel, program kelapa terpadu dan program lainnya) telah dialokasikan pupuk subsidi yang diperuntukan untuk perkebunan rakyat termasuk plasma yang mempunyai kriteria luasan areal ≤ 2 ha. Namun demikian berdasarkan realisasi di lapangan, alokasi pupuk subsidi untuk perkebunan rakyat baru terpenuhi sekitar 30 %. Alokasi pupuk subsidi perkebunan rakyat untuk tahun 2006 yang tertera dalam Permentan 505/2005, kondisinya status quo (sama dengan) dengan tahun 2005, yaitu pupuk

urea 843.241 ton (24,48% dari total pertanian); SP-36 234.374 ton (50,61 % dari total pertanian), ZA 250 ribu ton (71,85 % dari total pertanian) dan NPK 78.441 ton (24,39 % dari total pertanian). Pemenuhan kebutuhan pupuk untuk perkebunan besar swasta (PBS) dan perkebunan besar milik negara (PTPN) dapat dilakukan secara langsung, namun apabila tidak dapat terpenuhi dapat dilakukan impor pupuk secara bebas.

Sedangkan untuk penyediaan pupuk organik, sebagaimana telah dimaklumi bahwa penggunaan pupuk organik dalam budidaya tanaman perkebunan adalah sangat penting, terutama kaitannya dengan aspek teknis, efisiensi, dan lingkungan serta tuntutan konsumen untuk produk perkebunan. Disamping itu penggunaan pupuk organik secara proporsional akan mengefektifkan dan bahkan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk an-organik.

Untuk mendukung peningkatan penggunaan pupuk organik dan atau pembenah tanah, telah dan akan dilakukan kegiatan rintisan pemanfaatan pupuk organik, termasuk pemanfaatan limbah hasil perkebunan (kulit kopi, kakao, jambu mete dan sabut kelapa) untuk digunakan sebagai pupuk organik. melalui bekerjasama dengan BPTP, Puslit/Balit Perkebunan dan Perguruan Tinggi. Kegiatan sejenis ini juga direncanakan akan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi penggunaan pupuk organik sehingga diharapkan petani dapat memproduksi pupuk organik dan pembenah tanah sesuai kebutuhannya.

Pada tahun 2006 Direktorat Jenderal Peternakan mengalokasikan sebelas unit percontohan pengembangan program pemanfaatan biogas asal ternak bersama masyarakat (BATAMAS) di 11 propinsi (masing-masing satu kabupaten di setiap propinsi). Jumlah lokasi percontohan seluruhnya tiga puluh unit dengan dua sampai tiga unit di setiap kabupaten. Di lokasi-lokasi tersebut implementasi program telah memasuki tahap akhir pembuatan pembangkit biogas dan pembangunan unit pengolahan kompos. Apabila seluruh instalasi telah

beroperasi, maka akan dihasilkan KTS sebesar 7.884 ton/tahun (rata-rata populasi ternak 60 ekor per instalasi atau 1.800 ekor untuk seluruh instalasi). Dari KTS sebesar itu akan diperoleh 394 ribu liter biogas/tahun dan menghasilkan 2.365 ton pupuk organik/tahun, dengan nilai ekonomis sebesar Rp. 1,83 miliar (yaitu Rp. 985 juta dari biogas dan Rp. 827,75 juta dari pupuk organik).

7.7. PENANGANAN KASUS KHUSUS

A. Penanganan Bencana Alam

Pada tahun 2005 Departemen Pertanian mengalokasikan dana Bantuan Bencana Alam sebesar Rp. 102 Milyar, pendistribusian kepada petani direalisasikan ke 176 kabupaten/kota di 30 Propinsi dan Pusat yaitu Direktorat Jenderal Peternakan untuk bantuan penanganan flu burung. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membantu pengadaan beberapa komponen Pertanian di daerah-daerah yang wilayahnya mengalami musibah gangguan bencana alam yang terjadi tahun 2005, baik berupa banjir, kekeringan, tanah longsor, serangan OPT, angin puyuh, wabah penyakit hewan, flu burung dan lain-lain. Bantuan diberikan dalam bentuk sarana produksi pertanian (benih/bibit, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin Pertanian/Alsintan). Sampai dengan akhir tahun 2005, realisasi pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana alam TA 2005, baik fisik maupun keuangan telah mencapai 100 persen.

Pada tahun 2006 dana untuk pengadaan bantuan penanggulangan bencana alam yang ada pada Sekretariat Jenderal cq Biro Perencanaan Departemen sebesar Rp. 57.632.914.000.-. Dana bantuan tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan saprodi (benih/bibit hortikultura, perkebunan & ternak, pupuk, pestisida, dan alsintan) yang disalurkan ke 22 Propinsi menyebar di 159 kabupaten. Adapun untuk bantuan berupa benih tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), pengadaannya menggunakan Cadangan Benih Nasional/CBN (buffer stock) senilai + Rp 16,1 Milyar dengan rincian benih padi senilai + Rp 11,2 Milyar, benih jagung senilai + Rp 3,2 Milyar dari benih kedelai senilai + Rp 1,7 Milyar.

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam mengacu pada Pedoman Umum Penanggulangan Bencana Alam Departemen Pertanian Tahun 2006. Bantuan penanggulangan bencana diberikan berdasarkan usulan permintaan bantuan yang diajukan oleh Gubernur/Dinas Propinsi kepada Menteri Pertanian. Kriteria umum yang menjadi dasar pertimbangan penetapan lokasi dan besarnya pengalokasian anggaran antara lain: (1) jenis bencana alam yang terjadi; (2) waktu terjadinya bencana alam; (3) lokasi dan luas areal terkena bencana; (3) jenis bantuan dan volume perjenis bantuan yang diperlukan; (5) perkiraan dana yang dibutuhkan, serta (6) adanya informasi pendukung lainnya berupa proposal atau surat dari Bupati/Walikota/Kepala Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

B. Penanganan Flu Burung

Kunci keberhasilan upaya penanggulangan wabah Avian Influenza (AI) adalah menggerakkan partisipasi atau peran serta masyarakat. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan selalu bersamaan dengan langkah-langkah teknis dan langkah-langkah non teknis termasuk pemulihan pasar dan pemulihan usaha melalui permodalan. Dalam jangka panjang diperlukan upaya restrukturisasi industri unggas seperti halnya di negara-negara di wilayah Asia. Upaya penanganan diarahkan untuk mencegah agar AI tidak menjadi wabah raya atau pandemi.

Kekhawatiran terjadinya pandemi cukup beralasan karena Indonesia dinilai lamban dalam deteksi dini (early detection), respon dini (early response), dan pelaporan dini (early reporting), sehingga kasus-kasus AI di Indonesia dinilai under reporting. Indonesia berupaya keras agar tidak dinilai sebagai titik lemah dan sumber penularan AI regional dan global.

Departemen Pertanian pada bulan Desember 2005 bekerjasama dengan FAO dan ahli kesehatan hewan dari Jepang, Belanda, dan Australia telah menyusun Rencana Strategi National Pengendalian HPAI Pada Unggas 2006 – 2008. Rencana strategis tersebut meliputi 9

elemen yaitu: (1) Unit Pengendali AI; (2) Peningkatan Pengendalian AI; (3) Surveilans dan Epidemiologi ; (4) Pelayanan Diagnostik Laboratorium; (5) Pelayanan Karantina Hewan; (6) Peraturan Perundangan ; (7) Komunikasi; (8) Penelitian dan Pengembangan; dan (9) Restrukturisasi Industri.

• Upaya yang telah ditempuh

1. Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza.

Menteri Pertanian pada bulan Maret 2006 telah membentuk Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza (UPPAI) Pusat yang secara khusus mengkoordinasi pelaksanaan 9 Elemen Rencana Strategi National Pengendalian HPAI secara nasional pada Unggas 2006 – 2008. UPPAI Pusat telah menerbitkan dan mendistribusikan Standar Prosedur Operasional (SOP) pengendalian AI. UPPAI telah menyusun konsep pembentukan UPPAI Regional dan UPPAI Propinsi. Saat ini cikal bakal UPPAI Propinsi masih dalam bentuk proyek dengan nama Local Disease Control Centre (LDCC).

2. Vaksinasi

Pada tahun 2005 (Oktober – Desember) telah dilakukan vaksinasi 22,3 juta dosis dan tahun 2006 direncanakan melakukan 120 juta dosis vaksinasi.

3. Depopulasi dan Kompensasi

Pada tahun 2005 jumlah unggas yang didepopulasi 0,3 juta ekor dengan nilai bantuan sebesar Rp. 4,2 miliar. Tahun 2006 tersedia dana untuk bantuan depopulasi sebesar Rp. 30 miliar, sampai dengan Agustus 2006 telah dilakukan depopulasi 154 ribu ekor pada unggas dengan kompensasi Rp. 1,57 miliar.

4. Public Awareness

Departemen Pertanian telah melaksanakan program public awareness untuk berbagai kelompok sasaran. Public awareness untuk peternak bertujuan meningkatkan kesadaran tentang biosecurity dan biosafety, sedangkan untuk masyarakat umum dan konsumen bertujuan mencegah kepanikan dan membantu pemerintah dalam program pengendalian. Departemen Pertanian juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam program public awareness.

Kegiatan yang telah dilakukan mencakup: pembentukan Tim Tanggap Darurat AI, penyediaan fasilitas hot-line, pencetakan dan distribusi bahan public awareness, talk show interaktif, penerbitan dan penyiaran iklan layanan masyarakat, dan press release.

5. Surveilans

Berdasarkan hasil surveilans diketahui kabupaten/kota di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan yang dianggap bebas atau tidak pernah melaporkan adanya kasus, pernah terpapar virus AI. Dari fakta di lapangan diperoleh bukti bahwa pasar tradisional unggas hidup (live bird market) memegang peranan sangat penting dalam penularan AI antar daerah. Dilaporkan juga bahwa unggas air pada sektor 4 merupakan sumber reservoir virus AI.

6. Deteksi Dini.

Departemen Pertanian menerapkan pendekatan pengendalian penyakit secara partisipatif (participatory appraisal) untuk meningkatkan deteksi dini dan respon cepat terhadap kasus avian influenza. Pendekatan ini mulai diterapkan pada awal 2006 dengan pembentukan dan operasionalisasi Local Disease Control Centre (LDCC) beserta tim pelacak penyakit (Participatory Disease Search) dan tim respon cepat (Participatory Disease Response) sebagai proyek percontohan di empat LDCC pada awal tahun 2006. Pendekatan ini secara signifikan mampu meningkatkan kemampuan petugas kesehatan hewan bersama masyarakat dalam deteksi dini dan respon cepat. Untuk itu mulai pertengahan tahun 2006 cakupan penerapan pendekatan diperluas menjadi 12 LDCC di 9 propinsi mencakup 157 kabupaten di Pulau Jawa dan Propinsi Sumatera Utara, Lampung dan Bali.

• **Perkembangan Kasus AI**

Pada awal terjadinya kasus atau gelombang pertama wabah terjadi kematian pada 4,1 juta ekor pada empat bulan pertama (Agustus – Desember 2003), kemudian meningkat menjadi 5,3 juta ekor pada tahun 2004 dan turun menjadi 1 juta ekor pada tahun 2005. Pada enam bulan terakhir tahun 2005, kasus kematian yang

dilaporkan per bulannya hanya ribuan saja. Pada saat itu kematian banyak menimpa ayam ras di sektor 1 (industri unggas komersial) dan sektor 2 (peternakan rakyat komersial bermitra). Selanjutnya pada tahun 2005 terjadi wabah gelombang kedua kasus AI yang lebih banyak menyerang peternakan ayam ras dengan biosekuriti lemah (sektor 3) dan ayam kampung backyard (sektor 4). Pada tahun 2006, kasus kematian sampai dengan Agustus meningkat menjadi 1,3 juta ekor unggas,

• **Peran Karantina Dalam Penanganan A.I.**

Pada hakekatnya peran dan tugas Badan Karantina Pertanian adalah mencegah, menolak, mempertahankan wilayah bebas AI dan mengamankan daerah tertular AI. Dalam melaksanakan Kebijakan Operasional Badan Karantina Pertanian serta peran dan tugas dalam pelaksanaan Strategi Nasional Penanggulangan AI/Flu Burung Tahun 2006 - 2008, maka strategi operasional karantina hewan adalah pendekatan area dan atau kepulauan melalui sistem penyelenggaraan pre-quarantine, quarantine dan post quarantine dengan melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder serta keterkaitan dengan alat angkut, media pembawa dan berbagai faktor/unsur yang ikut berpengaruh dalam strategis nasional penanggulangan Flu Burung tersebut. Hal ini sesuai dengan Strategi Operasional Penyelenggaraan Karantina Hewan – Badan Karantina Pertanian, yaitu : Peningkatan kapasitas kelembagaan karantina hewan; Pengembangan manajemen penyelenggaraan dan tindakan karantina hewan; Peningkatan fungsi dan peran Karantina Hewan terhadap lalu lintas media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (impor, ekspor, dan antar area) dalam penyelenggaraan dan tindakan karantina hewan; Pengembangan jaringan kerja (net-working) melalui kerjasama dan koordinasi baik teknis operasional maupun teknis fungsional dengan pihak lain yang terkait di daerah, nasional dan internasional; Pengembangan sistem animal quarantine intelijen, kesiagaan darurat karantina serta peran dan dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan dan tindakan karantina hewan (public awareness).

Sampai dengan bulan Agustus 2006 wabah AI telah menyebar ke 29 propinsi dan 207 kabupaten/kota, sehingga hanya 4 propinsi yang masih dinyatakan bebas AI yaitu: Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku dan Papua. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian AI/ flu burung dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza, Badan Karantina Pertanian diharapkan ikut berperan aktif serta berupaya mencegah meluasnya wabah penyakit tersebut ke daerah yang masih bebas AI dalam melaksanakan dan mengoperasionalkan Rencana Strategis Nasional

Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza. Dukungan tersebut merupakan penjabaran dari strategi-strategi nasional dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkrit di lapangan.

C. Pengembangan Energi Alternatif

Upaya terobosan yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian dalam mengembangkan potensi limbah biomasa pertanian antara lain dengan menjadikan sumber energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat. Terobosan tersebut menyangkut aspek kebijakan riset, pengembangan dan penerapan teknologi, dan pemanfaatan teknologi terbarukan yang dapat diaplikasikan dengan mudah dan menghasilkan energi yang murah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dan pengembangan mekanisasi pertanian memberikan perhatian lebih bagi pemanfaatan energi terbarukan yang searah dengan upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan, dalam kerangka : (1) teknologi pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan, (2) keamanan energi secara kuantitatif dan kualitatif, (3) pembangunan pedesaan yang harmoni dan (4) pelestarian lingkungan hidup.

Beberapa teknologi yang telah dihasilkan untuk dapat digunakan sebagai alternative sumber energi diantaranya adalah:

1. Teknologi Pengolahan Biji Jarak Menjadi Minyak Jarak (*Crude Jatropha Curcas Oil, Cjco*).

Konsep yang dikembangkan dalam perekayasaan prototipe pengolahan biji jarak ini adalah kemandirian

agroindustri pedesaan. Petani diharapkan tidak sekedar menanam dan menjual biji kering, tetapi lebih jauh diharapkan kelompok tani dapat memproses biji jarak kering tersebut menjadi minyak jarak mentah (CJCO). Dengan demikian teknologi yang direkayasa tidak hanya secara teknis layak tetapi secara ekonomis pun harus juga layak untuk skala usaha kelompok tani. Tingkat teknologi yang digunakan diharapkan sederhana dan dapat diperbaiki sendiri oleh kelompok tani bila terjadi kerusakan. Melalui penerapan konsep kemandirian ini diharapkan nilai tambah pengolahan biji menjadi minyak dapat dinikmati oleh petani.

Mesin pengolah biji jarak hasil rekayasa terdiri dari mesin pengupas kulit buah jarak (tipe rol ganda) dan mesin pengepres (expeller, tipe screw) masing-masing mempunyai kapasitas 200 kg/hari biji kering dengan hanya menggunakan satu motor penggerak diesel 8.5 HP. Prototipe-I telah dikembangkan dan dikerjasamakan dengan BPPT untuk perbaikan rendemen dan unjuk kerjanya. Hasil akhir yang diperoleh (prototipe II), rendemen pengepresan mencapai 27%.

Tindak lanjut yang akan dilakukan atas dasar capaian tersebut adalah melakukan perbaikan prototipe untuk dapat menghasilkan rendemen rata-rata 30% (teoritis 35%) yaitu dengan penambahan filter press dan penyempurnaan proses kimiawi minyak jarak yang meliputi deguming, penurunan viskositas dan keasaman. Proses kimiawi tersebut mutlak untuk dilakukan agar CJCO dapat langsung digunakan sebagai pengganti minyak tanah (kerosen). Untuk itu, upaya dan kerjasama dengan BPPT dan Institusi lain (BB Pasca Panen) serta swasta akan terus dilanjutkan. Analisa ekonomis telah dilakukan, dengan harga prototipe Rp. 45.000.000,-, kapasitas 200-300 kg biji/hari, asumsi rendemen 30%, maka biaya pengolahan per liter CJCO adalah Rp. 1.200,- sampai dengan Rp. 1.500,- per liter. Pay back period diperkirakan 3-4 tahun. Berikut adalah prototipe mesin pengupas dan pengolah biji jarak menjadi minyak jarak mentah (CJCO).

Dukungan Perbenihan dan Teknologi Pengembangan Jarak pagar, antara lain (i) pada bulan Juli 2006

dilaksanakan Peluncuran Perdana Benih Unggul Jarak Pagar (IP-I A, IP-IM dan IP-IP) dari hasil seleksi masa negatif sebagai kesungguhan Departemen Pertanian dalam menyiapkan benih unggul jarak pagar dan sumber tanaman untuk bahan bakar nabati; (ii) Benih Jarak pagar terseleksi 36 ton hasil produksi benih IP2 (Improved Population 2); (iii) Teknologi pendukung pengembangan jarak pagar (peta kesesuaian lahan, paket teknologi pembibitan, teknologi budidaya, teknologi pasca panen & peralatannya); (iv) Pendampingan Teknologi pengembangan kebun induk di daerah 14 propinsi (Jambi, Sumbar, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTB, NTT, Gorontalo, SULUT, Sulse, Sulteng dan Papua).

Dalam 20 tahun mendatang (2025) pemerintah telah menargetkan penggunaan biodiesel dari jarak pagar sebanyak 2.400.000 kilo liter atau setara dengan 12 juta ton biji jarak kering. Bila produktivitas jarak rata-rata 5 ton biji kering/ha, maka diperlukan areal produksi 2.400.000 ha. Penanaman areal seluas ini memerlukan 7,2 milyar bibit atau setara dengan 675 ton benih. Untuk memenuhi jumlah benih ini, diperlukan kebun induk benih sumber seluas 225 ha. Pada tahun 2005 Puslitbang Perkebunan diberi mandat untuk membangun kebun induk jarak pagar seluas 50 ha, untuk itu telah dilakukan eksplorasi di 6 propinsi. Hasil eksplorasi di propinsi Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat diperoleh setek sebanyak 170.957 setek. Setek/benih ini, telah dibibitkan di KP Pakuwon Jawa Barat sebanyak 97.367 setek untuk pertanaman seluas 30 ha, KP Muktiharjo, Jawa Tengah, 37.590 setek dan KP Asembagus, Jawa Timur, sebanyak 36.000 setek untuk pertanaman kebun induk seluas 10 ha.

Pada tahun 2005 telah ditetapkan crash program penyediaan benih jarak pagar, dengan target 50 ha kebun induk yang telah mulai dikembangkan pada tahun 2006. Dari kebun induk diharapkan sudah mulai dihasilkan benih untuk mendukung tanaman komersial 5.000 – 10.000 ha pada tahun 2007. Untuk mensuplai kebutuhan benih jarak pagar sebesar 450-500 ton/tahun yang setara dengan 2,4 juta ha areal pengembangan,

maka dibutuhkan kebun benih seluas $\pm$ 150 ha. Puslitbangbun akan mengambil porsi 50 ha; kekurangan 100 ha diharapkan dapat dipenuhi oleh institusi lain seperti Unit Kerja lingkup LRPI, BPTP dan lain-lain, yang akan memanfaatkan bibit unggul terseleksi (improved population 2 atau IP2) dari Puslitbangbun.

Selain eksplorasi jarak pagar, Puslitbang perkebunan juga telah melaksanakan diskusi nasional jarak pagar yang diikuti kalangan pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya, pers, asosiasi, peneliti, perguruan tinggi, dan berbagai kalangan yang terkait. Materi diskusi meliputi pola kelembagaan produksi, yaitu lembaga dan pelaku yang paling efektif dan efisien untuk menangani proses; ketersediaan teknologi menyangkut teknologi dan sumberdaya yang dibutuhkan; dan prospek ekonomi berupa kelayakan usaha dari hulu ke hilir sesuai dengan pola kelembagaan dan teknologi yang diterapkan.

Diskusi nasional Jarak Pagar telah berhasil menyusun rekomendasi pengembangan jarak pagar sebagai sumber bahan baku bioenergi yang diarahkan kepada : (1) pemenuhan bahan bakar skala rumah tangga dan pedesaan, (2) pemenuhan bahan bakar alternatif biodiesel dan, (3) Perlu adanya seed-money (modal awal) yang diambil dari subsidi BBM untuk pengembangan industri. Untuk mempercepat dan memacu perkembangan perlu dibentuk POKJANAS Jarak pagar.

2. Teknologi Produksi Biodiesel Sawit Sebagai Bahan Bakar Yang Ramah Lingkungan

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif berbahan-baku minyak atau lemak alami. Akhir-akhir ini biodiesel banyak memperoleh perhatian karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan bahan bakar minyak bumi, diantaranya adalah : (i) Biodiesel dapat diproduksi secara lokal dengan menggunakan bahan baku minyak atau lemak alami produk setempat; (2) merupakan hasil turunan dari minyak nabati maupun lemak hewani, sehingga hasil pembakarannya tidak meningkatkan jumlah CO₂ di atmosfer dan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca; (3) bersifat non toksik dan ramah lingkungan atau dapat terurai secara alami (biodegradable); (4)

pembakaran biodiesel menghasilkan tingkat emisi carbon monoxide (CO), sulphur dioxide (SO₂) dan nitrogen oxides (NO_x) yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi; (5) penggunaan biodiesel tidak membutuhkan modifikasi mesin diesel yang biasa digunakan selama ini.

Teknologi produksi biodiesel yang umum diterapkan pada skala komersial adalah melalui proses transesterifikasi antara minyak/lemak nabati dengan methanol menggunakan katalis basa NaOH atau KOH. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan minyak atau lemak alami sebagai bahan baku biodiesel adalah kandungan asam lemak bebas (ALB) nya yang harus < 1 % dan harganya yang relatif murah.

Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia mempunyai potensi untuk mengembangkan biodiesel, baik untuk keperluan dalam negeri maupun ekspor. Sampai saat ini harga biodiesel sawit masih belum dapat bersaing dengan minyak solar di dalam negeri, karena adanya subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak dan tingginya harga minyak sawit (CPO). Dengan rencana pemerintah untuk mencabut subsidi secara bertahap, maka dalam beberapa tahun lagi diperkirakan selisih harga biodiesel dan solar akan semakin kecil dan biodiesel akan menjadi lebih kompetitif. Berkenaan dengan hal tersebut di atas teknologi produksi biodiesel dari minyak sawit harus dikembangkan di Indonesia sebagai upaya antisipasi terhadap penyediaan energi terbarukan. Menaikan nilai tambah minyak sawit, stabilisasi harga sawit yang berfluktuasi, dan memperbaiki lingkungan.

Standar perdagangan nasional dan internasional menetapkan kandungan ALB pada minyak sawit maksimum sebesar 5%. Oleh karena proses sintesis biodiesel membutuhkan minyak dengan kandungan ALB < 1 %, maka pada minyak sawit dengan kandungan ALB > 1 % perlu dilakukan proses deasidifikasi. Terdapat 2 cara proses deasidifikasi CPO yang dikembangkan oleh PPKS, yakni : rekasi metanolisis menggunakan katalis asam dan Ekstraksi dengan menggunakan gliserol kasar, yang dapat diperoleh dari proses transesterifikasi minyak sawit sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses metanolisis pada minyak sawit yang mengandung ALB 5-7% dengan menggunakan katalis asam 0,5%, methanol 5-6% (b/b CPO), dan waktu reaksi 150 menit dapat menurunkan ALB hingga mencapai tingkat kandungan 1%. Lebih lanjut, ekstraksi asam lemak dalam minyak sawit yang mengandung ALB sekitar 5% dengan pelarut gliserol kasar sebanyak 20% (b/b CPO) dan dengan 4 tahap ekstraksi juga dapat menurunkan kandungan ALB pada CPO hingga < 1%.

Proses sintesis biodeiesel sawit yang diterapkan saat ini menggunakan reaksi transesterifikasi dengan katalis basa sebesar 1-2%. Agar memenuhi standar mutu biodiesel, maka dibutuhkan proses pemurnian atau pencucian produk biodiesel untuk menghilangkan sisa katalis basa dan methanol. Adanya residu basa dalam produk transesterifikasi juga dapat menyebabkan terjadinya pembentukan sabun, yang menyebabkan produk menjadi berbentuk gel dan menghambat proses pemisahan biodiesel dan produk samping berupa gliserol. Untuk mempermudah pemurnian produk biodiesel di tahap akhir proses ini, maka PPKS mengembangkan proses sintesis biodiesel dengan 2 tahap rekasi transesterifikasi dengan tujuan mengurangi penggunaan katalis basa.

Hasil penelitian PPKS menunjukkan bahwa penggunaan katalis basa dapat diturunkan menjadi 0,75% dengan 2 tahap reaksi transesterifikasi. Reaksi transesterifikasi I menggunakan katalis basa sebesar 0,5%, methanol 20-21% (b/b CPO), dan waktu reaksi 3 jam. Proses transesterifikasi II dilakukan dengan penggunaan jumlah katalis basa 0,25%, methanol 20-21% (b/b CPO), dan waktu reaksi 4 jam. Dengan 2 tahap reaksi transesterifikasi dan penggunaan jumlah katalis basa lebih rendah, maka proses pemurnian biodiesel tidak perlu dilakukan dengan pencucian, tetapi cukup dengan didiamkan (settling) dan produk biodiesel serta campuran gliserol dan residu methanol dapat terpisah dalam 2-4 hari. Penelitian pemurnian biodiesel yang dihasilkan dengan proses ini masih sedang dalam tahap pengkajian.

Pada Tahun 2006, untuk mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, Pemerintah telah memfasilitasi pembangunan demplot di 5 provinsi serta pembangunan kebun induk dan pengembangan tanaman serta unit pengolahan sederhana di 14 provinsi. Untuk mencapai sasaran substitusi biofuel sebesar lebih dari 5% pada tahun 2025, masih diperlukan penambahan pembangunan kebun benih maupun pengembangan tanaman. Telah dan sedang dilaksanakan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka pengembangan jarak pagar melalui berbagai bentuk informasi kepada masyarakat antara lain (1) Pedoman Budidaya Tanaman Jarak Pagar; (2) Pedoman Perbenihan Jarak Pagar; dan (3) Info Tek Jarak Pagar yang memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan jarak pagar setiap bulan.

D. Penanganan Rawan Pangan

Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Jumlah penduduk miskin terus meningkat, dengan demikian semakin banyak orang yang menghadapi rawan pangan. Secara umum, Indonesia mempunyai permasalahan serius yang berkaitan dengan ketahanan pangan rumah tangga untuk 10 tahun terakhir seperti halnya prevalensi anak-anak kurang gizi.

Terjadinya kasus rawan pangan dan gizi buruk di beberapa daerah, menunjukkan bahwa masalah ketahanan pangan bukan masalah yang sederhana dan dapat diatasi sesaat saja, melainkan merupakan masalah yang cukup kompleks karena tidak hanya memperhatikan situasi ketersediaan pangan atau produksi disisi makro saja melainkan juga harus memperhatikan program-program yang terkait dengan fasilitasi peningkatan akses terhadap pangan dan asupan gizi baik ditingkat rumah tangga maupun bagi anggota rumah tangga itu sendiri.

Masalah ketahanan pangan memiliki dimensi tersendiri dilihat dari keamanan pangan, keanekaragaman pangan dan kualitas pangan. Pangan sebagai kebutuhan pokok terpenting, memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung dengan kondisi kesehatan, kecerdasan dan

produktivitas sumberdaya manusia. Di samping itu pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk Indonesia merupakan fondasi kuat untuk pembentukan kualitas manusia bangsa Indonesia, merupakan pilar bagi pembangunan ekonomi dan sektor lainnya, serta merupakan wahana untuk memenuhi hak azasi setiap insan atas pangan.

Oleh karena itu berbagai program pembangunan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat kabupaten/kota perlu lebih diarahkan pada dukungan fasilitasi peningkatan produksi dan ketersediaan pangan, distribusi dan aksesibilitas pangan dan perbaikan konsumsi pangan antara lain: (1) pemanfaatan potensi dan keragaman sumberdaya lokal secara efisien dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi; (2) pengembangan sarana prasarana yang mendukung produksi pangan; (3) peningkatan pelayanan penyuluhan dan pendampingan ketahanan pangan masyarakat (4) pengembangan perdagangan pangan regional dan antar daerah; (5) pengembangan lumbung pangan dan cadangan pangan (6) peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui upaya diversifikasi konsumsi pangan (7) revitalisasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagai sistem pemantauan secara dini rawan pangan serta (8) serta fasilitasi terhadap permasalahan lain yang terkait dengan penanganan kelompok rawan pangan diatas.

Dalam upaya penanganan kerawanan pangan, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan World Food Programme (WFP) telah menyusun peta kerawanan pangan/Food Insecurity Atlas (FIA) yaitu suatu alat untuk mengetahui daerah rawan pangan dengan permasalahan yang melatarbelakangi kejadian rawan pangan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan kebijakan bagi penanggulangan kerawanan pangan.

Analisis yang dilakukan pada pemetaan FIA tidak mengikutsertakan daerah perkotaan, tetapi hanya dilakukan pada 265 kabupaten di 30 propinsi, karena kerawanan pangan di daerah perkotaan harus dianalisis secara terpisah sebab mempunyai karakteristik tersendiri. Penyusunan peta FIA dilakukan pada daerah rawan pangan kronis dan rawan pangan transien. Rawan

Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan karena keterbatasan SDA dan keterbatasan kemampuan SDM sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.

Berdasarkan analisis peta FIA yang melatarbelakangi terjadinya kerawanan pangan pada 100 kabupaten sesuai dengan tingkat prioritasnya, maka permasalahan dominan yang ditemui pada masing-masing kabupaten antara lain : (1) aspek ketersediaan pangan, meliputi : konsumsi normatif perkapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu; (2) akses terhadap pangan dan mata pencaharian, meliputi indikator : persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meliputi : persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai, Persentase penduduk tanpa akses listrik ; (3) aspek kesehatan dan gizi, meliputi : angka harapan hidup pada saat lahir, berat badan balita dibawah standar, angka kematian bayi, Penduduk tanpa akses ke air bersih, Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 km dari Puskesmas ; (4) masalah sarana, meliputi ketiadaan akses jalan, ketiadaan akses listrik, ketiadaan akses ke air bersih; (5) masalah pendidikan : perempuan buta huruf

• Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kerawanan Pangan

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data, dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi. SKPG merupakan suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi, yang berjalan terus menerus. Oleh karena itu penerapan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi diharapkan dapat diandalkan sebagai alat pemantauan dini, pengolahan dan analisis data, peramalan,

pemetaan, maupun perencanaan penanggulangan/intervensi masalah kerawanan pangan dan gizi dengan mengoptimalkan koordinasi lintas sektor.

Melalui kegiatan analisis situasi pangan dan gizi yang didasarkan pada data laporan rutin yang tersedia, atau berdasar hasil survei-survei khusus, dapat dijadikan bahan pengambilan Keputusan ataupun Tindakan Penanganan Masalah Krisis Pangan dan Gizi. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan kerawanan pangan dan gizi serta evaluasi program jangka panjang maupun program jangka pendek.

Informasi yang dihasilkan dari penerapan SKPG melalui tindakan peramalan secara berkala dapat dijadikan bahan tindakan preventif terhadap produksi pangan, dengan mewaspadai situasi, melakukan pemantauan tanda-tanda secara intensif. Selain itu dipergunakan apabila terjadi ancaman terjadinya krisis pangan, dengan melakukan analisis Indikator dan, krisis pangan/kelaparan tingkat rumah tangga, gizi kurang dan gizi buruk.

Melalui kegiatan SKPG dilakukan identifikasi dan inventarisasi daerah rawan pangan kronis dan transient secara dini, sehingga dapat diketahui daerah dan kelompok masyarakat tani (beberapa kelompok tani) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya dan sebab-sebab terjadinya kerawanan pangan

• Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan (PDRP)

Kegiatan penanganan daerah rawan pangan telah dimulai sejak tahun 2002 dalam bentuk kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Pada tahun berikutnya 'PDRP' tidak lagi dalam bentuk BLM, akan tetapi merupakan kegiatan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan karena terkena dampak bencana.

PDRP tahun 2004 selain sudah diberikan batasan-batasan dalam Pedoman Umum Program Peningkatan Ketahanan Pangan TA 2004 tentang bentuk bentuk

kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam pemanfaatan dana PDRP, masih dipandang perlu untuk memberikan Pedoman Umum Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Tahun 2004.

Pada tahun 2006 alokasi dana dikabupaten digabungkan dengan dana kegiatan Desa Mandiri Pangan yaitu rata-rata sebesar Rp.50 juta. Pemanfaatan dana di kabupaten adalah Rp.25 juta untuk kegiatan identifikasi melalui penerapan SKPG dan Rp.25 juta untuk keperluan intervensi. Bagi kabupaten yang tidak terdapat alokasi dana Tugas Pembantuan, maka dananya dititipkan di provinsi berupa dana dekonsentrasi yang besarnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Bagi daerah yang tidak ada alokasi dana Tugas Pembantuan tugas, apabila terjadi kerawanan pangan maka dana sebesar Rp.25 juta yang dititipkan di provinsi dapat dipergunakan.

Pada tahun 2006 akan diselenggarakan Workshop Penguatan PDRP dalam rangka menyempurnakan Pedoman PDRP yang sebelumnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan PDRP.

- **Koordinasi Penanganan Kerawanan di Papua, NTB dan NTT**

Tiga propinsi yang cukup menonjol masalah kerawanan pangan dan perlu diupayakan penanganannya melalui koordinasi yang baik dengan melibatkan berbagai instansi terkait antara lain di propinsi Papua, khususnya di Yahukimo, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Fokus kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi masalah rawan pangan dan gizi buruk, menginventarisasi upaya yang telah dilakukan, mengidentifikasi kebutuhan akan bantuan yang diperlukan, melakukan intervensi terbatas sebagai pemicu stakeholder untuk melakukan hal serupa dan sebagai acuan dalam menghapuskan kerawanan pangan.

1. **Penanganan di Nusa Tenggara Barat**

Masalah yang timbul di NTB adalah gizi kurang. Sampai dengan Juni 2005 tercatat 1.355 balita mengalami gizi kurang, 1.300 gizi buruk, termasuk 596 balita mengalami marasmus, 22 balita

mengalami kwashiorkor, dan 17 balita mengalami kasus marasmus – kwashiorkor.

Upaya penanganan balita gizi kurang dan gizi buruk memerlukan pendekatan menyeluruh melalui tahapan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi konstruksi. Yang pelaksanaannya harus berkoordinasi antar instansi terkait. Fokus kegiatan yang jangka menengah dan jangka panjang adalah peningkatan ekonomi dan perbaikan konsumsi gizi rumah tangga. Dalam jangka menengah fokus kegiatannya adalah penyediaan sarana produksi dan pengembangan pekarangan, penyebaran ternak ayam dan kambing, gerakan diversifikasi pangan dan gizi, revitalisasi TPG, replikasi kegiatan PIDRA, SPFS dan Desa Mandiri Pangan. Fokus pembangunan jangka panjang adalah perbaikan infrastruktur pedesaan, pengembangan lumbung pangan masyarakat, pangan olahan dan olahannya, pengembangan tanaman bernilai ekonomi (sukun, nangka, mangga dan jambu mete), pengembangan warung desa sebagai sarana promosi pangan beragam dan bergizi seimbang, melanjutkan kegiatan PIDRA, SPFS dan Desa Mandiri Pangan.

2. **Penanganan di Nusa Tenggara Timur**

Masalah penyebab gizi buruk dan rawan pangan lebih kompleks karena menyangkut masalah kekeringan dan kemiskinan serta faktor lain seperti pemahaman soal gizi seimbang dan lainnya. Jumlah penderita gizi buruk 11.440 orang dengan rincian mengalami marasmus 292 orang, kwashiorkor 1 orang dan marasmus-kwashiorkor 4 orang (Juni 2005).

Dalam rangka mengatasi masalah gizi buruk dan rawan pangan, fokus kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas produksi pangan dan peningkatan pendapatan ekonomi rumah tangga. Untuk jangka menengah kegiatan yang dilaksanakan adalah penguatan dan pengembangan kapasitas produksi pangan melalui bantuan benih padi, jagung, kacang tanah dan kacang hijau, serta bantuan sarana produksi pertanian. Selain hal tersebut, dilakukan upaya pemanfaatan lahan pe-

karangan, pengembangan usaha pasca panen dan pengolahan, pengembangan usaha pasca panen dan pengolahan, pengembangan usaha non farm (padat karya), revitalisasi TPG serta replikasi kegiatan PIDRA dan Desa Mandiri Pangan.

Pada tanggal 18 Nopember 2005 Wakil Presiden telah melaunching penanganan bantuan rawan pangan dan gizi buruk di desa Tesabela kabupaten Kupang dengan alokasi anggaran penanganan/ intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi buruk yang dihimpun dari berbagai instansi terkait mencapai Rp.334.797.761.500. Untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Gizi Buruk dan Rawan Pangan dengan penanggung jawab Menteri Pertanian, Ketua Pelaksana Kepala Badan Ketahanan Pangan, dan anggota dari berbagai instansi terkait. Tim yang sama juga dibentuk di tingkat propinsi dan kabupaten.

3. Penanganan Rawan Pangan di Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua

Kabupaten Yahukimo sebagai salah satu kabupaten baru atau pemekaran dari kabupaten Jayawijaya yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 26 tahun 2002, terdiri dari 7 distrik, distrik 27 distrik Jayawijaya dari 91 desa, luas wilayah kurang lebih 17.152 Km², dengan topografi yang bervariasi yakni kawasan pegunungan dan kawasan berbukit terjal berbatuan, dengan ketinggian kurang lebih 3.000 meter di atas permukaan laut. Diperkirakan jumlah penduduk sampai dengan Desember 2005 kurang lebih 154.000 Jiwa yang tersebar pada kawasan dataran tinggi sebanyak 85% dan pada kawasan dataran rendah 15%. Makanan pokok masyarakat yang berada di kawasan pegunungan adalah umbi-umbian sedangkan masyarakat yang bermukim di dataran rendah makan sagu.

Sejak bulan Maret s/d Desember 2005 terjadi kerawanan pangan di Kabupaten Yahukimo di 17 titik/distrik yang ditandai dengan munculnya kasus kelaparan (penduduk meninggal) antara lain

di Kosarek 45 orang, Dagi 23 orang, Korupun 15 orang. Penyebab lainnya adalah penyakit pernapasan (ISPA), muntaber, malaria, diare, demam, dll. Hal tersebut dipicu dengan curah hujan yang tinggi secara terus menerus.

Penyebab utama kerawanan pangan adalah kegagalan panen ubijalar sebagai makanan pokok dikarenakan adanya serangan hama dan penyakit, curah hujan yang tinggi, kesuburan tanah menurun dan teknik budidaya masih tradisional serta daerah tersebut terisolir. Hal tersebut berdampak terhadap produksi yang dihasilkan umbinya menjadi kecil.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Departemen Pertanian telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa bantuan bibit/benih, ternak, peralatan, kompos, penanganan terasering dan penyuluhan pertanian. Untuk melihat keberhasilan penanganan kerawanan tersebut maka Bapak Presiden RI telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Jaya Wijaya dan Yahukimo pada tanggal 27-28 Juli 2006 sekaligus melakukan panen perdana ubijalar di distrik Pasema pada tanggal 28 Juli 2006.

Dalam rangka menindaklanjuti kunjungan Presiden RI ke Yahukimo dan kerawanan pangan di Yahukimo tidak terulang kembali maka dalam waktu dekat Departemen Pertanian akan memberikan bantuan bibit ubijalar, keladi/talas, hortikultura/sayuran dan peralatan seperti cangkul, balancong dll dengan dana yang bersumber dari Sekjen Deptan sebesar Rp. 3 milyar dan Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp. 2 milyar. Sedangkan dalam jangka panjang, Departemen Pertanian akan membangun suatu sistem pertanian yang tangguh sesuai dengan kondisi agroklimat setempat, yang meliputi : perencanaan pertanian yang lebih baik, menyusun pola tanam, pengenalan varietas unggul baru, pemupukan organik (kompos), pengendalian OPT, mengupayakan agar petani melakukan usaha tani secara menetap dan melakukan perawatan tanaman yang baik, penanganan panen dan pasca panen serta memperbaiki mutu lahan (konservasi) secara bertahap.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pada dasarnya di Yahukimo belum ada masalah kesehatan yang terkait dengan busung lapar, namun ada indikasi kekurangan bahan pangan. Hal tersebut ditandai dengan dikonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan dari hutan, karena kebun yang ditanami belum menghasilkan. Sedangkan kasus kematian yang dilaporkan disebabkan karena dehidrasi diare, penyakit ispa dan malaria.

Untuk mengatasi masalah di Yahukimo telah dilakukan koordinasi penanganan lintas sektoral dengan fokus kegiatan seperti: penataan pemukiman, pengembangan infrastruktur, pembangunan pertanian dan cadangan pangan, penguatan/pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat. Rencana yang akan dilakukan dalam jangka menengah adalah pemukiman kembali masyarakat lokal yang tersebar dengan memberikan bantuan perumahan dan pembangunan infrastruktur pedesaan, serta bantuan saprodi. Kegiatan lainya adalah pengembangan pangan alternatif (jagung, talas dan sukun), peningkatan pelayanan medis dan penyuluhan pertanian serta pengelolaan cadangan pangan. Rencana jangka panjang adalah peningkatan kemampuan produksi pangan, pengelolaan cadangan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Rencana tersebut diimplementasikan melalui kegiatan perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian dan pedesaan, pembangunan dan perbaikan sistem usahatani, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur penelitian lapangan, peningkatan kemampuan masyarakat dan aparat dalam mengelola usahatani dan lumbung pangan serta revitalisasi TPG.

E. Penanganan Kekeringan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air

Sumber daya air saat ini di sebagian wilayah Indonesia sudah mencapai tingkat kritis akibat degradasi daerah tangkapan air di wilayah hulu. Ini diindikasikan dengan terjadinya banjir dan tanah longsor dimusim penghujan dan kekeringan di musim kemarau yang terus berulang hampir setiap tahun.

Dalam rangka penanggulangan banjir dan kekeringan, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air telah melakukan beberapa langkah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Langkah jangka pendek seperti penyediaan pompa air guna mengatasi pertanian yang kekurangan air, jangka menengah seperti pembuatan embung, pembuatan rorak, dam parit. Sedangkan langkah jangka panjang seperti kegiatan usahatani konservasi.

Disamping kegiatan yang bersifat fisik di lapangan, Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air telah membentuk Pokja GNKPA (Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air). Dalam GNKPA tersebut, kontribusi dan dukungan nyata Departemen Pertanian, khususnya Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu kegiatan konservasi lahan pada hulu DAS/lahan kering kritis untuk mencegah erosi dan kegiatan konservasi air untuk mencegah daya rusak air dan mengurangi run-off serta sekaligus menambah cadangan air di musim kemarau.

Dampak kekeringan dan banjir selama tahun 2005 dan 2006 terhadap para petani yang tertimpa bencana tidaklah dapat diabaikan begitu saja. Hal ini karena mereka akan menderita kerugian akibat penurunan hasil atau bahkan hasil tanaman tidak dapat dipanen sama sekali (puso). Berdasarkan data dari Ditjen Tanaman Pangan pada tahun 2005 dan 2006, secara rinci data banjir dan kekeringan adalah sbb (tabel 7.24)

Tabel 7.24. Data Kekeringan dan Banjir di Indonesia TA. 2005 & 2006.

No	TAHUN	BANJIR		KEKERINGAN	
		TERKENA	PUSO	TERKENA	PUSO
1	2005	223.092	78.239	23.703	42.904
2	2006	252.863	101.210	59.126	1.616

Catatan: Data banjir & kekeringan 2006 s/d posisi Juli 2006.

Pada TA. 2006, terdapat 2 kegiatan utama dalam upaya penanggulangan banjir & kekeringan yaitu:

1. Kegiatan konservasi lahan ditekankan pada upaya percontohan dan pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu. Secara nasional dan sesuai dengan

kemampuan anggaran yang tersedia, kegiatan tersebut baru dapat teralokasikan pada lahan kritis seluas + 2.300 Ha yang mencakup 18 Propinsi dan tersebar di 70 kabupaten. Disamping itu juga dilakukan percontohan pembuatan "rorak" (perangkap material tanah tererosi) pada lahan usaha tani seluas 513 ha mencakup 10 propinsi dan tersebar di 22 kabupaten. Kedua kegiatan diatas terutama dialokasikan pada hulu DAS kritis maupun lahan kering kritis lainnya yang merupakan kantong-kantong kemiskinan.

2. Kegiatan konservasi air untuk mengendalikan run-off dan daya rusak air yang juga sekaligus sebagai cadangan sumber air terutama pada musim kemarau umumnya berupa pembuatan embung, sumur resapan dan dam parit. Alokasi masing-masing kegiatan adalah sbb: pembuatan embung sebanyak 600 unit yang mencakup 25 propinsi dan tersebar di 220 kabupaten; pembangunan sumur resapan sebanyak 475 unit mencakup 14 propinsi dan tersebar di 32 kabupaten; pembangunan dam parit sebanyak 135 unit yang mencakup 18 propinsi dan tersebar di 57 kabupaten.

Sehubungan dengan dampak negatif kerusakan sumber daya air maka dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan kekeringan yang terjadi pada tahun 2006 telah dilakukan berbagai upaya antara lain : Pemantauan kondisi lapang dan pendirian posko pengaduan, Pemanfaatan bantuan pompa air yang telah ada, Penertiban pencurian air (Illegal pumping) di hulu saluran, Pemetaan daerah rawan kekeringan, Rotasi/pergiliran penjatahan air, dan Pemantapan koordinasi dengan instansi terkait dll

Sedangkan untuk upaya jangka panjang perlu penertiban pola tanam berdasarkan kondisi iklim dan sumber air yang tersedia.

F. Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Kebakaran lahan dan kebun rutin terjadi dari tahun ke tahun dan telah menimbulkan kerugian yang besar baik materi maupun non materi, seperti rusaknya citra Indonesia di dunia Internasional. Beberapa negara maju juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah kebakaran ini, berbagai ancaman boikot

terhadap komoditas perkebunan yang diperkirakan diproduksi dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan merupakan hal yang sering disuarakan.

Kebakaran lahan kebun dan hutan yang mengakibatkan berkurangnya populasi tanaman, keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan ekosistem/fungsi ekologi, timbulnya asap yang mengakibatkan pencemaran udara, mengganggu kelancaran transportasi, komunikasi, dan kesehatan. Berdasarkan data dari ASMC Singapura via Kementerian LH s/d Oktober 2005 terdapat 14.028 hotspots dan sebanyak 4.251 hotspots (30 %) diindikasikan berada pada areal perkebunan, 50 % berada di lokasi hutan dan sisanya 20 % berada di areal masyarakat.. Setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh Dinas Perkebunan sebagian besar terjadi di luar areal HGU perkebunan yaitu pada lahan-lahan yang dienclave/areal masyarakat.

Tujuan kegiatan bantuan Peralatan sederhana pengendalian kebakaran untuk di 11 kabupaten 5 (lima) provinsi prioritas adalah a). membantu masyarakat perkebunan di daerah dalam pengendalian kebakaran; b) untuk meningkatkan upaya pengendalian kebakaran lahan/kebun sedini dan secepat mungkin; c). serta meningkatkan keterampilan petugas dalam penanggulangan kebakaran lahan/kebun. Pada tahun 2006 yang berhasil dimonitor dari data hot spot yang ada yang telah diterima oleh Direktorat Jenderal Perkebunan serta data dari Departemen Kehutanan mengenai kebakaran lahan dan kebun yang terpantau sebagai berikut:

Tabel 7.25. Data Hot Spot Tahun 2006 di wilayah Sumatera

No	Propinsi	Hot Spot			Total
		Januari	Februari	Maret	
1	Aceh	41	26	17	84
2	Sumatera Utara	183	123	70	376
3	Riau	181	877	476	1.534
4	Kepulauan Riau	16	2	26	44
5	Jambi	2	17	19	38
6	Sumatera Barat	54	19	32	105
7	Bengkulu	1	1	6	8
8	Bangka Belitung	0	9	1	10
9	Sumatera Selatan	0	5	1	6
10	Lampung	0	1	2	3
Jumlah		478	1.080	650	2.208

Sumber: LAPAN dan Departemen Kehutanan

Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah: Belum semua Perusahaan Perkebunan memiliki Brigade Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran masih sangat terbatas, dan walaupun ada masih belum mampu menjangkau seluruh areal yang ada; serta Kesadaran masyarakat pelaku usaha perkebunan untuk melaksanakan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar masih rendah, sehingga seringkali terjadi musibah kebakaran lahan dan/atau kebun.

Upaya yang telah dilakukan melalui:

1. Regulas adalah berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, pada pasal 20; pasal 21; pasal 25; pasal 26; SK Direktur Jenderal Perkebunan No. 38/KB/10/SK/DJ.BUN/05.95 tanggal 30 Mei 1995 tentang : Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran Untuk Pengembangan Perkebunan; serta penyusunan Pedoman Penanggulangan Kebakaran di Bidang Perkebunan, tahun 2003.
2. Pelatihan berupa Pelatihan Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, tahun 2005 dan 2006 untuk petugas dinas perkebunan dan perusahaan perkebunan serta rencana 2007 untuk masyarakat yang akan membuka lahan perkebunan; dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kerjasama dengan Kepolisian Negara RI
3. Sosialisasi dengan mengadakan sosialisasi kepada perusahaan perkebunan dan masyarakat tentang Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dan sosialisasi tentang dampak kebakaran terhadap kerusakan lingkungan.
4. Koordinasi di tingkat Pusat Dengan instansi terkait yaitu KLH, Departemen Kehutanan, LAPAN, Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri dan Sekretariat ASEAN serta Pelaku Usaha Perkebunan. Koordinasi ditingkat Daerah sampaisaat ini telah dilaksanakan, misalnya di Provinsi Riau telah dibentuk PUSDALKARHUTLA (Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, sebagai penanggung jawab adalah Gubernur Riau dengan anggotanya instansi terkait seperti Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Bapedalda Provinsi Riau, Bappeda Provinsi Riau, Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas Tanaman Pangan Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Badan Meteorologi dan Geofisika Pekanbaru, Badan Informasi dan Komunikasi Provinsi Riau, Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau, Dinas Perhubungan, Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan, Ditserse Polda Riau, Balai KSDA Provinsi Riau, PPNS Lingkungan Hidup, Badan Kesejahteraan Sosial. PUSDALKARHUTLA ini merupakan pusat koordinasi kegiatan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan yustisi kebakaran hutan dan lahan di Daerah.
5. Bimbingan dan Evaluasi dengan melaksanakan bimbingan dan evaluasi ke daerah terhadap pelaksanaan kegiatan antisipasi dampak anomali iklim dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun.

H. Dampak lumpur panas Lapindo di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur

Akibat semburan lumpur panas pada areal pertanian padi sawah seluas 267,7 ha, di 3 kecamatan, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, secara rinci, seperti tabel berikut :

Tabel 7.26 Luas areal pertanian padi terkena lumpur panas Lapindo

Kecamatan	Luas pertanian terkena lumpur(ha)		Luas baku lahan (ha)	Luas terkena (%)
	Terkena	Puso		
Porong	119,2	119,2	1.162	0,103
Tanggulangun	28,5	28,5	1.245	0,023
Jabon	120	120	1.637	0,073
Jumlah	267,7	267,7	4.044	0,066

Berdasarkan inventarisasi lahan sawah yang terkena lumpur panas Lapindo mencapai luas 267,7 ha, yang terjadi di 3 kecamatan (Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon), Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang mencapai 0,066% dari luas baku sawah seluas 4.044 ha di 3 kecamatan tersebut. Sementara ini PT Lapindo telah memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5 juta/KK dan sawah yang tertutup

lumpur akan dibeli oleh PT. Lapindo. Akibat lumpur panas tersebut, telah terjadi kerusakan fisik tanah, yang berdampak langsung kepada usahatani tanaman pangan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah lahan tersebut masih memungkinkan untuk ditanami. Pada areal disekitar genangan, terjadi kerusakan jaringan irigasi sawah seluas 615 ha. Pada areal ini sedang diupayakan bantuan pompa air dan traktor melalui APBD I untuk mengembalikan fungsi sawah tersebut. Kehilangan hasil yang terjadi pada areal tersebut diharapkan tidak mengganggu program peningkatan produksi pangan Jawa Timur, karena telah dilakukan program akselerasi peningkatan produktivitas pada areal pertanian di luar daerah bencana.

I. Dampak Abu gunung Merapi Jawa Tengah

Akibat aktifitas gunung Merapi di Jawa Tengah, abu vulkanik yang ditimbulkannya menutupi areal pertanian yang ada disekitarnya. Pada tanaman pangan dilaporkan, luas lahan terkena tutupan abu vulkanik seluas 680 ha. Secara rinci seperti tabel berikut.

Akibat abu vulkanik tersebut, terganggunya proses fotosintesa yang berdampak pada penurunan produksi baik kuantitas maupun kualitas. Namun dengan turunnya hujan, abu vulkanik akan tercuci dan kedepan akan berdampak positif terhadap peningkatan kesuburan lahan.

Tabel 7.27. Luas pertanian pangan tertutup abu vulkanik gunung Merapi di Jawa Tengah

Kabupaten	Komoditas	Luas pertanian tertutup abu (ha)	
		Terkena	Puso
Klaten	Jagung	80	43
	Ubi kayu	100	49
	Ubi jalar	79	35
Boyolali	Jagung	206	-
Magelang	Jagung	179	-
	Ubi kayu	36	-
Jumlah		680	127

7.8. KERJASAMA INTERNASIONAL

Dalam rangka kerjasama Internasional Departemen Pertanian telah ditandatangani Nota kesepahaman sebanyak 5 (lima) buah yaitu: (i) Indonesia dengan China (CNTIC) di bidang industri gula, (ii) Indonesia dengan Thailand di bidang kerjasama pertanian, (iii) Indonesia dengan Malaysia di bidang komoditas pertanian, (iv) Indonesia dengan Taiwan sebagai perpanjangan agreement yang telah habis masa berlakunya; serta (v). Indonesia dengan Vanuatu dibidang tenaga ahli.

Nota Kesepahaman tersebut adalah sebagai berikut : (i) Agreement between the Secretariat General of Ministry of Agriculture Republic of Indonesia and China National Technical Import and Export Cooperation on Feasibility Study on Sugar Industry in Indonesia yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Oktober 2005. (ii) MOU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Agricultural Cooperation yang ditandatangani di Bangkok tanggal 16 Desember 2005. (iii) MOU between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Bilateral Cooperation on Commodities yang ditandatangani di Jakarta tanggal 25 Mei 2006. (iv) Agreement on Agricultural Technical Cooperation between the Taipei Economic and Trade Office (TETO) Jakarta and the Indonesian Economic and Trade Office (IETO) Taipei yang ditandatangani di Jakarta tanggal 29 Juni 2006. (v) Arrangement between the Government of The Republic of Indonesia and the Government of The Republic of Vanuatu Regarding Grant Assistance on Agriculture Cooperation yang ditandatangani tanggal 28 Agustus 2006 di Vanuatu.

Sedangkan pada bulan mendatang Nota Kesepahaman akan ditandatangani adalah MOU Indonesia dengan Cuba, Indonesia dengan Rumania, Indonesia dengan Brazil dan Indonesia dengan Nigeria. Selain Nota Kesepahaman, selama periode Oktober 2005 – Oktober 2006 dalam kerangka kerjasama bilateral Indonesia telah mengirimkan 5 orang tenaga ahli ke beberapa negara mitra yaitu:

- 2 orang ke Madagaskar di bidang Pengembangan Padi dan di bidang Mesin Pertanian,
- 1 orang ke Papua New Guinea bidang Mesin Penggiling Padi; dan
- 2 orang ke Vanuatu Alat dan Mesin Pertanian dengan sumber biaya dari JICA dan Departemen Pertanian.

Sidang dan Konferensi Internasional di dalam negeri adalah sebagai berikut yaitu:

1. Sidang Governing Council ke-2 UN-ESCAP CAPSA, 25 – 27 Januari 2006 di Bogor, Jawa Barat.
2. Sidang Trade Negotiating Committee (TNC) dan Trade Negotiating Group (TNG) ASEAN-Korea tanggal 8 -10 Maret di Sekretariat ASEAN.
3. Workshop on ASEAN Rules of Origin (RaO) dan Sidang CCCA ke-40, pada tanggal 15-18 Maret 2006 di Denpasar Bali.
4. Pertemuan dengan Dubes Negera-negara anggota FAO di Kawasan ASPAC tanggal 29 Maret 2006. Sidang dalam negeri, Menghadiri Workshop di bidang FTA tanggal 3-4 April 2006 di Hotel Bumi Karsa (Undangan).
5. Sidang High Level Trade Official (HLTO) Developing Eight (D-8) ke-6 tanggal 3-4 April 2006 di Denpasar Bali.
6. Sidang Komisi ke 26 UN-CAPSA tanggal 6-12 April 2006 di Jakarta.
7. Sidang FAO KE 28 “Regional Conference for Asia and Pacific ” pada tanggal 15-19 Mei 2006 di Jakarta.
8. Informal Senior Official Meeting (ISOM) Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle (IMT – GT) pada tanggal 29 – 30 Mei 2006 di Bengkulu.
9. Sidang WGAFC Indonesia – Australia pada tanggal 26-27 Juli 2006 di Mataram, Lombok (Nusa Tenggara Barat).

Sedangkan sidang di Luar Negeri adalah:

1. Pertemuan The Joint Commission for Economic and Technical Cooperation (JCETC) pada tanggal 30 – 31 Mei 2006 di Sofia, Bulgaria,

2. Pertemuan The 1st Session of Governing Board IT PGRFA pada tanggal 12 – 13 Juni 2006 di Madrid, Spanyol,
3. The 10th APEC Agricultural Technical Cooperation Working Group (ATCWG) pada tanggal 13 – 15 Juni 2006, di Ha Long City, Vietnam,
4. Pertemuan Special SOM AMAF tanggal 28 – 31 Agustus 2006 di Bohol, Philippines,

Kunjungan Menteri Pertanian ke Luar Negeri adalah:

1. Menghadiri Pertemuan The First Session of Governing Board IT PGRFA tanggal 12-13 Juni 2006 di Madrid, Spanyol.
2. Ke Thailand dalam rangka penanda tanganan MOU between The Government of the Republic of Indonesia and the Kingdom of Thailand of Agricultural Cooperation. pada tanggal 16 Desember 2005 di Bangkok, Thailand.
3. Ke Malaysia dalam rangka penandatanganan MOU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on Bilateral Cooperation on Commodities pada tanggal 25 Mei 2006 di Putrajaya, Malaysia.

Kunjungan Kehormatan Negara Sahabat adalah:

1. Kunjungan kehormatan Wakil Dubes Malaysia ke Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian pada bulan Maret 2006.
2. Kunjungan kehormatan Dubes Sudan ke Menteri Pertanian pada bulan Maret 2006.
3. Kunjungan Menteri Pertanian RRC dan Rombongan ke Indonesia tanggal 19-22 Maret 2006.
4. Kunjungan kehormatan Dubes Cuba ke Menteri Pertanian tanggal 4 Juli 2006

Bantuan Internasional ke Departemen Pertanian berupa:

1. Bantuan Tsunami Propinsi ACEH dan Sumatera Utara. Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian (FAO) terus meningkat selama periode 2005-2006. Peningkatan ini ditunjukkan dengan indikator bantuan hibah yang diberikan oleh FAO guna membantu program emergency, rehabilitasi dan rekonstruksi

di Aceh dan Sumatera Utara yang diakibatkan oleh Tsunami.

Jumlah bantuan yang diperoleh dari FAO sebanyak delapan buah proyek TCP, OSRO, dan GCP dengan nilai sebesar US\$ 24.550.651. Bantuan lainnya juga diperoleh dari ADB dan IFAD masing-masing sebesar US\$ 43.870.000 dan bantuan dana dari IFAD sebesar US\$ 30.000.000. Sebagai kelanjutan dari bantuan FAO secara keseluruhan, FAO telah menyiapkan paket bantuan kepada beberapa negara yang terkena Tsunami di Asia termasuk Indonesia berupa teknologi dan capacity building sebagai antisipasi dini ke depan dalam menghadapi bencana serupa dengan nilai bantuan sebesar US\$ 4.687.338 selama lima tahun yang berasal dari Pemerintah Jepang.

2. Bantuan untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah. FAO telah merealisasikan bantuan sebesar US\$ 500.000. Dengan memberikan sejumlah peralatan, benih, bibit, dan ternak langsung kepada kelompok masyarakat petani dan peternak.
3. Bantuan untuk Avian Influenza. FAO telah memberikan kontribusi bantuan sebanyak lima proyek dengan pendanaan dari Jepang, Australia, dan Amerika. Total nilai bantuan sebesar US\$ 19.315.353 untuk periode bulan September 2005 sampai dengan bulan Mei 2007.
4. Program SKR yang merupakan hibah bantuan Jepang mulai SKR 2000, SKR 2001 dan SKR 2003 yang direalisasikan untuk pengadaan pupuk. Program SKR 2005 disetujui oleh Pemerintah Jepang sebesar JP¥ 300 juta yang ditandatangani 27 Februari 2006. Pada tahun 2006 kegiatan SKR dibagi dalam 6 kategori, yaitu Penguatan P4S, pengadaan alat flu burung, pengadaan benih, System Reoudving, bahan organik dan kegiatan TIM Nasional SKR dengan total biaya Rp 81 milyar yang disimpan pada Bank Indonesia.
5. Bantuan Pemerintah Jepang. Bantuan pemerintah Jepang melalui Overseas Development Assistance telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1968 melalui Overseas Technical Cooperation Agency (OTCA) dan sejak tahun 1974 seluruh hibah bantuan Jepang dilaksanakan dibawah program Japan International Cooperation Agency (JICA).

Untuk tahun anggaran 2005/2006 jumlah proyek bantuan Jepang adalah 3 proyek sementara untuk periode 2006/2007 direncanakan 3 proyek termasuk beberapa proyek dibawah kesepakatan negosiasi Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement. Adapun bentuk bantuan teknis Jepang ke Indonesia adalah: a) Pengiriman Expert, b) Training, c) Development study, d) Project Hibah, dan e) Project Technical Cooperation.

6. Bantuan Pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) telah membantu Pemerintah Indonesia dalam pembangunan pertanian sejak tahun 1980. Proyek bantuan Korea Selatan pada tahun 2005 adalah berupa pengiriman expert bidang mekanisasi pertanian di Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan dan pengiriman spare parts untuk proyek Aftercare Integrated Agriculture Development on Upland Area for increasing Food Crops Production Project in Tenjo.
7. Bantuan Pemerintah Taiwan. Taiwan sejak tahun 1976 telah membantu pembangunan pertanian di Propinsi Jawa Timur melalui pengiriman misi ahli pertanian Taiwan ke Jawa Timur, selanjutnya pada tahun 1980 dikirim misi lain ke Propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Saat ini ada lima lokasi pengembangan agribisnis yaitu Boyolali (Jawa Tengah), Sleman (Yogyakarta), Mojokerto, Lawang, Batu (Jawa Timur). Tujuan utama dari pengiriman misi Taiwan tersebut yang dikenal dengan Taiwan Technical Mission adalah: Membantu pemerintah Indonesia baik software dan hardware dalam peningkatan pendidikan dan penelitian di sector pertanian; Meningkatkan dan memperbaiki sistem penyuluhan pertanian, peternakan, dan perikanan; Memperbaiki sistem budidaya dan produksi ke tiga sektor diatas; Memperbaiki sistem pertanian dan model agribisnis; Membantu pendidikan penyuluhan, peningkatan pendapatan petani, dan pembangunan ekonomi daerah pertanian; Transfer teknologi.
8. Bantuan dari Asian Development Bank (ADB), proyek yang merupakan perluasan dari proyek Participatory

Development of Agriculture Technology Project (PAATP).

Sebesar US\$ 65,5 juta di koordinir oleh Badan Litbang pertanian dan sudah diusulkan ke Bappenas untuk diusulkan dalam pipeline 2007.

9. Bantuan Islamic Development Bank (IDB), Post Tsunami Rehabilitation of Irrigation Infrastructure in the Aceh Province (phase I) sebesar US\$ 15 juta yang termasuk dalam Three Years Work Programme IDB 2006-2007 dikoordinir oleh Ditjen Pengolahan Lahan dan Air.
10. Development of Small Ruminant Production and Export from Indonesia sebesar US\$ 31,11 juta yang dikoordinir oleh Ditjen Perhubungan.
11. Borker IFAD (Loan), Project Rural Employment and Agriculture Development Programme (READ) sebesar US\$ 37,87 juta untuk 5 Kabupaten yaitu : Bonggol, Poso, Toli-toli, Parigi, Mouty & Boul dikoordinir oleh Badan SDM Pertanian. Borker World Bank (WB), Proyek Farmer Employment Through Agricultural Technology and Information (FIATI) sebesar US\$ 125 juta yang dikoordinir oleh Badan SDM Pertanian untuk mencakup 18 Provinsi.
12. Bantuan Hibah sampai sekarang sebanyak 16 buah proyek yang sumber bantuannya dari JICA, China, JBIC, KOICA, dan Jepang untuk 7 instansi pelaksanaan yaitu Dewan Gula, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan, Ditjen Perkebunan, Badan Karantina dan Sekretariat SKR.

Kerjasama Multilateral

Departemen Pertanian telah melakukan kajian mengenai Special Products (SP) sebagai bahan masukan untuk negosiasi dalam putaran perundingan multilateral (WTO). Hasil kajian menunjukkan 14 produk pertanian yang harus diperjuangkan sebagai SP dan mencakup 12,01% dari total pos tariff (sched. 21) atau 161 pos tariff lines. Apabila SP kurang 12%, maka Indonesia minimal harus memperjuangkan 8 produk pertanian yang masuk dalam SP, yang berarti mencakup 10% dari total pos tariff atau 120 pos tariff lines. Khusus untuk susu dan produk susu, kami memberikan penekanan untuk masuk dalam SP baik 12% maupun 10% dalam rangka membangun industri persusuan di Indonesia.

Saat ini sedang dilakukan kajian mengenai Special Safeguard Mechanism (SSM). Hasil sementara menunjukkan bahwa Departemen Pertanian dapat mengacu kepada 3 pilihan: semua produk PSP Renstra Pertanian memperoleh perlakuan SSM (37 produk). Apabila point 1 tidak terpenuhi, maka minimal produk yang tertuang dalam PSP Revitalisasi Pertanian memperoleh SSM (22 produk). Semua produk SP mendapatkan perlakuan SSM (14 produk). Namun demikian, apabila SSM dibatasi hanya untuk produk impor substitusi saja maka coverage product-nya hanya terdiri dari: padi/beras, jagung, kedelai, tebu/gula, sapi potong, susu dan olahannya. Masih diperlukan dukungan berupa kajian yang sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan untuk negosiasi.

Sekarang ini kajian yang diperlukan sehubungan dengan 3 pilar bidang pertanian adalah:

1. Pilar Domestic Support: Dampak Penghapusan Domestic Support terhadap Impor Produk Pertanian di Indonesia.
2. Pilar Export Competition: Dampak Modalitas Export Competition terhadap Kebijakan Perdagangan Pertanian Indonesia.
3. Pilar Market Access: Dampak SP Indonesia terhadap Perdagangan Produk Pertanian dari AS dan



Gambar 7.6 Kerja Sama

Sidang WTO-Informal Ministerial Meeting yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni - 2 Juli 2006 di Jenewa belum ada titik temu antar negara anggota. AS belum menunjukkan kemauan politik untuk menurunkan subsidi domestiknya sedangkan Uni Eropa telah bersedia untuk memotong tariff dengan persyaratan penurunan subsidi domestik AS. Dirjen WTO sebagai Ketua TNC diberikan mandat untuk melakukan konsultasi intensif di Jenewa dengan seluruh anggota WTO selama bulan Juli 2006. Diharapkan akhir Juli 2006 para menteri dapat bertemu untuk memfinalisasi modalitas perundingan di sektor pertanian dan NAMA. Hal ini sangat diperlukan apabila perundingan pembangunan Doha akan diselesaikan sesuai jadwal yaitu akhir tahun 2006.

Kerjasama Regional

ASEAN-AFTA

Dari hasil Sidang Coordinating Committee on The Implementation on CEPT Scheme for AFTA (CCCA) ke 41 di Kuala Lumpur, 8 - 10 Juni 2006, Indonesia telah menginformasikan kepada negara anggota baru ASEAN (Camboja, Laos, Vietnam dan Myanmar/CLMV) bahwa proses proses perpanjangan pemberian skema preferensi khusus bagi CLMV (AISP) saat ini masih dalam proses pembahasan dengan instansi terkait untuk selanjutnya akan diterbitkan legal enactmennya (Peraturan Menteri Keuangan/PMK). Penghapusan tariff atas 80% produk dalam "Inclusion List" akan diimplementasikan tanggal 1 Januari 2008. Untuk itu pembahasan atas persiapan penghapusan tarif akan dimulai tahun 2007 bagi ASEAN - 6. Indonesia telah mengusulkan untuk menunda kewajiban yang ditetapkan dalam CEPT Agreement terhadap produk sensitive dan politis seperti gula dan beras. Hal tersebut telah tertuang dalam "Draft Protocol to Implement the Special Arrangements for Highly Sensitive Products". Draft tersebut akan direspon oleh negara anggota ASEAN dan diendorse dalam AEM Retret 2007. Indonesia menolak usulan kompensasi Thailand terkait dengan perpindahan produk gula dari TEL ke HSL yakni permintaan penghapusan tarif atas produk durian dan longan serta penangkapan ikan di wilayah Indonesia. Thailand belum memberikan tanggapan yang memadai atas klaim dari Indonesia mengenai tidak diberikannya

konsesi CEPT terhadap produk kopi instant Indonesia yang dieksport ke Thailand.

ASEAN-China FTA

Untuk produk kategori Normal Track telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 56/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Program Penurunan/ Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Normal Track ASEAN-China FTA dan PMK no 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Normal Track ASEAN-China FTA. Normal Track mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2005. Penetapan Tarif Bea Masuk Normal Track ASEAN-China FTA, tahun 2006 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI melalui SK Menkeu no 21/PMK.10/2006 tanggal 15 Maret 2006. osialisasi implementasi Normal Track ASEAN - CHINA FTA telah dilaksanakan oleh Dit. Pemasaran Internasional pada bulan Juni 2006 yang diikuti oleh instansi teknis terkait lingkup Deptan dan Asosiasi yang terkait. hina telah menawarkan konsesi penurunan tarif cocoa powder dari 15% menjadi 0% kepada Indonesia. Stakeholder Indonesia sangat mendukung untuk menerima tawaran China tsb. Indonesia cq. Ditjen PPHP melalui Depdag telah melakukan complain kepada China terkait adanya penolakan ekspor beberapa jenis buah-buahan Indonesia seperti manggis, pepaya dan salak. China belum memberikan respon/posisi terhadap klaim Indonesia. ulit untuk mengevaluasi perdagangan bilateral Indonesia-China dengan menggunakan fasilitas FTA ASEAN-China (form E), mengingat form E ditandatangani oleh pejabat Dinas Perdagangan di setiap Propinsi/Kabupaten.

ASEAN-KOREA FTA

Agreement on Trade in Goods ASEAN - Korea telah diratifikasi oleh para Menteri Perdagangan ASEAN dan Korea pada bulan Juni 2006. Menurut Framework Agreement ASEAN - Korea FTA akan berlaku efektif 1 Juli 2006, namun karena belum satupun kepala negara ASEAN dan Korea menerbitkan legal enactmentnya maka kemungkinan tanggal efektifnya akan mundur. Deplu saat ini masih memproses Keppres RI mengenai ratifikasi ASEAN - Korea FTA. Setelah Keppres ASEAN - Korea selesai, dilanjutkan dengan penerbitan PMK yang mengatur produk normal track ASEAN - Korea.

Komoditi pertanian yang masuk kedalam produk sensitif dalam kerangka ASEAN – Korea FTA meliputi gula, beras, jagung dan kedelai (13 pos tarif kode HS 6 digit atau 31 pos tarif kode HS 10 digit). Hal ini telah sesuai dengan posisi Indonesia dalam penentuan SP di forum WTO. Korea menawarkan tarif rate quota untuk produk manioc (cassava) dan manioc starch (tepung tapioka) masing-masing sebesar 25.000 ton dan 9000 ton dengan tarif in quota 0% dan berlaku untuk ASEAN. Diharapkan para pengusaha Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini.

Korea akan menurunkan 70% pos tarif yang dimasukkan kedalam Normal Track pada saat berlaku efektif ASEAN – Korea FTA. Negosiasi ASEAN – Korea dilanjutkan dengan Working Group on SPS, Working Group on Services and Investment serta Working Group on Economic Cooperation.

ASEAN-India FTA

Negosiasi ASEAN – INDIA FTA sudah mencapai 13 kali sidang. Dalam sidang ke 13 di Singapura juga tetap tidak ada kemajuan atau stagnant. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang tajam mengenai terminologi FTA antara antara ASEAN dan India. Pada posisi terakhir India memasukkan 857 produk dalam chapter 1 – 15 kedalam Exclusion List (EL) atau dikeluarkan dari perundingan. Hal ini tidak diterima oleh ASEAN termasuk Indonesia, mengingat hampir sebagian besar produk pertanian yang menjadi komoditi ekspor utama ASEAN dan Indonesia termasuk yang ada dalam EL India

India menawarkan skema tarif rate quota (TRQ) bagi beberapa produk ekspor utama ASEAN seperti produk palm oil. Para asosiasi terkait cenderung menolak TRQ tsb karena akan menyebabkan kekacauan dengan perdagangan yang telah berjalan selama ini. TRQ juga bertentangan dengan prinsip dasar FTA yakni penurunan dan penghapusan tarif secara bertahap. Dalam ASEAN Economic Minister Meeting pertengahan bulan Agustus 2006 akan diputuskan mengenai kelanjutan dan status perundingan ASEAN – India FTA.

ASEAN-Australia-New Zealand

Pertemuan Asean – Australia – New Zealand Trade Negotiating Committee telah berlangsung lima kali

dan hingga saat ini masih dalam pembahasan mengenai struktur, modalitas, scope negosiasi. Kedua belah pihak masih meneruskan saling tukar menukar informasi dan saling menyerahkan mengenai paper tanggapan dari kedua belah pihak. Sidang Asean – Australia – New Zealand Trade Negotiating Committee akan mulai dilaksanakan pada pertengahan tahun 2006. Negosiasi ASEAN – Korea dilanjutkan dengan Working Group on SPS, Working Group on Services and Investment serta Working Group on Economic Cooperation.

ASEAN-Jepang FTA

Sejalan dengan akan selesainya perundingan FTA bilateral Indonesia-Jepang, maka perundingan FTA ASEAN-Jepang akan mulai dilaksanakan. Setelah mengalami penundaan hampir lebih dari satu tahun negosiasi Asean-Jepang Trade Negotiating Committee kembali dilanjutkan dengan pembahasan mengenai struktur, modalitas, scope negosiasi. Kedua belah pihak masih meneruskan saling tukar menukar informasi dan saling menyerahkan mengenai paper tanggapan dari kedua belah pihak termasuk mengenai Rule of Origin.

KERJASAMA SUB-REGIONAL

Sidang ke-3 Cluster Natural Resources Development (NRD) BIMP-EAGA telah dilaksanakan di Puerto Princesa City, Palawan, Philipina pada tanggal 23-26 Agustus 2006. Dirjend PPHP memimpin Delri sekaligus memimpin sidang mengingat Indonesia menjadi Ketua Cluster NRD. Kesepakatan hasil sidang yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek dan usulan proyek baru sektor pertanian adalah sebagai berikut :

Halal Poultry Project : Merupakan proyek kerjasama Indonesia, Brunei dan Filipina dalam usaha memasarkan produk Halal ke Timur Tengah. Indonesia mensuplai pakan unggas khususnya jagung dari Gorontalo dan Sulawesi Utara, Brunei menerbitkan sertifikat Halal dan Filipina menyediakan bibit unggas dan pemeliharaan serta pemasarannya ke Timur Tengah.

Pada 1st Joint NRD-SMED Meeting tanggal 15 Maret 2006 di Davao City, Filipina, perwakilan sektor swasta dari 4 negara anggota telah menandatangani

Memorandum of Agreement untuk mendukung pelaksanaan Halal Poultry Project ini. Hal ini menandakan dimulainya komitmen dari sektor swasta untuk melaksanakan proyek tersebut tahun ini, sehingga ekspor produk unggas Halal dari Filipina ke Timur Tengah dapat segera terealisasi.

Sidang sepakat proyek ini harus dilaksanakan dalam waktu dekat dan akan dilaporkan pada pertemuan Kepala Negara BIMP-EAGA tanggal 10 Desember 2006 di Cebu, Philipina. Brunei Darusalam diharapkan dapat segera menyelesaikan registrasi perusahaan Joint Venture yang akan bekerjasama melaksanakan Halal Poultry Project ini di Brunei Darusalam sebelum sidang SOM/MM BIMP-EAGA tanggal 8-10 November 2006 di Malaysia. Ekspor jagung dari Indonesia (terutama Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk pakan unggas), sebagai bagian dari kegiatan proyek kerjasama ini dapat dilakukan 21 hari setelah Indonesia dinyatakan bebas flu burung.

Oil Palm Industry Development Project : Delegasi Malaysia mempresentasikan proyek Palm Oil Industrial Cluster (POIC) of Sabah Sdn Bhd, yang berlokasi di Lahad Datu, Sabah, yang bertujuan untuk pengembangan prasarana industri hilir kelapa sawit. POIC membutuhkan dukungan dan kerjasama dengan Indonesia dan Philipina guna memenuhi kebutuhan bahan mentah untuk industri hilir ini. Pihak Malaysia menyetujui untuk bekerjasama dengan negara anggota BIMP-EAGA untuk investasi dan produksi di proyek ini.

Virgin Coconut Oil Project : Sudah dilakukan ekspor perdana VCO dari Sulawesi Utara ke Sabah. Kandungan Iodine VCO pada kelapa sawit asal Sulawesi Utara memenuhi range syarat mutu dari Sabah (7,25-11). Kelapa sawit di Sulawesi Utara diproses setengah jadi kemudian diekspor ke Sabah untuk diolah lebih lanjut dan dipasarkan ke Sabah dan wilayah Malaysia lainnya. Sidang menyepakati bahwa kegiatan proyek ini harus dilaksanakan secara integrasi antara petani kelapa, koperasi dan pengusaha kecil menengah. Sidang juga menyepakati untuk mengundang pihak lainnya termasuk ADB dan GTZ untuk memberikan bantuan teknik dalam rangka pengembangan industri VCO di wilayah BIMP-EAGA.

Joint Venture on Oil Palm Production and Processing : Berkaitan dengan Palm Oil Industrial Cluster (POIC) di Sabah, Philipina mempresentasikan project proposal Joint Venture Project for the Development of BIMP-EAGA Oil Palm Industry yang terletak di Mindanao Barat, Propinsi Zamboanga-Sibugay. Pemerintah Daerah propinsi ini menyatakan bahwa sekitar 18.500 hektar akan dialokasikan untuk pengembangan kebun kelapa sawit.

Proposal proyek ini dapat dikerjasamakan dengan POIC, dimana Philipina akan memasok bahan mentah ke Malaysia untuk diproses lebih lanjut mengingat Philipina belum menguasai teknologi pasca panen palm oil. Hambatan yang paling besar adalah adanya pelarangan untuk mengekspor bibit palm oil dari Malaysia ke Philipina. Sidang sepakat untuk mengangkat isu mengenai kesulitan ini untuk dibahas pada pertemuan SOM/MM BIMP-EAGA tanggal 8-10 November 2006.

Harmonization of Virgin Coconut Oil Product Standard : Berkaitan dengan pengembangan VCO, Philipina mempresentasikan project proposal dengan judul the Harmonization of VCO Product Standards in BIMP-EAGA. Usulan proyek ini bertujuan untuk pengembangan standard harmonisasi kelapa organik dan system sertifikasi untuk industri VCO di wilayah BIMP-EAGA.

Philipina melaporkan bahwa negara tersebut telah mempunyai VCO National Standard yang dapat digunakan sebagai benchmark bagi harmonisasi standard VCO di wilayah BIMP-EAGA. Sidang menyetujui usulan proyek ini dan sepakat untuk dibahas lebih lanjut dalam pertemuan Working Group Agro-Industry selanjutnya.

Kerjasama Bilateral

Indonesia – Jepang (IJEPA): perundingan masih terus berlangsung, pihak Indonesia dan Jepang secara intensif sedang membahas request dan offer list komoditi yang akan di FTA kan. Indonesia berhasil memperoleh bantuan dalam bentuk cooperation dari pihak Jepang.

Pertemuan ke-5 baru saja berlangsung di Bali pada tanggal 2 - 4 Agustus 2006. Pihak Jepang dan Indonesia sudah saling sepakat terhadap request dan offer yang dipertukarkan kecuali untuk beberapa komoditi berikut ini yaitu pisang, nenas, tuna dan plywood. Namun secara prinsip pihak Jepang telah bersedia memberikan konsesi melalui tariff rate quota (TRQ). Perundingan IJEPA ini diharapkan selesai pada bulan Nopember 2006 bersamaan dengan kunjungan Presiden RI ke Tokio.

Indonesia – Australia (WGAFC) : telah diselenggarakan sidang ke-12 WGAFC di Mataram tgl 26 dan 27 Juni 2006 lalu. Ada 8 buah proporsal yang sudah diajukan ke pihak Australia dan sedang dalam pembahasan. Pertemuan Tingkat Ministerial juga telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 yang dilaksanakan di Canberra Australia. Pemerintah Australia pada dasarnya mempertanyakan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam perdagangan daging/ edible offal serta komoditas jeruk.

Indonesia – USA : Terdapat 2 agenda yang mendapat perhatian yaitu masalah CLQ (paha ayam) dan automatic detention produk kakao dari Indonesia. Indonesia juga telah mengajukan beberapa kegiatan (proporsal) untuk pengembangan kakao melalui Komkaindo (Komisi Kakao Indonesia). Posisi Indonesia untuk CLQ masih tetap seperti semula yaitu yaitu perlunya dilakukan “overall Review” terhadap industri perunggasan di USA.

Indonesia – Pakistan : Telah dilaksanakan pertemuan TNC I di Islamabad pada tanggal 12-15 Juni 2006 dan dilanjutkan dengan sidang TNC ke-2 di Jakarta pada tanggal 28-29 Agustus 2006. Saat ini kedua belah pihak saling mempertukarkan “commodity request list” dan draft ROO (Rules of origin) dan saat ini sedang dilakukan penilaian oleh masing-masing pihak. Pihak Pakistan masih terus mengajukan permintaan konsesi TBM untuk jeruk mandarine (kino), seperti yang diterima China dalam rangka FTA China-Asean. Pertemuan TNC ke-3 direncanakan akan dilaksanakan di Islamabad pada bulan Nopember 2006 dan masing-masing pihak sudah membawa final request list komoditi serta ROO yang akan disepakati kedua belah pihak.

Kerjasama Komoditi

Bilateral

Indonesia – Malaysia, di bidang komoditi Kelapa Sawit, Kakao dan Lada. Kesepakatan yang telah dibuat adalah : Management supply untuk pengembangan biodiesel dan biofuel di masing-masing negara ; Alokasi dana untuk mengatasi kampanye negatif anti CPO yang dapat merugikan ekspor CPO dari kedua negara; Kerjasama mengatasi tarif dan non tarif barrier oleh negara ketiga untuk komoditi kakao dan lada; Meningkatkan kerjasama swasta Malaysia-Indonesia untuk meningkatkan investasi di Industri hilir kakao.

Trilateral

Internasional Tripartite Rubber Cooperation (ITRC) .Kesepakatan yang telah dibuat adalah Kesepakatan management supply dan ekspor karet alam oleh ketiga negara anggota (Indonesia, Malaysia dan Thailand) tahun 2020 dalam rangka menjaga keseimbangan harga karet alam internasional (diatas referente price).

Trilateral Cooperation on Market Access for Horticultura and Palm Oil Products. kesepakatan yang telah dibuat adalah Belanda menyetujui pemberian technical assistance (Training, Survey dan Field Testing) kepada Indonesia dalam rangka memelihara dan meningkatkan akses pasar ke Eropa melalui Belanda.

Regional

ASEAN Cocoa Club : Negara ASEAN sepakat untuk meningkatkan perdagangan Kakao intra ASEAN countries dan memperkuat posisi bersama dalam pasar global melalui perumusan ASEAN Cocoa Contract, Harmonisasi Mutu dan Harmonisasi Tarriiff.

ICO (International Coffee Organization). Kesepakatan yang telah dibuat adalah :Mengupayakan peningkatan konsumsi kopi domestic di negara produsen kopi; Negara produsen kopi berupaya untuk mencegah diterapkannya MRL yang diajukan oleh importer Eropa; Informasi Market Outlook untuk Kopi ;Evaluasi International Coffee Agreement 2001.

IPC (International Pepper Community). Perkembangan hingga saat ini adalah pembahasan perkembangan supply, demand dan harga serta upaya mengatasi permasalahan perdagangan termasuk dari aspek mutu.

International Rubber Study Group (IRSG). Perkembangan hingga saat ini adalah adanya keinginan masyarakat konsumen karet alam untuk mengembangkan perdagangan karet alam ramah lingkungan, namun hal ini ditolak oleh negara-negara produsen. Selain itu informasi tentang Prospek Pengembangan Karet alam dunia sangat diperlukan.

APCC (Asia Pacific Coconut Community). Hingga saat ini masih dilakukan pembahasan perkembangan supply, demand dan harga serta upaya mengatasi permasalahan perdagangan produk-produk kelapa termasuk di dalamnya perbaikan teknologi, mutu dan lain-lainnya.

7.9. KINERJA KARANTINA PERTANIAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, dengan jelas mengamanatkan perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). karena serangan HPHK dan OPTK dapat menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan ketahanan pangan nasional.

Salah satu upaya perlindungan sumber daya alam hayati tersebut adalah dengan pelaksanaan tindakan karantina, dengan tujuan :

- a. Pencegahan masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia,
- b. Pencegahan keluarnya hama dan penyakit hewan

karantina ke luar negeri; dan,

- c. Pencegahan keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila disyaratkan oleh negara tujuan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jo. Peraturan Menteri Pertanian No. 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Perlengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok Badan Karantina Pertanian adalah melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.

Indonesia telah menyatakan masuk dalam keanggotaan WTO (World Trade Organization) sehingga Indonesia terkait dengan segala aturan dan ketentuan perdagangan internasional, khususnya dalam perdagangan global instrumen SPS (Sanitary and Phytosanitary) telah diterapkan oleh negara tujuan ekspor.

Badan Karantina Pertanian sebagai institusi strategis melalui SPS ini tidak lagi dapat diselenggarakan dengan menerapkan sistem yang konvensional. Oleh sebab itu Badan Karantina Pertanian harus dibangun dan dipersiapkan untuk menyelenggarakan perkarantinaan yang modern dan terpercaya, baik di tataran nasional maupun internasional. Untuk itu penyelenggaraan karantina dibangun dan dilaksanakan : (a) dengan sistem dan metode yang responsif terhadap perkembangan iptek, (b) dengan azas legalitas, sistem dan prosedur yang transparan di dukung kaidah-kaidah ilmiah yang obyektif dan SDM yang profesional dan akuntabel.

Dalam menjalankan misinya Badan Karantina Pertanian telah melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan baik berkaitan dengan kegiatan operasional di lapangan maupun pelaksanaan manajemen sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional.

7.9.1. Pelaksanaan Kegiatan Operasional

Pembangunan Badan Karantina Pertanian didasarkan pada program pembangunan Departemen Pertanian,

yaitu : 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, 2) Program Pengembangan Agribisnis, 3) Program peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam program peningkatan ketahanan pangan karantina berperan dalam upaya peningkatan produktifitas melalui; (1) Perlindungan sumberdaya alam hayati dari ancaman hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), (2) Pengawasan keamanan hayati dalam rangka perlindungan masyarakat Indonesia dari berbagai produk-produk pertanian berbahaya seperti hasil rekayasa genitika, iradiasi, cemaran mikroba, kimiawi, dan fisik serta kehalalannya.

Dalam program pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani, karantina berperan sangat besar dalam upaya peningkatan daya saing komoditas pertanian di pasar domestik dan internasional pada era perdagangan bebas saat ini melalui: (1) Peningkatan kondisi sanitasi (kesehatan) dan standar mutu internasional. (2) Mengendalikan produk-produk impor khususnya yang kurang memenuhi standar kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungan hidup (3) Meningkatkan fasilitasi perdagangan produk pertanian ke luar negeri/ ekspor, (4) Mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan yang dapat mengganggu produktifitas/ agribisnis Indonesia.

Kegiatan operasional diwujudkan dalam pelaksanaan tindakan karantina yaitu meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Pelaksanaan tindakan karantina yang telah dilaksanakan diantaranya :

- a. Pada bulan Juli 2006 melakukan penahanan terhadap Yellow Maize sebanyak 9.200 Bag @ 50 kg (20x20") atau sebanyak 22 kontainer yang berasal dari Myanmar, milik PT. Multi Sejahtera Abadi. Alasan Penahanan karena tidak dilengkapi dengan Sertifikat Karantina Tumbuhan dari daerah Asal.
- b. Poultry Meat and Bone Meal yang dalam pencegahan (penahanan) Bea Cukai di dalam pelabuhan sebanyak

3.693.075 kg (181 kontainer) dan BKH Kelas I Tanjung Priok ikut tempel segel kartu hasil lab dari 22 sampel, 21 positif mengandung daging sapi. Daging sapi tersebut akan segera ditolak/re-ekspor atau dimusnahkan karena belum ada perkembangan.

Kemudian dalam upaya untuk terus mempertajam kinerja Badan Karantina Pertanian, secara periodik dilakukan temu-temu konsolidasi antara Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina tertentu (sesuai dengan issue yang perlu segera diantisipasi). Dari pertemuan konsolidasi tersebut dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dijadikan acuan tambahan bagi UPT Karantina untuk dilaksanakan dalam tatanan operasionalnya.

7.9.2. Pelaksanaan manajemen sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional.

Pelaksanaan manajemen penunjang kegiatan operasional diwujudkan dalam bentuk berbagai kegiatan yang meliputi : Pengembangan peraturan-perundangan dan system perkarantinaaan, yakni menetapkan kebijakan system penyusunan peraturan perundangan yang berlaku di Badan Karantina Pertanian, dengan sistematika : (1) Penyusunan Naskah Akademik; (2) Penyusunan Rancangan Peraturan; (3) Dengar pendapat dengan pihak ketiga; (4) Proses penetapan peraturan. Hasil nyata dari penerapan system ini telah tersusun 6 buah Peraturan Menteri Pertanian.

- a. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) karantina melalui penataan SDM baik di kantor pusat maupun UPT dan program kediklatan karantina yakni pembenahan system diklat, serta penempatan, mutasi dan penjenjangan karier yang lebih sehat, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Pembangunan infrastruktur/sarana-prasarana berupa kantor, instalasi karantina, maupun laboratorium.
- c. Pengembangan teknik dan metode perkarantinaaan, yakni berupa pembuatan pedoman teknis perkarantinaaan baik hewan maupun tumbuhan.

- d. Pengembangan system informasi karantina, yakni diantaranya launching web Barantan yangbaru; layanan SMS Center; pelatihan manajemen data dan informasi; penataan jaringan LAN dan peningkatan kapasitas akses internet; penyusunan jaringan informasi fungsional.
- e. Pengawasan lalulintas komoditas pertanian, dengan melakukan berbagai koordinasi dengan instansi terkait.
- f. Pengembangan kelembagaan, yakni membuat kajian struktur organisasi Badan Karantina Pertanian di tingkat Balai, Stasiun, dan wilker, dengan harapan terwujudnya struktur yang lebih representative, liat dan efektif. Misalnya dalam rangka memperkuat rentang kendali pengawasan lalulintas komoditas pertanian akan dikembangkannya 3 UPT Balai Besar, 2 UPT diantaranya untuk memperkuat penyelenggaraan karantina di Indonesia Timur.
- g. Pengembangan public awareness dan kerjasama. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan "quarantine minded" melalui kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi berupa pencetakan leaflet, booklet, pameran, visualisasi, publikasi, promosi, jumpa pers, penyuluhan, dan lain-lain. Kerjasama telah dilakukan dengan berbagai instansi dan kalangan masyarakat khususnya yang terkait langsung dengan penyelenggaraan perkarantinaan baik di dalam maupun di luar negeri.
- h. Peningkatan akselerasi ekspor komoditas pertanian, khususnya dalam penerapan Giant African Snail (GAS)/bekicot dimana semua komoditas yang akan dikirim ke Australia harus dikirim dari pelabuhan yang bebas dari GAS. Badan Karantina Pertanian telah mengupayakan langkah-langkah kebijakan baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang untuk membebaskan pelabuhan ekspor di Indonesia bebas GAS,

7.10 Beberapa Regulasi Bidang Pertanian Tahun 2006.

Sebagai bagian penting untuk mengendalikan arah pembangunan pertanian, Departemen Pertanian telah mengeluarkan beberapa regulasi selama tahun 2006 (Lampiran 1) dan secara kumulatif seluruh regulasi yang telah dikeluarkan Departemen Pertanian selama periode 2004-2006 adalah : (1) Undang-undang sebanyak 2 Prakarsa 3 terlibat dalam pembahasan; (2) Peraturan Pemerintah Sebanyak 6 Peraturan; (3) Peraturan Presiden sebanyak 3 Peraturan; (4) Instruksi Presiden sebanyak 3 Peraturan; (5) Peraturan/Keputusan Menteri yang bersifat kebijakan (Regilling) sebanyak 27 Peraturan dan yang bersifat Penetapan (Bechiking) sebanyak 1.204 keputusan.



BAB VIII

HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN



8.1. PEMERIKSAAN KINERJA

Realisasi pemeriksaan kinerja tahun 2005 sebanyak 692 obyek pemeriksaan (obrik) atau sebesar 125% dibandingkan sasaran pemeriksaan kinerja tahun 2005 sebanyak 550 obrik. Dari hasil pemeriksaan kinerja tahun 2005, ditemukan 4.906 temuan yang terdiri dari temuan kerugian negara sebanyak 544 temuan senilai Rp 17.204.947.977,90, temuan administrasi/non keuangan sebanyak 2.848 temuan, temuan penyimpangan keuangan dengan kategori tidak efisien sebanyak 351 temuan senilai Rp. 18.180.187.793,54, tidak efektif sebanyak 1.063 temuan senilai Rp. 52.230.820.010,54, dan tidak hemat sebanyak 100 temuan senilai Rp. 18.697.067.917,55. (Tabel 8.1).

Tabel 8.1. Hasil Pemeriksaan Reguler terhadap Temuan dan Tindak Lanjut Kerugian Negara Berdasarkan Obyek Pemeriksaan TA 2005

No	Kelompok Temuan	Kerugian Negara		Tindak Lanjut		Sisa Temuan KN	
		Temuan	(Rp)	Temuan	(Rp)	Temuan	(Rp)
1	Temuan Kerugian Negara (KN)	544	17.204.947.977,90	345	10.773.536.518,79	199	6.431.411.459,11
2	Temuan Keuangan Lain:						
	a. Tidak Efisien	351	18.180.187.793,54	213	10.502.279.213,15	138	7.677.908.580,39
	b. Tidak Efektif	1.063	52.230.820.010,54	554	23.736.278.292,99	509	28.494.541.717,55
	c. Tidak Hemat	100	18.697.067.917,55	48	14.341.253.171,30	52	4.355.814.746,25
3	Temuan Non Keuangan/ Administratif	2.848		1.348		1.500	
TOTAL		4.905	106.313.023.699,53	2.508	59.353.347.196,23	2.573	46.959.676.503,30

Hasil pemeriksaan kinerja tahun 2005 menunjukkan peningkatan jumlah temuan kerugian negara yaitu sebesar 544 dibandingkan dengan jumlah temuan tahun 2004 yang hanya sebesar 392, namun apabila dilihat dari nilai temuan kerugian negara mengalami penurunan senilai Rp. 3.506.857.355,89 (16,93%) dibandingkan dengan tahun 2004. Peningkatan hasil pemeriksaan kinerja satu tahun terakhir mengindikasikan adanya peningkatan kinerja auditan sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Deptan.

Hasil pemeriksaan kinerja tahun 2006 sampai pada bulan Desember 2006, ditemukan 1.829 temuan, yang terdiri temuan kerugian negara sebanyak 264 temuan senilai Rp 2.582.216.262,13, temuan administrasi/non keuangan sebanyak 1.068 temuan, temuan penyimpangan keuangan dengan kategori tidak efisien sebanyak 133 temuan senilai Rp 3.477.441.742,93, tidak efektif sebanyak 330 temuan senilai Rp 17.684.590.119,16 dan tidak hemat sebanyak 34 temuan senilai Rp 2.599.401.929,00 (Tabel 8.2).

Tabel 8. 2. Hasil Pemeriksaan Reguler terhadap Temuan dan Tindak Lanjut Kerugian Negara Berdasarkan Obyek Pemeriksaan TA 2006

No	Kelompok Temuan	Kerugian Negara		Tindak Lanjut		Sisa Temuan KN	
		Temuan	(Rp)	Temuan	(Rp)	Temuan	(Rp)
1	Temuan Kerugian Negara (KN)	264	2.582.216.262,13	61	298.782.475,69	203	2.283.433.786,44
2	Temuan Keuangan Lain:						
	a. Tidak Efisien	133	3.477.441.742,93	12	294.415.015,00	121	3.183.026.727,93
	b. Tidak Efektif	330	17.684.590.119,16	12	599.021.900,00	318	17.085.568.219,16
	c. Tidak Hemat	34	2.599.401.929,00	1	15.022.180,00	33	2.584.379.749,00
3	Temuan Non Keuangan/ Administratif	1.068		118		950	
TOTAL		1.829	26.343.650.053,22	204	1.207.241.570,69	1.625	25.136.408.482,53

Hasil pemeriksaan kinerja tahun 2006 dari seluruh indikator/kelompok temuan masih di bawah tahun 2005, karena sampai dengan bulan Desember 2006 masih terdapat laporan hasil pemeriksaan masih dalam poses evaluasi.

8.2. PEMERIKSAAN KHUSUS/ INVESTIGASI

Langkah represif yang telah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang Inspektorat Jenderal, adalah dengan memberikan saran/rekomendasi yang strategis dan membangun berdasarkan temuan hasil pemeriksaan. Adapun saran yang diberikan harus tegas dan jelas, diputuskan berdasarkan temuan/fakta, serta dilakukan secara obyektif. Hal ini akan memberikan efek jera terhadap PNS yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga diharapkan frekuensi tindak penyimpangan di lapangan baik yang berasal dari pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus dapat berkurang secara bertahap. Terhadap berbagai pengaduan masyarakat tentang dugaan adanya penyimpangan di lingkup Departemen Pertanian, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pemeriksaan khusus dengan dukungan terhadap penegakan hukum.

Pada tahun kedua Kabinet Indonesia Bersatu, Departemen Pertanian telah melaksanakan program penanganan KKN melalui pemeriksaan khusus/investigasi. Realisasi pemeriksaan khusus tahun 2005 sebanyak 82 kasus, sedangkan sampai dengan Nopember tahun 2006 sebanyak 82 kasus. Pada umumnya pemeriksaan khusus yang dilaksanakan atas perintah pimpinan sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyarakat kepada Menteri Pertanian dan pendalaman dari pemeriksaan kinerja.

Hasil pemeriksaan investigasi telah memberikan rekomendasi pengenaan sanksi PP No.30 tahun 1980 kepada PNS lingkup Departemen Pertanian mulai Oktober 2004 sampai dengan Desember tahun 2005 sebanyak 75 orang, dan kerugian negara yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp21.904.345.143,40. Dari saran pengenaan sanksi PP 30 tahun 80 terhadap 75 orang PNS tersebut, dapat dirinci berdasarkan tiga jenis hukuman disiplin, yaitu:

- 1) Hukuman Disiplin Ringan berupa tegoran lisan sebanyak 6 orang; tegoran tertulis sebanyak 25 orang dan pernyataan tidak puas secara tertulis sebanyak 24 orang.
- 2) Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun sebanyak 6 orang dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun sebanyak 2 orang.
- 3) Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun sebanyak 3 orang dan pembebasan dari jabatan sebanyak 2 orang.

Tabel 8.3. Jumlah PNS Terkena Sanksi PP No.30 Tahun 1980 dan Jumlah Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Khusus yang Harus Disetor dan yang telah Ditindaklanjuti (Periode Oktober 2004 s.d. Desember 2005)

No	Unit Eselon I	PNS Terkena Sanksi PP No.30/1980 (orang)	Kerugian Negara yang Harus Disetor ke Kas Negara (Rp)	Kerugian Negara yang Telah Ditindak lanjuti (Rp)	Sisa Kerugian Negara (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	1	12.986.460,00	12.986.460,00	Nihil
2	Ditjen Tanaman Pangan	7	326.224.710,00	179.726.460,00	146.498.250,00
3	Ditjen Perkebunan	12	825.033.061,40	375.186.683,40	449.846.378,00
4	Ditjen Peternakan	20	1.845.890.820,00	1.190.449.025,00	655.441.795,00
5	Ditjen PPHP	-	75.290.910,00	75.290.910,00	Nihil
6	Badan Litbang Pertanian	1	1.026.728.500,00	948.081.900,00	78.646.600,00
7	Badan Karantina Pertanian	24	455.478.286,00	455.478.286,00	Nihil
8	Badan PSDM Pertanian	5	333.592.926,00	2.603.000,00	330.989.926,00
9	Badan BKP (DPM-LUEP)	-	17.003.119.470,00	17.003.119.470,00*	Nihil
10	Inspektorat Jenderal	5	-	-	-
Total		75	21.904.345.143,40	20.242.922.194,40	1.661.422.949,00

Sedangkan pemberian sanksi hukuman disiplin terhadap 7 orang PNS lingkup dinas di daerah, diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Adapun kerugian negara dari hasil pemeriksaan khusus beserta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Tabel 8.3.

Sedangkan hasil pemeriksaan investigasi tahun 2006 telah memberikan rekomendasi pengenaan sanksi PP No.30 tahun 1980 kepada 22 orang PNS lingkup Departemen Pertanian, dan kerugian negara yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp 1.434.984.543,00. Dari saran pengenaan sanksi PP No. 30 tahun 1980 terhadap 22 orang PNS tersebut, dapat dirinci berdasarkan tiga jenis hukuman disiplin, yaitu:

- 1) Hukuman Disiplin Ringan berupa tegoran tertulis sebanyak 14 orang.
- 2) Hukuman Disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun sebanyak 3 orang.
- 3) Hukuman Disiplin Berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun sebanyak 2 orang.

Sedangkan pemberian sanksi hukuman disiplin terhadap 3 orang PNS lingkup dinas di daerah, diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Adapun kerugian negara dari hasil pemeriksaan khusus/investigasi beserta tindak lanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 8.4. Jumlah PNS Terkena Sanksi PP No.30 Tahun 1980 dan Jumlah Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Khusus/Investigasi yang Harus Disetor dan yang telah Ditindaklanjuti Periode 2006

No	Unit Eselon I	PNS Terkena Sanksi PP No.30/1980 (orang)	Kerugian Negara yang Harus Disetor ke Kas Negara (Rp)	Kerugian Negara yang Ditindak lanjuti (Rp)	Sisa Kerugian Negara (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	2	-	-	-
2	Ditjen Tanaman Pangan	2	-	-	-
3	Ditjen Hortikultura	4	174.476.500,00	0	174.476.500,00
4	Ditjen Peternakan	5	596.884.500,00	544.834.500,00	52.050.000,00
5	Badan Karantina Pertanian	7	178.670.752,00	128.955.702,00	49.715.050,00
6	Badan Litbang	1	30.197.500,00	0	30.197.500,00
7	PLA	1	436.555.291,00	0	436.555.291,00
8	BKP	-	18.200.000,-	10.000.000,00	8.200.000,00
Total		22	1.434.984.543,00	683.790.202,00	751.194.341,00

8.3. TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

- a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus/investigasi mulai Oktober 2004 sampai dengan bulan Desember 2005, khususnya terhadap pengenaan sanksi PP No.30 tahun 1980 kepada PNS lingkup Departemen Pertanian diserahkan kepada eselon I dimana personil tersebut berada. Kerugian negara dari pemeriksaan khusus telah ditindaklanjuti senilai Rp20.242.922.194,40 (92,42%) dari total kerugian negara senilai Rp21.904.345.143,40 dan sisa sebesar Rp1.661.422.949,00 (7,58%) yang masih dipantau oleh Inspektorat Jenderal. Sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus/investigasi tahun 2006 adalah senilai Rp683.790.202,00 (47,65%) dari total kerugian negara senilai Rp1.434.984.543,00, dan sisa kerugian negara senilai Rp751.194.341,00 (52,35%) yang masih dipantau oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian.
- b. Temuan kerugian negara hasil pemeriksaan kinerja tahun 2005 telah ditindaklanjuti sebanyak 345 temuan senilai Rp10.773.536.518,79 atau 62,61% dari total temuan, dan masih tersisa sebanyak 199 temuan senilai Rp6.431.411.459,11 (37,39%). Sedangkan temuan kerugian negara hasil pemeriksaan kinerja tahun 2006 telah ditindaklanjuti sebanyak 61 temuan senilai Rp298.782.475,69 atau 11,57% dari total temuan dan masih terdapat sisa sebanyak 203 temuan senilai Rp2.283.433.786,44 (88,43%) yang masih terus dipantau penyelesaiannya oleh Inspektorat Jenderal.
- c. Penanganan masalah KKN di lingkup Departemen Pertanian yang kasusnya dilaporkan pada pihak Kejaksaan Agung RI, sampai dengan Nopember 2006 yang telah ditindaklanjuti yaitu terhadap kasus dugaan penjualan aset Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) berupa rumah dinas, rel bekas dan besi kuningan, adanya KKN saat pelelangan rencana penjualan tanah seluas 17 ha di Desa Cipayung Jaya Depok dan Desa Tambun Bekasi, pemanfaatan rumah negara di Jl. Pertanian III Pasar Minggu seluas 3.000m² (tanah dan bangunan), pemanfaatan tanah oleh PNS Departemen Pertanian di Cibinong Bogor karena tanah yang dipinjam pakai dialihkan ke pihak ketiga, serta Kerja Sama Operasional (KSO) Rumah Sakit Pasar Minggu yang berlarut-larut tanpa ada finalisasi;



BAB IX

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2007



9.1. RENCANA KERJA TAHUN 2007

Rencana Kerja Tahun 2007 (RKT) Departemen Pertanian merupakan tahun ke 3 (tiga) dalam pelaksanaan Renstra Deptan 2005-2009. Mulai pada tahun 2007 Departemen Pertanian selain melaksanakan 3 (tiga) program utama juga akan melaksanakan 2 (dua) program pendukung. Program utama terdiri dari: (i) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (ii) Program Pengembangan Agribisnis, dan (iii) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Program pendukung terdiri dari: (i) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, dan (ii) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Kegiatan operasional program PKP tahun 2007 mencakup kegiatan pokok: (i) peningkatan produksi dan produktivitas, (ii) peningkatan distribusi dan akses pangan, (iii) konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan, dan (iv) kegiatan pendukung.

Program Pengembangan Agribisnis (PA) ditujukan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha pertanian yang produktif dan efisien untuk menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional, dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB. Kegiatan operasional program PA tahun 2007 terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu: (i) peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, (ii) pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil, dan (iii) pengembangan pasca panen dan peningkatan mutu komoditas ekspor.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (PKP) bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Kegiatan operasional program PKP tahun 2007 dibagi atas: (i) peningkatan kapasitas, posisi tawar petani dan kualitas SDM pertanian, (ii) pemberdayaan kelembagaan pertanian, (iii) bimbingan dalam peningkatan promosi dan proteksi komoditas pertanian (legislasi dan regulasi), dan (iv) pengembangan sistem pendukung.

Program Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara ditujukan untuk meningkatkan pengawasan aparatur negara dan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan pelaksanaan pembangunan pertanian. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari program ini adalah



terwujudnya sistem pengawasan yang akuntabel di lingkungan pertanian.

Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan ditujukan untuk meningkatkan kinerja Departemen Pertanian dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pembangunan pertanian. Sedangkan sasaran program ini adalah: (i) meningkatnya manajemen pemerintahan yang dapat mendukung peningkatan kinerja Departemen Pertanian dan para pegawainya, dan (ii) meningkatnya penerapan prinsip good governance di Departemen Pertanian.

Dalam implementasinya, berbagai rencana kegiatan pembangunan pertanian tahun 2007 tersebut dioperasionalkan dalam payung 29 (dua puluh sembilan) kegiatan utama. Kegiatan utama tersebut diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani serta merupakan kristalisasi dari berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan pertanian hingga saat ini. Ke dua puluh sembilan kegiatan utama dimaksud akan menjadi unsur utama dan terakomodasi dalam program dan kegiatan Departemen Pertanian pada tahun 2007. Kegiatan – kegiatan utama tersebut terdiri dari:

(1). Pembentukan dan Pengaktifan Kelompok Tani dan Gapoktan

Dalam rangka memperkuat kelembagaan pertanian dan mempermudah pembinaan terhadap kelompok tani, maka pada tahun 2007 akan dilakukan Revitalisasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tingkat perdesaan. Revitalisasi ini dimaksudkan untuk membentuk dan atau mengaktifkan kembali serta memperkuat kelembagaan petani yang ada. Dengan pola ini diharapkan pembinaan pemerintah kepada petani akan semakin terfokus dengan sasaran yang jelas. Pada tahun 2006 kegiatan ini dimulai dengan mengidentifikasi terhadap kelompok-kelompok tani dan Gapoktan yang ada atau mempersiapkan pembentukannya pada desa-desa yang belum ada Gapoktan.

Selanjutnya pada tahun 2007 kegiatan diarahkan pada pengaktifan 22.000 Gapoktan. Apabila pengembangan Gapoktan ini dinilai berhasil maka pada tahun-tahun selanjutnya akan dilakukan pembentukan/pengaktifan Gapoktan lainnya, dengan target akhir terbangun dan aktifnya 66.000 Gapoktan hingga akhir tahun 2009.

(2). Bantuan Harga Benih Kepada Petani Miskin

Selama ini penggunaan benih/bibit unggul bermutu di tingkat petani masih rendah. Dengan demikian kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas melalui penggunaan benih/bibit unggul bermutu bagi petani, mempermudah akses petani miskin terhadap benih/bibit unggul serta memperluas penyebaran benih/bibit unggul pada daerah-daerah kantong kemiskinan, daerah rawan pangan, daerah terisolir dan lainnya. Upaya ini akan dapat menekan harga benih/bibit bermutu agar dapat diakses petani/peternak.

(3). Penjaminan Kredit Pertanian

Selama ini petani/peternak kesulitan mengakses modal dari perbankan karena minimnya cash collateral. Untuk membangun sistem pembiayaan yang mudah diakses oleh petani/peternak, diperlukan skim pelayanan pembiayaan pertanian yang mudah diakses dan mampu memutar roda perekonomian di perdesaan. Untuk itu pemerintah perlu menyediakan dana dasar di perbankan sebagai premi penjaminan atas kredit yang disalurkan kepada petani sasaran oleh Bank Pelaksana. Dana tersebut selanjutnya juga dapat digunakan sebagai risk-sharing atas kredit petani, dan jasa giro-nya dapat diakumulasikan ke dalam cadangan pokok atau dikembalikan ke negara sebagai PNBK. Kegiatan ini sebagai pemantapan dan perluasan dari kegiatan yang sudah dimulai tahun 2006.

(4). Bantuan Bunga Modal Investasi

Pada tahun 2007, kebutuhan investasi untuk mengembangkan subsektor perkebunan dan subsektor tanaman pangan diperkirakan masing-masing mencapai sebesar Rp 10,0 triliun, atau total untuk kedua subsektor Rp 20,0 triliun. Dalam rangka merangsang investasi di kedua subsektor tersebut diperlukan bantuan bunga modal investasi.

(5). Stabilisasi/Kepastian Harga Komoditas Primer melalui Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM – LUEP)

Beras merupakan komoditas strategis didalam kehidupan sosial ekonomi nasional. Satu kendala utama usahatani tanaman pangan terutama padi adalah terjadinya fluktuasi harga padi/gabah yang ekstrim menurut musim tanam. Pada saat panen raya biasanya terjadi di musim hujan, harga padi/gabah menurun dan sebaliknya pada saat paceklik harga meningkat. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam rangka stabilisasi harga pangan tersebut, antara lain dengan meningkatkan peran Bulog dalam pembelian gabah petani serta fasilitasi pemerintah melalui pengembangan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP). Kegiatan DPM-LUEP telah dilaksanakan sejak tahun 2003 dan telah menunjukkan keberhasilan. Untuk itu, pada tahun 2007 kegiatan ini akan lebih diperluas jangkauannya.

(6). Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan Lembaga yang Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)

Salah satu kendala utama petani di Indonesia dalam mengembangkan usahanya adalah terbatasnya modal dan lemahnya kemampuan akses terhadap sumber permodalan. Untuk meningkatkan bargaining power petani, pemberdayaan petani akan dilakukan dengan pendekatan kelompok agar mempermudah pembinaan dan pengembangan usahanya dapat mencapai skala ekonomi. Dalam rangka mengatasi

permodalan petani, akan disalurkan stimulan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) atau yang selama ini dikenal dengan nama Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Kegiatan PMUK ini akan disertai dengan kegiatan pengembangan kelembagaan petani, kemitraan, peningkatan akses terhadap sumberdaya, teknologi dan pasar serta peningkatan kualitas SDM petani.

Di samping kelompok tani, di tingkat perdesaan terdapat pula lembaga yang selama ini tumbuh dan mengakar di masyarakat, atau yang dikenal dengan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Sebagian besar LM3 tersebut berbasis keagamaan: pondok pesantren, seminari, paroki, pasraman, vihara, pura, subak dan lainnya. Sebagian LM3 juga bergerak di bidang agribisnis. LM3 yang bergerak di bidang agribisnis ini dapat dijadikan sebagai percontohan dan pusat-pusat pengembangan agribisnis di lokalita setempat.

(7). Pengembangan Bahan Baku Bio-Energi

Indonesia sebagai negara agraris memiliki aneka ragam penghasil minyak nabati seperti kelapa sawit, kelapa, jarak pagar sebagai bahan baku diesel (substitusi solar) dan minyak bakar (substitusi minyak tanah). Disamping itu, ubi kayu, sorgum, jagung dan tetes tebu juga dapat dijadikan sebagai bahan baku gasohol (substitusi premium) dan penghasil limbah organik (biomassa). Potensi tersebut perlu terus dikembangkan dengan menyediakan bahan baku produksi tanaman penghasil bio-energi dan sarana pengolahannya. Kegiatan ini telah dirintis pada tahun 2006 dan akan ditingkatkan pada tahun 2007.

(8). Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian

Untuk menarik investor masuk ke sektor pertanian, mempermudah aksesibilitas dan distribusi sarana produksi dan output pertanian, diperlukan infrastruktur yang memadai. Selama ini investasi pemerintah di bidang infrastruktur

sangat minim, sehingga banyak jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi yang rusak. Untuk itu diperlukan kegiatan pembangunan dan atau rehabilitasi jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan irigasi perdesaan, tata air mikro, irigasi tanah dangkal, sumur resapan, embung, waduk, dam parit, terasering dan lainnya.

(9). Penguatan Kelembagaan Perbenihan/Perbibitan

Dalam rangka memperkuat dan memperlancar penyediaan benih/bibit pertanian diperlukan dukungan kelembagaan perbenihan/perbibitan yang memadai baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu akan dibentuk pusat-pusat perbenihan tanaman pangan di wilayah berpotensi, dibarengi dengan kegiatan penguatan lembaga perbenihan/perbibitan yang ada baik di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan mengacu pada sistem perbenihan/perbibitan nasional.

(10). Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk

Saat ini subsidi pupuk pada petani dilakukan melalui subsidi gas yang diberikan kepada pabrik. Dengan terbatasnya pasokan gas dan perbedaan harga yang sangat tinggi antara gas dalam negeri dengan harga ekspor, menyebabkan pasokan gas untuk pabrik pupuk menjadi berkurang dan diikuti oleh sulitnya bagi pabrik untuk meningkatkan produksi pupuk. Sementara, harga pupuk bersubsidi yang dijual di tingkat pengecer kebanyakan berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal ini antara lain disebabkan oleh mahalnya biaya transportasi dan tidak seragamnya ongkos angkut pada tiap daerah. Untuk itu pada tahun 2007 perlu dilakukan mekanisme pengalihan subsidi dari subsidi gas menjadi subsidi harga dan subsidi transportasi.

(11). Pengendalian OPT, Penyakit Hewan dan Perkarantinaan

Akhir-akhir ini sektor pertanian sering dilanda musibah serangan wabah hama penyakit tanaman antara lain: wereng coklat, hama sexava, hama PBK, penyakit ternak seperti anthrax, penyakit mulut dan kuku, serta virus flu burung dan lainnya. Untuk itu salah satu prioritas kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2007 diarahkan untuk pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan ternak tersebut.

(12). Pengembangan Kegiatan Magang Sekolah Lapang (SL) Pertanian

Metode yang dirasakan praktis dan mudah diikuti petani dalam alih teknologi adalah metode Sekolah Lapang (SL) Pertanian. Disamping mudah diikuti metode ini juga menarik bagi petani karena dapat langsung diterapkan oleh petani saat mereka melakukan aktivitas usahanya. Untuk itu pada tahun 2007 akan diperbanyak kegiatan-kegiatan SL Pertanian. Selanjutnya SL Pertanian tersebut akan diarahkan menjadi media training of trainers (TOT) dengan sasaran lebih berkembangnya SL Pertanian yang diinisiatif oleh lulusan TOT. Dengan demikian pada masa yang akan datang pemerintah akan lebih banyak mengarahkan kegiatan SL Pertanian ini, tidak lagi perlu membentuk SL-SL baru yang difasilitasi pemerintah.

(13). Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Petani dan Revitalisasi Penyuluhan

Selama ini terdapat kecenderungan terjadi transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke non-pertanian, dimana para pemuda/pemudi di perdesaan lebih tertarik bekerja sebagai buruh di sektor industri maupun di sektor informal, sehingga penduduk yang masih bekerja di sektor pertanian tinggal yang berumur tua. Untuk menarik minat para pemuda/pemudi kembali

membangun pertanian di perdesaan, diperlukan langkah-langkah kegiatan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, magang, studi banding dan lainnya.

Disamping itu dalam rangka revitalisasi penyuluhan kegiatan diarahkan pada pengembangan dan pemantapan BPP yang ada, rekrutmen tenaga penyuluh, pelatihan dan pendampingan serta perbaikan metodologi penyuluhan yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Disamping itu di tingkat perdesaan akan dikembangkan Community Center for Agribusiness yang merupakan kelembagaan layanan informasi pertanian di tingkat desa untuk meningkatkan akses petani terhadap informasi dan teknologi.

(14). Pengembangan Kegiatan Pelatihan Pertanian

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Tingkat pendidikan dan keterampilan petani yang masih rendah memerlukan latihan, khususnya pada aspek yang bersifat praktis dan langsung berhubungan dengan aktivitas usaha ekonomi petani. Untuk itu pada tahun 2007 akan dikembangkan kegiatan berbagai pelatihan bagi petani yang materinya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan petani.

(15). Mekanisasi Kegiatan Produksi Komoditas Pertanian Primer (Pra Panen)

Dalam rangka mengatasi kebutuhan tenaga kerja, khususnya di luar Jawa serta mengantisipasi perluasan areal pertanian yang telah diprogramkan, maka diperlukan teknologi produksi pertanian yang bisa menghemat pemakaian tenaga kerja manusia. Oleh karena itu mekanisasi pada kegiatan produksi (pra-panen) mutlak dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2007 introduksi teknologi mekanisasi pertanian akan

menjadi kegiatan terobosan dalam rangka mempercepat kegiatan proses produksi.

(16). Mekanisasi Kegiatan Pertanian Pasca Panen

Untuk mengurangi kehilangan, meningkatkan mutu hasil dan nilai tambah produk pertanian serta penanganan pemasaran, akan dikembangkan berbagai sarana pasca panen seperti: (1) pengembangan sarana penyelamatan pasca panen (pengeringan melalui terpalisasi dan pengembangan sarana pengering surya), dan (2) sarana pergudangan.

(17). Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)

Penggunaan alsin pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani khususnya tanaman pangan dalam mempercepat pengolahan tanah, pengendalian hama, panen dan perontokan khususnya di daerah intensifikasi. Namun demikian jumlah alsin pertanian masih sangat sedikit dibanding dengan luas lahan yang ada. Disamping itu, pemakaian alsin juga belum optimum khususnya dalam kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (KUPJA). Untuk itu salah satu kegiatan terobosan yang akan dilaksanakan pada tahun 2007 adalah revitalisasi UPJA dan KUPJA. Berkaitan dengan hal ini perlu diupayakan penyediaan penguatan modal pengadaan alsintan bagi petani-peternak berupa pembayaran uang muka (down payment).

(18). Pengembangan Agroindustri Pedesaan

Produksi pertanian di perdesaan kebanyakan masih dalam bentuk produk primer. Untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus membuka kesempatan kerja dan berusaha di bidang usaha pertanian, maka diperlukan penumbuhan industri berbasis pertanian (agroindustri) di tingkat perdesaan. Upaya pengembangan agroindustri di tingkat perdesaan

disamping untuk sarana peningkatan nilai tambah juga ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di perdesaan dan menekan tingkat urbanisasi.

(19). Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian

Dalam rangka pengembangan pemasaran produk pertanian, perlu dikembangkan berbagai sarana dan sistem pemasaran, khususnya untuk daerah luar Jawa. Kegiatan yang diperlukan pada tahun 2007 dalam rangka pengembangan pemasaran ini adalah: (1) Auction market, khususnya untuk komoditas perkebunan, (2) pengembangan grading dan packaging house yang dilengkapi dengan cold storage, terutama untuk komoditas hortikultura, dan (3) pengembangan pasar dan pusat pelelangan bunga di Jakarta dan Surabaya.

(20). Pengembangan Fasilitas Pelayanan Terpadu Agribisnis

Untuk mendorong investasi di bidang pertanian dibutuhkan fasilitasi berbagai pihak sesuai dengan fungsi, kompetensi dan kapasitas masing-masing. Fasilitas tersebut dapat diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta Nasional Besar dan Multinasional. Sinergi semua elemen sangat diperlukan, mengingat keberhasilan investasi tergantung pada ketersediaan faktor pendorong rantai pasokan (supply chain) secara optimal.

(21). Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian

Produksi berbagai komoditas pertanian selama beberapa dekade ini telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan produksi tersebut diperoleh dari hasil peningkatan luas areal tanam atau peningkatan produktivitas. Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai produktivitas komoditas pertanian masih jauh dari potensinya, terutama pada

komoditas perkebunan rakyat. Di lain pihak, walaupun komoditas tanaman pangan relatif lebih maju, namun pengembangan komoditas ini juga dihadapkan pada kendala keterbatasan sumberdaya lahan dan semakin tingginya opportunity cost karena semakin tajamnya kompetisi penggunaan lahan dengan non-pertanian (terutama di pulau Jawa). Keberhasilan peningkatan produktivitas sangat berkorelasi dengan inovasi teknologi (penggunaan varietas/ klon unggul). Untuk itu pada tahun 2007 peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian akan dilakukan melalui perluasan areal tanam, terutama diarahkan di luar Pulau Jawa dan peningkatan produktivitas serta intensitas tanam.

(22). Peningkatan Kegiatan Eksebis, Perlombaaan dan Penghargaan Pertanian

Dalam rangka penyebaran informasi, promosi, dan pemasyarakatan berbagai keberhasilan dan program-program pembangunan pertanian kepada publik, maka pada tahun 2007 kegiatan-kegiatan berupa eksebis maupun berbagai "fair" akan semakin diperbanyak. Kegiatan eksebis ini akan dilakukan berjenjang dari tingkat bawah desa/kecamatan – Kabupaten – Propinsi sampai tingkat Nasional. Kegiatan eksebis terbuka untuk umum dan juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan atau mendorong keterlibatan masyarakat seperti misalnya lomba/kontes ternak (kambing pejantan, sapi) unggul, buah bermutu, dan lain sebagainya.

(23). Pengembangan Pusat Pembibitan Sapi

Dalam dekade terakhir ini impor sapi hidup dan daging sapi masih sangat tinggi, bahkan pernah mencapai lebih dari 420.000 ekor pada tahun 2002, walaupun saat ini ada penurunan impor. Namun demikian, penurunan impor tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan populasi di dalam negeri, tetapi bahkan ada kecenderungan penurunan populasi sapi di dalam negeri yang

disebabkan meningkatnya pemotongan sapi betina produktif dan muda/kecil. Keadaan demikian diperkirakan akan terus berlangsung apabila tidak ada terobosan dalam pengembangan sapi di Indonesia. Untuk itu pada tahun 2007 akan dilakukan kegiatan terobosan revitalisasi perbibitan sapi melalui pengembangan pusat perbibitan sapi (seperti Village Breeding Center) yang dibina oleh UPT Daerah, antara lain: di Gowa, Pasuruan, Lombok Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

(24). Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, Kompos, dan Biogas

Salah satu kegiatan terobosan yang akan dilakukan pada tahun 2007 adalah pengembangan pilot-pilot percontohan integrasi tanaman-ternak, kompos dan biogas di tingkat perdesaan. Kegiatan seperti ini sudah dikembangkan oleh Badan Litbang Pertanian pada dua tahun terakhir ini dan ke depan akan semakin diperluas cakupan komoditas dan wilayahnya. Kegiatan pilot atau percontohan tersebut di lingkungan Departemen Pertanian akan dilakukan dan atau dikoordinasikan oleh Badan Litbang Pertanian.

(25). Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup

Pembangunan pertanian harus dilakukan dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan dimensi yang lebih luas dan dilakukan secara holistik antara lain mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, kelembagaan, maupun ekologi. Praktek-praktek pengelolaan pertanian yang mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan dengan menggunakan pupuk dan pestisida kimia telah berdampak terjadinya levelling off, dimana peningkatan produksi tidak setara dengan besarnya input yang digunakan dan telah berdampak negatif terhadap kesuburan lahan (tanah menjadi tandus dan rentan terhadap serangan hama penyakit). Untuk memulihkan kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas

dan melestarikan lingkungan, maka kegiatan pengembangan pertanian organik akan semakin dikembangkan dan diperluas.

(26). Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat, khususnya Karet, Kopi, Sawit, Kakao, dan Mete

Komoditas utama yang saat ini banyak diusahakan dalam bentuk perkebunan rakyat antara lain karet, sawit dan kakao. Namun sebagai negara dengan luas areal perkebunan terbesar di dunia, Indonesia masih menghadapi kendala rendahnya produktivitas, terutama pada perkebunan rakyat yang merupakan mayoritas. Rendahnya produktivitas ini terutama sebagai akibat banyaknya tanaman yang telah tua, rusak dan tidak produktif lagi, penggunaan bibit bukan klon unggul, dan kondisi kebun yang tidak terawat. Untuk itu pada tahun 2007 akan dilakukan peremajaan dan rehabilitasi perkebunan rakyat nasional.

(27). Pengembangan dan Diseminasi Inovasi mendukung Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian perlu didukung oleh teknologi, sehingga dapat dipercepat dan memberikan hasil yang optimal. Untuk keperluan ini, upaya percepatan penemuan inovasi dan alih teknologi sangat dibutuhkan. Upaya pengembangan dan diseminasi teknologi akan dilaksanakan oleh unit-unit penelitian yang ada di lingkup Departemen Pertanian.

(28). Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Kebijakan dan Regulasi.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan pertanian, sinkronisasi antar subsektor dan lintas sektor, serta koordinasi antara pusat dan daerah, dikembangkan manajemen yang terpadu yang mencakup aspek perencanaan, implementasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengawasan yang sesuai dengan prinsip good governance.

(29) Kegiatan Lain di Luar Kegiatan Utama RKP 2007 (PP 19/2006)

Semua kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi 29 kegiatan utama dengan Outputs (keluaran) sbb : (1) Pembentukan dan Pengaktifan Kelompok Tani dan Gapoktan, (2) Pengembangan Benih Bersubsidi kepada Petani Miskin, (3) Penjaminan Kredit Pertanian, (4) Subsidi Bunga Modal Investasi, (5) Stabilisasi/Kapastian Harga Komoditas Primer melalui Dana Penguatan Modal – Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM – LUEP), (6) Penguatan kelembagaan Ekonomi Petani melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dan lembaga yang mandiri dan mengakar di Masyarakat (LM3), (7) Pengembangan Bahan Baku Bio-Energi, (8) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian, (9) Penguatan Kelembagaan Perbenihan/perbibitan, (10) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk, (11) Pengendalian OPT, Penyakit Hewan dan Perkarantinaaan, (12) Pengembangan Kegiatan Magang Sekolah Lapang (SL) Pertanian, (13) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Petani dan Revitalisasi Penyuluhan, (14) Pengembangan kegiatan Pelatihan Pertanian, (15) Mekanisasi Kegiatan Produksi Komoditas Pertanian Primer (Pra Panen), (16) Mekanisasi Kegiatan Pertanian Pasca Panen, (17) Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA), (18) Pengembangan Agroindustri Pedesaan, (19) Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas pertanian, (20) Pengembangan Fasilitas Pelayanan agribisnis, (21) Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian, (22) Peningkatan kegiatan Eksibisi, Perlombaan dan Penghargaan Pertanian, (23) Pengembangan Pusat pembibitan Sapi, (24) Pengembangan Pertanian terpadu Tanaman – ternak, Kompos, dan Biogas, (25) Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup, (26) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat khususnya Karet, kopi, sawit, kakao, dan Mete, (27) Pengembangan dan desiminasi Inovasi mendukung pengembangan pertanian, (28) Penerapan dan

pemanatapan Prinsip Good Governance, kebijakan dan regulasi, (29) kegiatan lain diluar kegiatan utama RKP 2007 (PP 19/2006).

9.2. ANGGARAN TAHUN 2007

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan No.SE.317/MK.02/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2007 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 disebutkan bahwa pagu definitif RAPBN Departemen Pertanian tahun 2007 sebesar Rp 8.789,62 milyar dengan rincian anggaran Rupiah Murni (RM) Rp 8.405,62 milyar (95,63%) dan sisanya sebesar Rp 383,99 milyar (4,37 %) berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

Adapun alokasi pagu definitif anggaran Departemen Pertanian berdasarkan program dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 9.1. Rekapitulasi Anggaran Deptan 2007

REKAPITULASI ANGGARAN DEPTAN 2007			
1	Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara	34.275.100,00	0.39
2	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan	1.072.975.468,00	12.21
3	Pengembangan Agribisnis	2.237.955.844,00	25.46
4	Peningkatan Ketahanan Pangan	3.242.582.046,00	36.89
5	Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.201.829.610,00	25.05
		8.789.618.068,00	100

- (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan sebesar Rp 3.242.582.046 atau sebesar 36,89 persen.
- (2) Program Pengembangan Agribisnis sebesar Rp 2.237.955.844 atau 25,46 persen.
- (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani sebesar Rp 2.201.829.610 atau 25,05 persen.
- (4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara sebesar Rp 34.275.100 atau 0,39 persen.
- (5) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan sebesar Rp 1.072.975.468 atau 12,21 persen, yang sebagian besar merupakan gaji dan belanja pegawai serta belanja barang pemerintah.

Tabel 9.2. APBN DEPTAN 2007

UNIT ORG	TIDAK MENGIKAT			MENGIKAT	PNBP	JUMLAH
	Non Pendampingan	Pendampingan	PHLN			
DEPTAN (Rp)	7,371,662,515.0	39,084,095.0	383,989,990.0	967,975,468.0	26,906,000.0	8,789,618,068.0
DEPTAN (%)	83.87	0.44	4.37	11.01	0.31	100

Tabel 9.3. Alokasi Anggaran Tahun 2007 per Kegiatan Utama (Pagu Sementara)

(Juta Rupiah)

No	Kegiatan Utama	Pagu yang Diusulkan
1	Pembentukan dan Pengaktifan Kelompok Tani & Gapoktan	40,000.0
2	Bantuan Harga Benih kepada Petani Miskin	1,375,000.0
3	Penjaminan Kredit Pertanian	745,000.0
4	Bantuan Bunga Modal Investasi	500,000.0
5	Stabilisasi/Kepastian Harga Komoditas Primer melalui DPM-LUEP	395,000.0
6	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK & LM3	366,000.0
7	Pengembangan bahan baku Bio-Energi	40,000.0
8	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian	1.009.600.0
9	Penguatan Kelembagaan Perbenihan / Perbibitan	113,000.0
10	Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk	10,000.0
11	Pengendalian OPT, Penyakit Hewan dan Perkarantinaaan	535,400.0
12	Pengembangan Kegiatan Magang SL Pertanian	28,911.4
13	Peningkatan Kapasitas SDM Petani & Revitalisasi Penyuluhan	515,792.0
14	Pengembangan Kegiatan Pelatihan Pertanian	270,000.0
15	Mekanisasi keg produksi komoditas pertanian primer (pra panen)	25,000.0
16	Mekanisasi kegiatan pertanian pasca panen	234,250.0
17	Revitalisasi UPJA dan Kelompok UPJA (KUPJA)	15,000.0
18	Pengembangan Agroindustri Pedesaan	60,000.0
19	Pengembangan Kegiatan Pemasaran Komoditas Pertanian	66,000.0
20	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Terpadu Agribisnis	20,000.0
21	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	315,000.0
22	Peningkatan Keg Eksebsi, Perlombaan & Penghargaan Pertanian	51,500.0
23	Pengembangan Pusat Pembibitan Sapi	60,000.0
24	Pengemb Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, Kompos & Biogas	131,500.0
25	Pengembangan Pertanian Organik dan Lingkungan Hidup	54,030.0
26	Peremajaan Tan Perkebunan Rakyat (Karet, Kopi, Sawit, Kakao, Mete dan tebu)	100,000.0
27	Pengemb dan Diseminasi Inovasi Mendukung Pemb Pertanian	750,000.0
28	Penerapan & Pemantapan Prinsip Good Governance, Kebj & Regulasi	123,901.0
29	Kegiatan lain di luar Kegiatan Utama, RKP 2007 (PP 19/2006)	839,733.07
TOTAL SELURUHNYA		8,789,618.07

Alokasi pagu definitif menurut penggunaannya, antara lain akan digunakan untuk belanja mengikat sebesar Rp 967.975.468,0 (11,01 %), belanja PNBP Rp 26.906.000,0 (0,31%), tidak mengikat non-

pendamping Rp 7.371.662.515,0 (83,87%), tidak mengikat pendamping Rp 39.084.095,0 (0,44%), dan PHLN Rp 383.989.990,0 (4,37%).

Dari uraian di atas tampak bahwa evaluasi kinerja sektor pertanian pada periode Oktober 2005 sampai Desember 2006 akan lebih obyektif bila memperhatikan gejala eksternal luar biasa, yaitu meroketnya harga BBM yang memicu kenaikan harga-harga termasuk biaya produksi yang akan mengurangi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi. Demikian pula halnya dengan bencana alam yang bertubi-tubi yang perlu pula diperhitungkan dalam menilai kinerja pertanian dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dalam kondisi demikian, Departemen Pertanian ternyata mampu mengantarkan sektor pertanian mencapai pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan.

Secara umum dapat disampaikan bahwa setahun terakhir ini, sektor pertanian sedang berada pada tahap menuju pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan (*sustaining growth*). Hal ini setidaknya diindikasikan oleh peningkatan PDB sektor pertanian sampai triwulan III 2006 sebesar 3,41 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2003; tingginya persetujuan rencana investasi di sektor pertanian yaitu 30 persen untuk PMDN dan 64 persen untuk PMA; peningkatan produksi berbagai komoditas terutama padi sebesar 0,13 persen dibandingkan tahun 2005; serta neraca perdagangan komoditas pertanian yang juga positif yaitu sebesar US\$ 5,58 milyar.

Agenda kegiatan jangka menengah-pendek yang perlu segera dirumuskan adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang cukup menggembirakan tersebut. Perlu disadari bahwa potensi pertumbuhan yang ada sudah hampir termanfaatkan secara optimal. Setidaknya ada lima upaya yang harus segera dilakukan agar momentum pertumbuhan yang tinggi sektor pertanian dapat terus dipertahankan, yaitu: (1) pengembangan kelembagaan agribisnis, (2) merenovasi dan memperluas infrastruktur fisik utamanya untuk sistem irigasi, transportasi dan telekomunikasi serta pelistrikan pedesaan, (3) revitalisasi sistem inovasi pertanian, (4) rekonstruksi sistem insentif untuk berproduksi dan investasi, serta (5) pengelolaan pasar input dan output. Semua ini perlu dirancang secara komprehensif dan terpadu.

Perlu juga dipahami, bahwa kinerja sektor pertanian tidaklah semata-mata cermin dari kinerja Departemen Pertanian belaka. Kinerja yang terjadi justru lebih banyak ditentukan oleh pihak-pihak di luar Departemen Pertanian. Oleh karena itu, perbaikan dalam kinerja sektor pertanian, penghargaan perlu diberikan kepada mereka yang telah berjasa yang secara langsung dalam menggerakkan aktifitas pertanian sehari-hari di lapangan.

Jakarta, Januari 2007



**KINERJA PEMBANGUNAN
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006**

BAB X
PENUTUP



Dari ke-29 kegiatan utama tersebut, sebagian kegiatan memang masih merupakan upaya pemantapan dan perluasan dari kegiatan serupa tahun 2006, seperti DPM-LUEP, penjaminan kredit, pengendalian OPT dan penyakit hewan, perbaikan dan penyediaan infrastruktur, dll. Namun demikian pada tahun 2007 akan dilakukan berbagai kegiatan baru yang secara sengaja dirancang untuk memecahkan masalah yang ada saat ini serta mengakselerasi pertumbuhan pertanian secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan dimaksud, antara lain berupa: bantuan harga benih bagi petani miskin pengembangan bantuan bunga modal investasi di sub-sektor tanaman pangan dan perkebunan, pembentukan dan pengaktifan kelompok tani dan Gapoktan, pengembangan bahan baku bio-energi, peremajaan tanaman perkebunan rakyat, ekshibisi dan berbagai lomba/penghargaan di bidang pertanian, revitalisasi UPJA dan KUPJA, penumbuhan agroindustri pedesaan, fasilitasi pelayanan terpadu agribisnis, sekolah lapang (SL) pertanian, dll.

Alokasi anggaran di Pusat dipergunakan untuk kegiatan operasional pembinaan dan pengendalian dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Sedangkan alokasi anggaran ke daerah disalurkan dalam bentuk Dana Dekonsentrasi ke provinsi untuk kegiatan non-fisik, sedangkan Dana Tugas Pembantuan disalurkan ke provinsi untuk kegiatan fisik lintas kabupaten/kota dan Dana Tugas Pembantuan ke kabupaten/kota diarahkan untuk kegiatan fisik dan operasionalnya.

Dana Dekonsentrasi di provinsi antara lain untuk kegiatan koordinasi perencanaan, sosialisasi, pelatihan, fasilitasi pendampingan, operasional petugas lapangan (insentif honorarium bagi penyuluh, mantri tani/kebun/ternak), pengumpulan data dan informasi pertanian, perancangan/pedoman penumbuhan/pengembangan kelompok tani/ Gapoktan dan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A), monitoring, evaluasi dan pelaporan dan lain sebagainya. Sedangkan Dana Tugas Pembantuan di provinsi diarahkan untuk fasilitasi bagi pengembangan kelembagaan UPT perbenihan/pembibitan tanaman dan ternak serta pengendalian

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penyakit ternak, operasional petugas pengawas benih/bibit dan pengamat hama, serta kegiatan fisik lainnya yang bersifat lintas kabupaten/kota.

Dana Tugas Pembantuan yang disalurkan ke kabupaten/kota diarahkan untuk kegiatan fisik lokalita dalam bentuk belanja Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), kegiatan fisik infrastruktur (padat karya maupun kontraktual) serta biaya operasional pembinaannya antara lain: penyusunan Juknis, sosialisasi di tingkat lapangan, identifikasi dan seleksi kelompok sasaran, pendampingan penyusunan rencana usaha kelompok, pelatihan manajemen dan teknis, pembinaan, penumbuhan/pengembangan kelompok tani/Gapoktan/LKM-A, pengumpulan data dan informasi pertanian, pemantauan dan pelaporan, pembinaan lanjutan dan evaluasi pasca kegiatan lainnya.

Di samping itu alokasi anggaran juga untuk mendukung pelaksanaan berbagai Instruksi Presiden yang berkaitan dengan percepatan pemulihan pasca konflik bagi masyarakat di berbagai daerah serta alokasi anggaran untuk NAD dan Nias di luar program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias yang dianggarkan di BRR.

Dalam rangka efektivitas pengorganisasian anggaran, dilakukan pembatasan jumlah Satuan Kerja (Satker) di daerah. Dengan demikian maka alokasi anggaran untuk kegiatan pada aspek hulu dan hilir pada sistem agribisnis akan diintegrasikan ke dalam Satker Ditjen produksi yang ada di daerah, namun dalam RKA-KL masih bisa diidentifikasi komponen kegiatan Ditjen (Produksi, PLA dan P2HP) serta masih bisa diidentifikasi pilihan mekanisme pelaksanaan anggaran (BLM/PMUK, padat karya, atau kontraktual). Guna memperlancar pengalokasian anggaran ke daerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, telah dilakukan inventarisasi nama-nama satker yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**KINERJA PEMBANGUNAN
SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006**

LAMPIRAN



**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MASA BAKTI MENTERI PERTANIAN
KABINET INDONESIA BERSATU**

I

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Tentang	Keterangan
I	2	3	4
I	Undang-undang		
1	Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004	Sumber Daya Air	Departemen Pertanian terlibat penuh dalam perancangannya, inisiatif/prakarsa Departemen Pekerjaan Umum.
2	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004	Pengesahan Kyoto Protocol on the United Nations Frame Work Convention an Climate Change (Protocol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB)	Departemen Pertanian terlibat penuh dalam perancangannya, inisiatif/prakarsa Menteri Lingkungan Hidup.
3	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004	Perkebunan	Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat.
4	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2004	Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protocol Cartagena tentang Keamanan hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati)	Prakarsa Menteri Lingkungan Hidup
5	Undang-undang Nomor 4 tahun 2006	Pengesahan <i>International Treaty on Plant Genetik Resources for Food And Agriculture</i> (Perjanjian Mengenai Sumber daya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian).	Prakarsa Departemen Pertanian.
II	Peraturan Pemerintah		
1	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004	Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian.	Inisiatif Departemen Pertanian.
2	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004	Penerimaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.	Inisiatif Departemen Pertanian.
3	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004	Syarat dan Tatacara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah.	Inisiatif Departemen Pertanian.

120 → 124

**INDANG-UNDANGAN
RI PERTANIAN
IA BERSATU**

ang	Keterangan
	4

kayaan Intelektual	Inisiatif Direktorat Jenderal HKI
raan Intelektual Serta Pengembangan Oleh n Lembaga Penelitian	Inisiator LIPI/Menristek
i Produk Rekayasa	Inisiator Menteri Lingkungan Hidup.

ik Bersubsidi Sebagai
ngawasan.

2	Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi influenza.
---	---------------------------------------	---

3	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006	Kebijakan Energi Nasional
---	---------------------------------------	---------------------------

IV Instruksi Presiden

1	Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2005	Kebijakan Perberasan.
---	---------------------------------------	-----------------------

2	Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005	Kebijakan Perberasan.
---	--	-----------------------

3	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006	Penyediaan Dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain.
---	---------------------------------------	---



**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MASA BAKTI MENTERI PERTANIAN
KABINET INDONESIA BERSATU**

3

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Tentang	Keterangan
1	2	3	4
V	Keputusan Menteri		
1	566/Kpts/PD.640/10/2004, tanggal 6 Oktober 2004	Pernyataan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Bebas dari Penyakit Anjing Gila (RABIES)	
2	568/Kpts/PD.640/10/2004, tanggal 8 Oktober 2004	Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (RABIES) di Pulau Ambon dan Pulau Seram	
3	03/Kpts/HK.060/1/2005, tanggal 17 Januari 2005	Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian	
4	05/Kpts/OT.140/1/2005, tanggal 17 Januari 2005	Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Peraturan perundang-undangan pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004.	
5	64/Kpts/SR.130/3/2005, tanggal 3 Maret 2005	Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2005.	
6	237/Kpts/PD.340/6/2005, tanggal 2 Juni 2005	Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik	
7	238/Kpts/PD.430/6/2005, tanggal 2 Juni 2005	Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik.	
8	333/Kpts/PD.420/8/2005, tanggal 24 Agustus 2005	Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik.	
9	358/Kpts/OT.140/9/2005, tanggal 19 September 2005	Persyaratan Teknis Dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan Sayuran buah Segar Kedalam Wilayah Indonesia.	
10	379/Kpts/OT.140/10/2005, tanggal 19 Oktober 2005	Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian	

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MASA BAKTI MENTERI PERTANIAN
KABINET INDONESIA BERSATU**

4

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Tentang	Keterangan
1	2	3	4
11	381/Kpts/OT.140/10/2005, tanggal 19 Oktober 2005	Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan	
12	01/Kpts/SR.130/1/2006, tanggal 3 Januari 2006	Rekomendasi Pemupukan NP dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi.	
13	37/Kpts/HK.060/1/2006, tanggal 27 Januari 2006	Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan Atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Republik Indonesia.	
14	38/Kpts/HK.060/1/2006, tanggal 27 Januari 2006	Jenis-jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Katagori A1 dan A2 Golongan II Katagori A1 dan A2 Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah sebaranya	
15	264/Kpts/OT.140/4/2006, tanggal 4 April 2006	Penetapan Focal point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (Nasional Plant Protection organization)	
16	271/Kpts/HK.310/4/2006, tanggal 12 April 2006	Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga.	
17	282/Kpts/KU.210/4/2006, tanggal 12 April 2006	Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan modal usaha Agribisnis kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di masyarakat (LM3) pada Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) DepTan TA 2006	
18	482/Kpts/PD.620/8/2006, tanggal 22 Agustus 2006	Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya Dari Negara Atau Bagian Negara (Zone) Terjangkit Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.	
VI	Peraturan Menteri Nomor :		
1	01/Permentan/SR.120/2/2006, tanggal 1 Februari 2006	Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.	

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MASA BAKTI MENTERI PERTANIAN
KABINET INDONESIA BERSATU**

5

No	Jenis Peraturan Perundang-undangan	Tentang	Keterangan
1	2	3	4
2	02/Permentan/HK.060/2/2006, tanggal 10 Pebruari 2006	tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah.	
3	03/Permentan/HK.060/2/2006, tanggal 15 Pebruari 2006	Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok, Kepada Kelompok Sasaran pada Kegiatan Pembangunan Pertanian TA 2006.	
4	04/Permentan/SR.130/2/2006, tanggal 20 Pebruari 2006	Perubahan dan Penambahan Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2006	
5	05/Permentan/SR.130/2/2006, tanggal 1 Maret 2006	Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instansi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum.	
6	17/Permentan/SR.130/5/2006, tanggal 16 Mei 2006	Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 505/Kpts/SR.130/12/2005, Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian TA 2006 Terakhir Telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/SR.130/02/2006.	
7	18/Permentan/OT.140/5/2006, tanggal 30 Mei 2006	Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran.	
8	32/Permentan/KU.510/7/2006, tanggal 24 Juli 2006	Pedoman Pengeluaran Dana bergulir pada pengembanagn Tebu yang bersumber dan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) Anggaran Pendapatan Belanja Negara	
9	33/Permentan/OT.140/7/2006, tanggal 26 Juli 2006	Tata Cara pelaksanaan pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan.	

DAFTAR TABEL

	Hal
2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian, 2002-2006.	7
3.1 Perkembangan Pemohon Investasi Sektor Pertanian Tahun 2006	11
3.2 Persetujuan Investasi PMDN di Sektor Pertanian	13
3.3 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Di Sektor Pertanian (Periode Januari 2004 s/d Agustus 2006)	13
3.4 Jumlah Pendaftaran Perizinan Pestisida dan Pupuk	14
3.5 Realisasi Permohonan Izin Rekomendasi Teknis Bidang Usaha	15
4.1 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan 2004 - 2006	20
4.2 Pencapaian dan Sasaran Produksi Tanaman Pangan Tahun 2005 -2006	20
4.3 Produksi Hortikultura Tahun 2004-2005	21
4.4 Ketersediaan hortikultura Tahun 2004-2005	22
4.5 Produksi Komoditi Perkebunan Periode 2005 – 2006	23
4.6 Produktivitas Tanaman Perkebunan Periode 2005 - 2006.	24
4.7 Populasi Ternak Tahun 2005 - 2006 (satuan dlm ekor)	25
4.8 Produksi Daging, Telur, dan Susu 2005 - 2006 (satuan dlm ribu ton)	25
4.9 Komsumsi Daging, Telur, dan Susu Tahun 2005 - 2006	25
5.1 Perkembangan Kesempatan Kerja Pertanian dan Non Pertanian, 2002 – 2005 (orang).	28
5.2 Perkembangan Perdagangan Luar Negeri (Ekspor-Impor) Indonesia Tahun 2004-2006	29
5.3 Pangsa Ekspor-Impor Sub Sektor Pertanian Terhadap Total Pertanian Tahun 2000-2006	29
6.1 Perkembangan Nilai Tukar Petani, Indeks Daya Beli Petani, dan Indeks Insentif Berproduksi Petani di Tingkat Nasional, 2003-2006 (Tahun dasar 1993=100)	33
6.2 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2005-2006	34
6.3 Produksi Padi/Beras per Propinsi ARAM III Tahun 2006 (Ton)	34
6.4 Situasi dan Perkiraan Panen Padi Juli-Desember 2006	34
6.5 Perkiraan Produksi Padi di beberapa daerah sentra Juli-Oktober 2006 (ton GKG)	34
6.6 Keadaan Kecukupan Beras Dalam Negeri Tahun 2006 (ton)	34

6.7	Rata-rata Harga GKP di Tingkat Petani dan GKG di Penggilingan	35
6.8	Tabel 6.8. Persentase Harga Gabah di bawah HPP di Penggilingan dan Gabah Kualitas Rendah Januari – Oktober 2006	36
6.9	Harga Beras di Tingkat Konsumen Juni 2005 – Nopember 2006	36
6.10	Rata-rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Tahun 2005-2006	38
6.11	Prognosa Pola Pangan Harapan Tahun 2006 - 2015	38
6.12	Perkembangan Penduduk Miskin 1980 - 2006.	39
7.1	Sasaran dan Realisasi Pelaksanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Tanaman Kacang-kacangan & Umbi-umbian Tahun 2006	42
7.2	Perkembangan KPTR di 4 Propinsi Pengembangan Tebu di Jawa	43
7.3	Realisasi Kredit Ketahanan Pangan 2005 – Desember 2006	44
7.4	Dampak KKP Terhadap Pendapatan petani	45
7.5	Realisasi Penyaluran Kredit usaha Mikro & Kecil	45
7.6	Rata-Rata Harga GKP di Tingkat Petani dan GKG di Penggilingan	47
7.7	Persentase Harga Gabah di bawah HPP di Penggilingan dan Gabah Kualitas Rendah Januari – Oktober 2006	48
7.8	Harga Beras di Tingkat Konsumen Juni 2005 – Nopember 2006	48
7.9	Rata-rata Konsumsi Pangan Tingkat Rumah Tangga Tahun 2005-2006	50
7.10	Prognosa Pola Pangan Harapan Tahun 2006 – 2015	50
7.11	Target Fisik dan Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan secara Padat Karya Produktif TA. 2006.	59
7.12	Target Fisik dan Keuangan Kegiatan Padat Karya Tahun 2006	59
7.12a	Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Padat Karya Tahun 2006	59
7.13	Komposisi Penyebaran Varietas Pertanaman Padi, Jagung dan Kedelai pada MT 2005/2006 dan MT 2006	66
7.14	Penyediaan Benih Tanaman Pangan Tahun 2005 - 2006	67
7.15	Varietas Unggul yang Dilepas Tahun 2005 dan 2006	67
7.16	Penyebaran Penggunaan Varietas Padi, Jagung Kedelai Tahun 2005 -2006	68
7.17	Pemasukan/Impor Benih Tanaman Pangan pada Tahun 2005 -2006	68
7.18	Penyediaan Benih Penjenis (BS)	68
7.19	Ekspor Benih Tanaman Pangan pada Tahun 2005 - 2006.	69
7.20	Luas Serangan OPT Utama Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2005 -2006	69
7.21	Luas Kekeringan dan Banjir Pada Tanaman Padi Tahun 2005 - 2006	70
7.22	Alokasi Kegiatan Sekolah Lapang Iklim (SLI) Tahun 2006	71
7.23	Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (ton)	72

7.24	Data Kekeringan dan Kebanjiran di Indonesia TA. 2005 & 2006.	84
7.25	Data Hot Spot Tahun 2006 di wilayah Sumatera	85
7.26	Luas areal pertanaman padi terkena lumpur panas Lapindo	86
7.27	Luas pertanaman pangan tertutup abu vulkanik gunung Merapi di Jawa Tengah	87
8.1	Hasil Pemeriksaan Reguler terhadap Temuan dan Tindak Lanjut Kerugian Negara Berdasarkan Obyek Pemeriksaan TA 2005	100
8.2	Hasil Pemeriksaan Reguler terhadap Temuan dan Tindak Lanjut Kerugian Negara Berdasarkan Obyek Pemeriksaan TA 2006	101
8.3	Jumlah PNS Terkena Sanksi PP No.30 Tahun 1980 dan Jumlah Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Khusus yang Harus Disetor dan yang telah Ditindaklanjuti (Periode Oktober 2004 s.d. Desember 2005)	102
8.4	Jumlah PNS Terkena Sanksi PP No.30 Tahun 1980 dan Jumlah Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan Khusus/Investigasi yang Harus Disetor dan yang telah Ditindaklanjuti Periode 2006	102
9.1.	Rekapitulasi Anggaran Deptan 2007	113
9.2	APBN DEPTAN 2007	114
9.3	Alokasi Anggaran Tahun 2007 per Kegiatan Utama (Pagu Sementara)	114



DAFTAR GAMBAR

	Hal
1.1 Membajak	2
2.1 Indeks PDB Sektor Pertanian Harga Konstan 2000, 2000 - 2005	7
3.1 Kegiatan Sektor Pertanian 1	12
3.2 Kegiatan Sektor Pertanian 2	15
4.1.1 Padi	18
4.1.2 Jagung QPM	18
4.1.3 Kacang Hijau - Sriti	19
4.1.4 Kacang Kedelai - Mahameru	19
4.1.5 Kacang Tanah - Kancil	19
4.1.6 Ubi Jalar - Boko	19
4.1.7 Ubi Kayu - Malang I	19
4.2 Produk Hortikultura	22
4.3 Kelapa Sawit	24
4.4 Pakan Sapi	25
6.1 Perkembangan Harga GKP di Tingkat Petani dan GKG Tingkat Penggilingan Tahun 2005-2006	35
6.2 Perkembangan Harga Beras di Tingkat Konsumen dan PIBC Tahun 2005-2006	36
7.1 Bajak Sawah	47
7.2 Perkembangan Harga GKP di Tingkat Petani dan GKG Tingkat Penggilingan Tahun 2005-2006	48
7.3 Perkembangan Harga Beras di Tingkat Konsumen dan PIBC Tahun 2005-2006	49
7.4 Perkembangan Harga GKP Tk. Petani di Wilayah Kerja LUEP dan Non LUEP Januari-Oktober 2006	52
7.5 Pasar	54
7.6 Kerja Sama	90



Catatan





DEPARTEMEN PERTANIAN

Jl. Ragunan No. 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Telp. 62-21 7806202 Fax. 62-21 7800644

<http://www.litbang.deptan.go.id>, e-mail: webadm@litbang.deptan.go.id